

PEMIKIRAN DAN PERJUANGAN

MOHAMMAD NATSIR



Dr. Tarmizi Taher

Dr. Anwar Harjono

Dr. Ir. A. M. Saefuddin

Prof. Dr. Taufik Abdullah

Dr. Ichlasul Amal

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal

Dr. Mochtar Naim

Dr. Nurcholish Madjid

Dr. Muh. Imaduddin Abdul Rahim

Dr. Yusril Ihza

PEMIKIRAN DAN PERJUANGAN
MOHAMMAD
NATSIR

PEMIKIRAN DAN PERJUANGAN
MOHAMMAD
NATSIR

Dr. Tarmizi Taher

Dr. Anwar Harjono

Dr. Ir. A. M. Saefuddin

Dr. Ichlasul Amal

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal

Dr. Mochtar Naim

Dr. Nurcholish Madjid

Dr. Muh. Imaduddin Abdurahim

Dr. Yusril Ihza



PEMIKIRAN DAN PERJUANGAN MUHAMMAD NATSIR

Dr. Anwar Harjono, SH. dkk.

Kulit muka: Edli RM

Penerbit: Pustaka Firdaus

Kotak Pos 4801 Jakarta 12048

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama: Juli 1996

Daftar Isi

Pengantar Ketua Umum YISC Al-Azhar	vii
Pengantar Penyunting	ix
Pendahuluan	1
- Rumusan Seminar Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir	11
- Keynote Speech Menteri Agama RI Pada Seminar Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir	14
- Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir	19
- Natsir, Seorang Guru yang Perfeksionis Filosofis	24
- Administrator Natsir dalam Episode Sejarah	32
- Diskusi Tentang Agama dan Kebangsaan	42
- Natsir Seorang Tokoh yang Universalis	57
- Mohammad Natsir dan Sayyid Abul A'la Maududi Telaah Tentang Dinamik Islam dan Transformasinya ke dalam Ideologi Sosial dan Politik	63
- Diskusi Tentang Konsep Pak Natsir Tentang Agama dan Politik	75
- Pandangan dan Kebijaksanaan Mohammad Natsir dalam Masalah Pendidikan	85
- Mohammad Natsir dan Konsep Pendidikan yang Integral ... Topik Diskusi: Konsepsi Pak Natsir Tentang Agama dan Pendidikan	98
- Da'wah dan Sumber Manusia	111
- Topik Diskusi: Konsepsi M. Natsir Tentang Agama, Da'wah dan Sumber Daya Manusia	127

Capita Selecta	129
- M. Natsir Tentang Agama dan Kebangsaan	129
- M. Natsir Tentang Agama dan Demokrasi	132
- M. Natsir Tentang Agama dan Pendidikan	135
- M. Natsir Tentang Agama dan Politik	139
- M. Natsir Tentang Dakwah dan Sumber Daya Manusia	141
Tanggapan Tentang Capita Selecta	144
Kesan-kesan	147
Biodata Penulis	159

Pengantar Ketua Umum YISC Al-Azhar

Assalamu'alaikum wr wb.

Alhamdulillah dalam usia ke seperempat abad, 16 Mei 1996, Youth Islamic Study Club (YISC) Al-Azhar masih tetap tegak menjalin tugas-tugas pembinaan generasi muda melalui berbagai program yang mengandalkan pada tiga aspek utama yakni: Kognitif, Afekti dan Psikomotorik. Ketiga aspek ini terintegrasi dalam berbagai kegiatan dengan semangat membangun komunitas belajar dan komunitas berakhlak.

YISC sebagai wadah kajian ke-Islaman selalu mengundang minat sekitar 250 remaja dan pemuda untuk mendaftarkan diri sebagai anggota dalam setiap periode pendaftaran anggota baru. YISC tidak saja membahas Islam dalam konteks teknis keagamaan (Syari'ah, Muamalah dan Tauhid) akan tetapi juga mengkaji instrumen lain, termasuk di dalamnya Sejarah Islam.

Pembicaraan kesejarahan Republik Indonesia tidak lepas dari mata rantai peran para tokoh kebangsaan yang memiliki andil luar biasa bagi proses pembentukan pemerintahan. Salah satu tokoh tersebut adalah Mohammad Natsir.

Memahami betapa pentingnya belajar dari ketokohan Mohammad Natsir dalam dinamika bangsa, YISC menyelenggarakan seminar nasional Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir. Seminar ini diharapkan mampu memberikan motivasi pembinaan dan pengembangan umat bagi civitas YISC khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Untuk memperluas pemikiran-pemikiran positif dari tokoh piawai dengan ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an, maka hasil seminar tersebut disebar luaskan melalui penerbitan buku "Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir". Dari sini diharapkan akan muncul Natsir-Natsir muda yang mampu mengembang amanah umat di masa mendatang.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia Seminar, pengurus Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar, para

pembicara yang telah tulus hati menyumbangkan pemikirannya dan menginfakkan hasilnya untuk kelancaran organisasi. Dan tak kalah pentingnya adalah Penerbit Pustaka Firdaus yang telah berkenan menerbitkan buku yang telah lama dinantikan ini. Semoga amal shaleh kita diterima oleh Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Youth Islamic Study Club Al-Azhar

Imaduddin Abdullah

Ketua Umum

Pengantar

HUJAN deras yang jatuh di hari Minggu 7 Februari 1993 itu, tiada mampu menggoyah ribuan pelayat yang mewakili jutaan umat Islam, untuk hadir di Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sambil memanjatkan doa memohon pada Ilahi, mereka berharap agar lelaki yang sedang mereka antar menuju alam Baqa hari itu, dapat diterima dan mendapat tempat yang layak di sisi-Nya.

Lelaki itu, yang biasa dikenal sebagai 'Pembawa hati nurani umat', telah pergi selamanya. Dialah, Mohammad Natsir, seorang pemikir dan pejuang yang menyelamatkan negeri ini dari perpecahan. Memang, ini bukan rahasia lagi. Mohammad Natsir tak pernah berhenti berfikir dan berjuang untuk ummatnya, bahkan saat menjelang ajal menjemputnya. Ia terus berfikir dan berjuang untuk ummatnya yang sangat dicintainya.

Bayangkan. Sepanjang hayatnya yang berjalan 85 tahun, telah banyak yang ia lakukan untuk negeri ini dan dunia Islam umumnya. Ia diakui sebagai tokoh handal sebagai Pemikir, Intelektual, Pujangga, dan Negarawan. Ia tidak hanya terampil menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan, namun ia juga bertindak secara nyata. Buktinya, selain pernah mengetuai Jong Islamiten Bond (JIB) Bandung, 1928-1932, Mohammad Natsir pernah pula aktif di Partai Islam Indonesia (PII) dan PERSIS. Di dunia pendidikan, Natsir sempat mendirikan Pendidikan Islam (Pendis) di Bandung, sebuah bentuk pendidikan Islam modern yang bernafas agama. Di Pendis ini Natsir menjadi direktur selama 10 tahun, sejak 1932.

Selain itu, Natsir pernah pula menjadi anggota Dewan Kabupaten Bandung, 1940-1942. Ia pun pernah aktif sebagai anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) 1945-1946. Dan menjabat sebagai Menteri Penerangan tiga periode pada era Kabinet Sahrir dan Hatta, 1946-1949. Kemudian menjadi Ketua DPP Masyumi 1949-1958. Pada saat Indonesia menjadi negara Serikat (RIS), sebagai produk Konferensi Meja Bundar (KMB), Natsir menolak tawaran Bung Hatta menjadi PM negara bagian RI di Yogja. Namun ia tetap melakukan lobby selama dua setengah bulan menghubungi negara bagian

lainnya, agar membubarkan diri dan bersatu kembali dengan negara kesatuan RI di bawah pimpinan Soekarno Hatta.

Usaha ini ternyata tidak mengecewakan. Dalam sidang Parlemen RIS (Republik Indonesia Serikat) 3 April 1950, Natsir melontarkan mosi yang memungkinkan RI bersatu kembali, setelah terpecah belah menjadi 17 negara bagian. Mosi ini sangat populer dan dikenal dengan nama "*Mosi Integral Natsir*". Atas jasanya ini, Bung Karno mengangkat Natsir sebagai Perdana Menteri. Dengan demikian, Natsir merupakan Perdana Menteri Pertama RI. Ini adalah jenjang karir politik Natsir tertinggi sepanjang hidupnya. Meski bukan akhir pengabdianya pada bangsa dan negara. Pada saat itu usianya 42 tahun.

Dan ketika ia memerintah, ia harus menghadapi banyak persoalan yang harus diselesaikannya. Antara lain masalah persenjataan yang ada di tangan para sukarelawan dari berbagai ideologi paska perjuangan fisik. Mereka adalah Darul Islam, PKI, gerombolan MMC (Merapi Merbabu Kompleks), Laskar Harimau Liar. Juga masalah otonomi Aceh dan PNI yang tidak bersahabat. PNI tampaknya sakit hati lantaran tidak dimasukkan dalam Kabinet Natsir. Belum lagi persoalan pribadi Soekarno tentang masalah Irian. Soekarno maunya mengambil paksa Irian, tapi Natsir yang konsisten terikat perjanjian KMB. Soekarno tampaknya merajuk seolah harga dirinya dilecehkan. Dan hal-hal lainnya.

Karena perbedaan pendapat dalam melaksanakan kebijaksanaan negara inilah, Bung Karno tak memberi kesempatan pada Natsir untuk membuktikan kepemimpinannya. Agaknya kondisi waktu itu tidak memungkinkan untuk kita mengenal hidup bernegara secara demokratis. Dan setelah dikepung secara psikologis oleh PNI, PKI dan Bung Karno, Kabinet Natsir pun jatuh dalam usia 7 bulan.

Persilangan pendapat antara Natsir dan Bung Karno memang telah lama, berawal dari kebiasaan Bung Karno yang suka mengejek Islam. Natsir yang pernah belajar agama pada Tuan Hasan, Agus Salim dan Ahmad Soekarti, rupanya sangat tersinggung atas tulisan Bung Karno yang melecehkan. Natsir menanggapiya melalui tulisan, tidak hanya dalam bahasa Indonesia melainkan pula dalam bahasa Belanda, untuk menunjukkan bahwa Natsir seorang intelektual. Bung Karno mengenal Islam melalui Muhammadiyah di Bengkulu dan mengenal tulisan Natsir dengan nama anonim A. Muhlis ketika ditahan di Ende.

Dalam perjalanan selanjutnya, Natsir dan Bung Karno makin

sering bersilang pendapat. Sementara Bung Karno semakin perkasa di puncak kekuasaan dan akrab dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), Natsir menjaga jarak dengan Soekarno dan kian menyisih sambil tetap memimpin fraksi Masyumi di Parlemen 1950-1958. Di samping menjadi anggota Konstituante 1956-1958. Perselisihan memuncak ketika Bung Karno secara sepihak menguburkan semua partai di bawah timbunan Demokrasi Terpimpin. Natsir mencium gelagat semua orang dan organisasi ingin dikendalikan Soekarno. Natsir berang. Suhu politik memanass. PKI kian berjaya.

Di bawah rongrongan PKI, Natsir dan keluarga menyingkir ke Sungai Dareh, Padang bergabung bersama para serdadu yang membelot. Dari pedalaman Sumatera Barat sana, Natsir dan Sjafrudin Prawiranegara ingin menekan Soekarno agar kembali ke konstitusional. Demokrasi harus dipulihkan. Negara dan bangsa harus diselamatkan. Tapi Soekarno salah tampi.

Pada 17 Agustus 1959, Bung Karno secara sepihak membubarkan Masyumi dan memaklumkan pengampunan pada Natsir dan kawan-kawan. Natsir terkecoh. Tiba di Jakarta, Natsir dan Sjafruddin serta kawan-kawan lainnya ditangkap atas tuduhan terlibat Pemberontakan Rakyat Republik Indonesia (PRRI) Permesta.

Natsir diasingkan dengan menjalani "karantina politik" di Batu Malang, Jatim, 1960-1962 dan menjadi "tahanan politik" di Rumah Tahanan Militer (RTM) Keagungan Jakarta, 1962-1966. Hingga akhirnya, pada Juli 1966 Natsir dibebaskan tanpa melalui proses pengadilan. Sementara di luar, keadaan telah berubah, kemudi kekuasaan politik telah berganti. Orde Lama dan Soekarno tumbang. Orde Baru lahir dan Soeharto muncul memimpin.

Harapan Natsir menghidupkan kembali Masyumi tidak terwujud. Natsir kemudian memasuki lahan baru dengan mengembangkan diri di medan Dakwah. Dan pada 1967, Natsir bersama Ulama dan Zuama mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Jakarta. Ia ternyata tetap tanggap terhadap persoalan negara. Bersama Jenderal Nasution yang pernah menangkapnya dan rekannya yang lain, Natsir ikut serta menandatangani apa yang kini dikenal sebagai Petisi 50, pada 5 Mei 1980.

Dan sejak itulah, ia memang tak diijinkan pergi ke luar negeri. Meskipun hal itu teramat penting bagi dirinya dan umat Islam di tanah air. Barangkali ada yang khawatir Natsir akan nyasar nantinya, maka ia disimpan di rumah hingga akhir hayatnya. Kendati demikian, ia teramat penting untuk tetap diam. Melalui Natsir kita

dapat memulihkan hubungan diplomatik dengan Malaysia, memperoleh investasi dari Kuwait dan meminta bantuan ekonomi dari Jepang.

Dalam keterbatasan ruang geraknya, tak menghalangi Natsir berbuat amal. Tidak hanya ratusan mubaligh dan dai yang tersebar luas di pelosok tanah air, melainkan perhatian Natsir terhadap generasi muda yang cukup besar, khususnya Mahasiswa. Karena menurut beliau, generasi muda merupakan sumber daya manusia yang potensial. Ini dibuktikannya dengan pembangunan masjid di kampus-kampus di universitas terkemuka di tanah air.

Perjuangan yang panjang dan keterampilan wawasan politiknya mengantarkan Pak Natsir tidak hanya milik Indonesia, melainkan juga telah menjadi milik dunia, khususnya dunia Islam. Ia sangat dicintai oleh pemimpin dunia, terutama negara-negara mayoritas Muslim karena keterampilan dan kejujurannya dalam dunia diplomasi internasional.

Buktinya, pada 1957 misalnya, Natsir memimpin sidang Muktamar Alam Islami di Damaskus bersama Sjekh Maulana Abul A'la Maududi (Lahore) dan Abul Hasan An Nadawi (Lucknow). Dan sejak 1967, Natsir menjabat Wakil Presiden Muktamar Alam Islami yang bermarkas di Karachi, Pakistan dan Anggota Liga Muslim Dunia bermarkas di Makkah, Saudi Arabia. Lalu, sejak 1972, ia menjabat sebagai anggota Majlis A'la al-Alamy lil Masajid, Makkah, Saudi Arabia. Tidak mengherankan bila banyak penghargaan yang diperoleh sepanjang hayatnya. Satu diantaranya adalah "Faisal Award" dari King Faisal, Saudi Arabia, suatu penghargaan atas pengabdian Natsir pada Islam.

Mohammad Natsir memang telah tiada, namun ia telah mewariskan ide dan gagasan pemikiran yang mahal dan langka. Semuanya telah tertuang dalam beberapa artikel yang junlahnya tak terhitung. Untuk buku saja tak kurang dari 20 judul. Ini membuktikan bahwa ia tidak hanya lihai bermain kata yang tertuang dalam berbagai bentuk tulisan, melainkan pula gesit dalam memainkan perannya sebagai aktor yang konsisten. Islam jelas berpengaruh besar alam fikiran dan perjuangannya. Tujuan perjuangan Natsir adalah berlakunya syariat Ilahi untuk pribadi dan masyarakat yang tak bisa ditawar. Adapun negara hanyalah alat untuk terwujudnya suasana masyarakat tersebut. Dengan demikian negara hanyalah alat. Jadi tak jadi soal apa pun namanya. Gagalkah Natsir dalam perjuangannya? Sebuah pertanyaan yang menggoda.

Terlepas dari itu, Natsir dan kawan-kawanya bersama Masyumi

telah menanamkan sendi demokrasi dalam pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerinduan kita pada Natsir dan pemimpin Masyumi adalah kerinduan pada pemimpin yang patut diteladani, berfikir jernih dan bertindak lurus. Kini kita sedang kesulitan mencari pemimpin yang layak menjadi cermin hidup kita. Masyumi adalah simbol perjuangan, oleh sebab itu, menghidupkan kembali Masyumi dalam bentuk apa pun namanya, bukan jalan keluar yang jitu.

Mohammad Natsir mengibaratkan dirinya bagai seekor ikan yang dipesankan kepada setiap generasi. Sebagaimana seekor ikan di laut, ia tidak pernah terpengaruh oleh rasa asin ke tubuhnya. Ketidak-pengaruhian ini patut dimiliki oleh umat yang berwujud dalam suatu kepribadian yang kukuh di tengah dinamika kehidupan yang berubah dengan cepat.

Mohammad Natsir memang layak menjadi perhatian. Bukan saja lantaran ia pejuang yang konsisten dalam memegang prinsip perjuangannya. Namun juga karena ia Bapak yang jujur dan terbuka. Keterbukaan, kata almarhum, adalah ibarat mutiara. Apabila tak ada keterbukaan, maka tak ubahnya menguburkan mutiara itu. Pada akhir hayatnya, ia menyadari hilangnya mutiara itu sekarang ini. Maka ide dan gagasan putra kelahiran Alahan Panjang, Kabupaten, Solok, Sumatera Barat, 17 Juli 1908, dengan gelar Datuk Sinaro Panjang, ini memang layak direnungkan. Apalagi beliau adalah salah seorang aktor terkemuka dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Alangkah repotnya memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia tanpa mengenal Natsir. Dan adalah perbuatan sia-sia mengabaikan peran Natsir apalagi menutupi dengan sengaja maupun tersembunyi. Karena seperti kata orang bijak, kalau ingin mengenal sejarah, maka kenalilah ide dan gagasan pelakunya.

Buku ini tidak hanya semata-mata mengungkap perjuangan melainkan pula pemikiran Mohammad Natsir, maka dengan demikian kita bisa lebih arif dalam memahami Mohammad Natsir. Dan tidak hanyut dalam romantika perjuangan masa lalu yang telah usai.

Terima kasih pada Yossy, Fatchiya, dan Primasari Hadi Urawanti serta teman-teman YISC Al-Azhar atas dukungannya sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Abibullah Djaini
Penyunting

Pendahuluan

oleh: Dr. Yusril Ihza Mahendra

MOHAMMAD Natsir adalah pribadi penuh pesona. Tokoh yang lahir di Minangkabau, 1908, dan wafat di Jakarta, 1993 ini adalah ibarat mata air yang tak pernah kering meskipun kemarau datang berkepanjangan. Sejak ia muda, bersekolah di Bandung dan terlibat dalam berbagai polemik intelektual di bidang keagamaan dan politik, ia selalu menjadi fokus perhatian orang.

Kiprah Natsir sebagai seorang tokoh intelektual, politikus, pemimpin negara maupun tokoh dunia Islam yang terkemuka di abad ini tak pernah selesai menjadi buah pembicaraan. Padahal dari segi asal usul dan fisiknya, Natsir hanyalah orang biasa, dengan temperamen yang lemah lembut, bicara penuh sopan santun, dan kadang-kadang gemar bercanda dengan siapa saja yang menjadi teman bicaranya.

Namun dibalik temperamennya yang lemah lembut dan mudah tersenyum itu, sosok pribadi Natsir adalah ibarat batu karang yang kokoh. Ia termasuk seorang yang teguh memegang prinsip, walau dalam berhubungan dengan orang-orang lain, ia terkesan terbuka dan malahan cenderung kompromistik, sejauh kemungkinan kompromi-kompromi itu memang dapat dicapai tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang diyakininya.

Di masa muda, bukan sekali dua Natsir terlibat polemik dengan para ulama mengenai masalah-masalah keagamaan. Tapi perbedaan pendapat itu tidaklah mengurangi rasa hormatnya kepada para ulama, apalagi ulama dari kalangan yang lebih tua usianya.

Di masa muda itu pula, ia terlibat dalam serangkaian polemik dengan Soekarno mengenai hubungan agama dengan negara pada tahun 1940. Perbedaan kedua tokoh itu nampak tajam sekali, karena yang satu menganggap agama harus "dipisahkan" dari negara, sedang yang lain menganggap hal itu tak mungkin. Tetapi polemik itu tidak

mengurangi kehangatan hubungan kedua tokoh tadi.

Di masa awal kemerdekaan Soekarno menjadi Presiden dan Natsir menjadi Menteri Penerangan. Bahkan kemudian, tahun 1950-1951, Soekarno tetap menjadi Presiden dan Natsir menjadi Perdana Menteri. Keduanya dapat bekerja sama dengan harmonis, walau kemudian muncul lagi perbedaan pendapat antara kedua tokoh itu.

Hubungan Natsir dengan Soekarno mulai merenggang ketika tokoh yang terakhir ini mulai mendekat dengan golongan kiri, yakni golongan Komunis. Pendirian Natsir mengenai komunis agaknya sama dengan pendirian Mohammad Hatta. Ia melihat Komunisme sebagai bahaya dan ancaman terhadap negara dan bangsa secara keseluruhan.

Sebagai salah seorang perumus ideologi politik Islam berhaluan modernis, Natsir memang mempunyai alasan-alasan doktriner dan ideologis untuk menolak kehadiran kaum Komunis. Tetapi Soekarno melihatnya dari sisi lain. Baginya, kaum Komunis di Indonesia adalah kekuatan radikal dan revolusioner yang dapat menjadi salah satu unsur kekuatan dinamika bangsa. Soekarno sepertinya yakin bahwa kaum Komunis di Indonesia bercorak "nasionalis" yang berbeda dengan kaum Komunis di negara-negara lain.

Perbedaan lain antara Soekarno dengan Natsir ialah pandangannya mengenai demokrasi dan konstitusionalisme. Perbedaan pandangan kedua tokoh mengenai masalah ini muncul pada akhir tahun 1956, ketika Soekarno mulai mengecam pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang dinilainya bersifat "liberal" dan tidak sesuai dengan "jiwa dan kepribadian bangsa".

Di akhir tahun 1956 itu, Soekarno mulai melancarkan gagasannya untuk "menguburkan partai-partai" dan membangun demokrasi baru di tanah air, yang dinamakannya dengan istilah "Demokrasi Terpimpin". Natsir menentang keras gagasan-gagasan ini. Demokrasi Terpimpin seperti dikemukakan Soekarno, baginya, tidak lain adalah diktatorisme. Selama ada demokrasi, kata Natsir, selama itu pula partai-partai akan tetap ada. Jika partai-partai dikuburkan, tambahnya, maka yang akan tegak di atas kuburan itu ialah sebatang pohon, yakni pohon diktator.

Natsir memang berusaha agar dalam penyelenggaraan negara, semua pihak tunduk kepada konstitusi, meskipun konstitusi itu masih bersifat sementara. Dalam hal yang satu ini, ia pun berbeda pandangan dengan Soekarno, khususnya menjelang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1957.

Dengan "Konsepsi Presiden" yang diumumkan pada tanggal 21

Februari 1957, Soekarno mulai merealisasikan gagasannya untuk “membenahi” sistem ketatanegaraan, yang ketika itu tunduk di bawah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pembenahan itu, antara lain dengan menciptakan sebuah dewan, yang semula ingin dinamakan “Dewan Revolusioner”, tetapi kemudian diganti dengan sebutan “Dewan Nasional.”

Natsir menentang keras gagasan di atas, karena hal itu dianggapnya bertentangan dengan konstitusi. Ketika Soekarno menunjuk dirinya sendiri menjadi formatur kabinet - yang ternyata dipimpin oleh Djuanda — perbedaan pendapat antara Natsir dengan Soekarno semakin tajam. Natsir melihat prosedur demikian inkonstitusional. Tetapi Soekarno, pada masa itu menjawab: konstitusi dibuat untuk manusia, bukan manusia dibuat untuk konstitusi.

Kalau demikian, nampaknya sukarlah untuk mempertemukan pandangan kedua tokoh ini. Ini merupakan salah satu faktor penting — di samping faktor-faktor lain yang tidak dikemukakan di sini — yang kiranya dapat menjelaskan mengapa Natsir kemudian bergabung dengan tokoh-tokoh militer di Sumatera, dan membentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) sebagai pemerintah tandingan terhadap pemerintah pusat yang ada di Jakarta. Bangsa Indonesia di masa itu (1958) seperti berada di ambang perang saudara.

Apa yang dikemukakan di atas, bukanlah bermaksud untuk membuka luka-luka masa lalu, yang sebenarnya memang pernah ada dan terjadi dalam sejarah. Tetapi sekadar ingin menunjukkan bahwa tokoh yang lemah lembut seperti Natsir, kadang-kadang berpendirian demikian kokoh dan berani mengambil risiko membentuk pemerintahan tandingan dengan segala akibat-akibatnya.

Keteguhan seseorang memegang pendirian, memang tidak selalu harus ditunjukkan dengan temperamen yang terlihat “garang dan selalu bersuara lantang dengan kecaman-kecaman keras, bahkan cenderung kasar, dalam tulisan dan pidato-pidato politik. Sejarah telah mengajarkan kepada kita, bahwa tidak jarang tokoh-tokoh “garis keras” yang sering bersuara lantang itu, kemudian berbalik menjadi semacam “penjilat” terhadap kekuasaan yang sedang berada di atas angin, karena berbagai alasan dan pertimbangan.

Dalam kasus perbedaan pendapat, Natsir memberikan keteladanan yang penting kepada generasi sekarang. Ia seringkali berbeda pendapat dengan tokoh lain, bahkan perbedaannya itu demikian tajam karena menyangkut dimensi-dimensi ideologis dan keyakinan.

Tetapi dalam berpolemik, ia tetap menggunakan kata-kata yang sopan dan sepantasnya, tanpa bermaksud menimbulkan ketersinggungan secara pribadi. Perbedaan pendapatnya dengan tokoh-tokoh lain tidaklah dengan serta-merta menimbulkan permusuhan dengan mereka. Kemesraan dan kehangatan hubungan antar pribadi tetaplah harus dipelihara, meskipun orang berbeda pendirian dan pandangan.

Seorang demokrat sejati, kata Natsir suatu ketika, harus menghormati pendirian dan pendapat orang lain, betapa pun ia tidak setuju bahkan menentanginya. Karena itu tidak mengherankan jika di gedung DPR pada tahun 1950-an, Natsir sering terlihat duduk di kantin, mengobrol sambil minum kopi dan tertawa bersama D.N. Aidit, tokoh PKI. Padahal semua orang tahu, pendirian dan pandangan kedua tokoh itu ibarat bumi dengan langit, satu dengan yang lain hampir-hampir tidak ada titik-temunya.

Dalam temperamennya yang lemah lembut namun teguh memegang prinsip itu, Natsir selalu mengajarkan kepada generasi yang lebih muda, bahwa hidup itu adalah sebuah perjuangan yang teramat panjang. Tugas sebuah generasi kadang-kadang belum selesai, karena pendeknya usia manusia. Namun masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia kadang-kadang demikian panjangnya, hingga tak tertangani dan terselesaikan oleh sebuah generasi.

Seorang demokrat sejati, kata Natsir suatu ketika, haruslah senantiasa sadar untuk mempersiapkan pengganti-penggantinya, yakni generasi penerus yang akan meneruskan estafeta perjuangan. Namun kemunculan pemimpin, menurutnya, tidak dapat dikondisikan apalagi dikontrol dan didongkrak. Pemimpin, menurut Natsir, harus lahir dari bawah. Ia lahir karena masyarakat dan kelompoknya menganggap orang itu layak dan pantas menjadi pemimpin. Bukan karena "si calon pemimpin" tadi kasak-kusuk ke sana ke mari mengadakan "pendekatan-pendekatan" kepada berbagai pihak supaya ia diangkat menjadi pimpinan.

Karena pandangannya seperti di atas, kepemimpinan yang dipegang oleh seseorang, bagi Natsir tidak lain adalah amanat dari orang banyak. Sebagai amanat tentulah merupakan kewajiban untuk menunaikannya. Kalau kepemimpinan dilihat sebagai amanat, implikasi selanjutnya adalah, si pemimpin tadi wajib memegang teguh etika kepemimpinan, yang tentu saja sifatnya universal.

Prinsip kejujuran, tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia harus dipegang teguh. Pemimpin tak perlu

malu-malu mengakui kelemahan dan kekurangannya, dan harus senantiasa bersedia menerima kritik dan masukan dari orang lain.

Dalam perjuangan politik, kata Natsir, orang harus pandai-pandai menimbang-nimbang sesuatu. Selain ada prinsip yang harus dipegang teguh, terdapat pula ruang untuk berkompromi atas dasar saling memberi dan menerima. Keanekaragaman dalam masyarakat, katanya, adalah *Sunnatullah* yang tidak dapat dihapuskan. Keanekaragaman dan kemajemukan itu, baik di segi etnik, agama maupun aliran politik, tidaklah menjadi halangan untuk membangun kerjasama yang harmonis atas dasar kepentingan bersama. Masyarakat yang majemuk, menurut Natsir, memerlukan adanya *kalimatun sawa*, yakni titik temu bersama yang dapat dijadikan dasar kesepakatan dalam penyelenggaraan kehidupan bersama di antara kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang berbeda-beda.

Bagi Natsir, politik nampaknya adalah sebuah seni yang memerlukan kehalusan dan "keindahan" tersendiri. Dalam memperjuangkan sesuatu, katanya suatu ketika di tahun 1950, "kita harus mencapai sasaran tanpa lawan-lawan merasa terkalahkan". Natsir mencoba menerapkan pandangannya ini ketika ia berusaha keras untuk menggoalkan "mosi integral" yang diracangnya di DPR, sebagai upaya yang dianggapnya paling baik untuk membubarkan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usaha Natsir untuk menengahi kelompok "Republiken" dengan kelompok "Federalis" pada waktu itu memang berhasil dengan gemilang. Mosi yang diracangnya mendapat dukungan dari kelompok paling kanan hingga kelompok paling kiri, dengan kesediaan Ir. Sakirman — seorang tokoh PKI — untuk turut serta menandatangani mosi.

Mosi integral akhirnya diterima secara utuh oleh DPR, dan atas dasar itulah Perdana Menteri Hatta mengadakan perundingan antara Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT) untuk secara bersama-sama melebur diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan akhirnya terbentuk lagi secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1950, tanpa ada pihak-pihak yang merasa "terkalahkan".

Untuk mampu melaksanakan pandangan Natsir di bidang strategi di atas itu, tentu para politikus harus memiliki kemampuan kecanggihan berfikir, kedewasaan berpolitik dan ketepatan membaca situasi medan. Faktor kemampuan melakukan lobi dan diplomasi untuk

meyakinkan pihak-pihak lain juga dibutuhkan. Tentu semuanya harus didasarkan kepada i'tikad baik dan kejujuran demi kemaslahatan bersama, bukan demi kepentingan golongan sendiri dan mempecundangi pihak lain dengan cara terselubung. Natsir sendiri memang menganut keyakinan bahwa politik haruslah ditundukkan kepada etika yang tinggi. Dengan cara itu, keinginan untuk berkuasa sendiri dan "menghabisi" orang-orang yang tak sepaham dengan menghalalkan segala cara harus dihindari jauh-jauh.

Suatu hal yang kiranya patut menjadi teladan dari kehidupan Natsir, adalah pribadinya yang sederhana dan jauh dari kecintaan terhadap harta benda. Kesederhanaan hidup memang telah dijalannya semenjak kecil ketika ia masih tinggal di Tanah Minang. Kesederhanaan itu terus berlanjut hingga akhir hayatnya.

Ketika ia menjadi Menteri Penerangan, ia pergi ke kantor dengan menaiki sepeda dan memakai baju dengan tambalan karena tuanya umur baju itu hingga sobek disebabkan benangnya yang telah rapuh. Para staf Departemen Penerangan di masa itu terpaksa harus "berfikir" bagaimana dapat membelikan sehelai kemeja yang kiranya pantas dipakai oleh sang menteri, karena seringnya ia tampil di depan tamu asing dan para wartawan untuk memberikan keterangan Pemerintah.

Selama terlibat dalam dunia politik, Natsir memang tak pernah terpikir untuk "memperkaya diri", apalagi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang memang ada di tangannya. Ketika ia menjadi Perdana Menteri, Natsir memang mendapat sebuah mobil dinas dan seorang sopir. Tapi seketika kabinetnya jatuh dan ia memulangkan mandat kepada Presiden, maka mobil dinasnya itu disimpan kembali di kantor Perdana Menteri di Pejambon (sekarang Gedung Pancasila, yang terletak di kompleks Departemen Luar Negeri).

Maka sang mantan Perdana Menteri itupun pulang ke rumah dengan cara mengayuh sepeda. Agak lucu kedengarannya cerita tentang Natsir ini bagi generasi sekarang. Tapi itulah kenyataannya. Maklumlah generasi masa kini sering menyangka — atau memang demikianlah kecenderungannya — kalau jabatan politik dan kenegaraan itu identik dengan kemudahan untuk mengumpulkan harta benda, bukan saja buat diri sendiri, bahkan juga buat anak-cucu.

Di masa tua, Natsir tetap menempati rumah yang nampak sederhana dengan perabotan ala kadarnya, walaupun lokasi rumah itu terletak di kawasan elit di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Tak menyangka kalau itu rumah seorang mantan Perdana Menteri, dan

bahkan salah seorang pemimpin dunia Islam yang amat disegani. Konon, pernah Raja Feisal dari Arab Saudi berniat untuk memberinya sebuah mobil mewah yang “pantas” digunakan oleh Natsir. Tetapi tokoh ini hanya mengucapkan terima kasih, dan berkata, bantulah umat Islam yang serba kekurangan. Tak perlu raja kaya minyak dari Saudi Arabia itu repot-repot memikirkan mobil apa yang pantas dipakai buat dirinya pribadi.

Cukup lama Natsir menggunakan sebuah mobil sedan tua pergi ke mana-mana. Hanya karena mobil itu sering mogok saja — yang ia sendiri sering pergi ke toko onderdil untuk memperbaikinya — maka ia mendapatkan mobil sedan bermerek Mitsubishi yang tergolong sederhana pula. Pakaianya pun sangat sederhana. Seringkali Natsir terlihat memakai kemeja putih, yang dikantongnya ada bekas tumpahan tinta. Ia sama sekali tidak merasa terganggu dengan penampilannya yang sederhana dan bersahaja itu. Namun dari kesederhanaan penampilan dan senyuman yang terpancar di wajahnya, ia sebenarnya seorang yang penuh wibawa dan pesona. Dari sudut inilah seharusnya kita menilai seseorang, bukan karena penampilan fisik dan kekayaan yang dimilikinya.

Tentang Buku Ini

Buku yang kini berada di hadapan Anda ini, adalah himpunan makalah tentang pemikiran dan perjuangan Natsir sebagai hasil tinjauan dan analisis beberapa tokoh intelektual Muslim Indonesia. Makalah-makalah itu ditulis dan disampaikan dalam acara Seminar Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir yang diselenggarakan oleh Youth Islamic Study Club (YISC) Al-Azhar, pada bulan Juli 1994 di Jakarta.

Inisiatif mengadakan acara ini datang dari anak-anak muda yang memang pernah mendengar nama Natsir, tetapi menyadari bahwa mereka belum mengenal lebih banyak tentang pemikiran dan perjuangan tokoh itu selama hayatnya. Satu-dua di antara mereka pernah bertemu-muka dengan Natsir dan berbincang-bincang tentang banyak hal mengenai masalah-masalah Islam, kemasyarakatan, politik dan dunia Islam. Tetapi sebagian lagi, hanya mendengar namanya atau membaca media massa dan buku-buku mengenai dirinya.

Sejak Natsir wafat pada tahun 1993, memang telah ada sejumlah seminar yang membahas pemikiran-pemikiran dan perjuangannya. Selain seminar yang diselenggarakan oleh YISC Al-Azhar, kegiatan serupa pernah pula diadakan oleh, antara lain, Angkatan Belia Islam

Malaysia bekerjasama dengan Universitas Islam Antarbangsa di Kuala Lumpur. Pihak Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang pernah pula menyelenggarakan kegiatan serupa, dengan menghadirkan sejumlah pakar studi Islam, sejarah dan politik dari universitas itu.

Di dalam negeri, kegiatan seperti itu pernah juga diselenggarakan oleh Jama'ah Salahuddin di Yogyakarta dan juga oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara di Medan. Di Padang, seminar serupa pernah pula diselenggarakan, dan ini ada kaitannya dengan rencana untuk mendirikan sebuah universitas yang akan dinamakan Universitas Mohammad Natsir.

Dalam seminar yang diselenggarakan oleh YISC Al-Azhar itu, telah tampil sejumlah pakar, yaitu Dr. Ir. A.M. Saefuddin, Prof. Dr. Ichlasul Amal, Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, Dr. Taufik Abdullah, Dr. M. Imaduddin Abdulrahim, Dr. Mochtar Naim, Dr. Nurcholish Madjid dan Dr. Yusril Ihza Mahendra. Sedangkan Menteri Agama dr. Tarmizi Taher menyampaikan "keynote speech" dan Dr. Anwar Harjono memberikan kata sambutan mewakili "Keluarga Besar Bulan Bintang". Kesepuluh pembicara dalam seminar ini menyoroti pemikiran dan perjuangan Natsir dari sudut pandang keahliannya masing-masing. Tentu disela-sela makalah itu terdapat pula ungkapan-ungkapan yang bersifat pengalaman pribadi mereka dengan tokoh yang mereka soroti. Hal ini tentulah tidak mengaburkan makna "obyektifitas" yakni suatu hal yang sebenarnya agak sulit untuk dicapai dalam analisis ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan.

Walaupun pembahasan yang dikemukakan oleh para pembicara dalam seminar ini terlihat menarik untuk mengungkapkan berbagai sisi dari pemikiran dan perjuangan Natsir, tentu saja belum semua hal tercakup ke dalamnya. Seperti dikatakan di awal kata pendahuluan ini, sosok Natsir adalah ibarat mata air yang tak pernah kering, yang senantiasa menggugah keinginan mereka yang dahaga akan pengetahuan untuk terus-menerus menelaah dan memahaminya.

Mengingat makalah-makalah yang ditulis pada umumnya singkat saja, tentu masih banyak hal yang terlewatkan. Kelemahan ini, barangkali teratasi juga dengan munculnya beberapa kandidat master dan doktor — baik di dalam maupun di luar negeri — yang dalam tahun-tahun terakhir ini berminat untuk menulis tesis dan disertasi mengenai pemikiran Natsir dalam berbagai aspeknya. Jika nanti karya-karya akademis itu dipublikasi secara luas, tentu ia akan lebih memperluas dan memperdalam tentang berbagai sisi dari kehidupan, pemikiran dan perjuangan Natsir.

Sebagai kompilasi makalah-makalah yang disampaikan dalam sebuah seminar, tentu membaca buku ini memerlukan sedikit kesabaran. Berbeda dengan sebuah buku dalam maknanya yang lazim, yang ditulis secara sistematis dan terfokus kepada satu masalah, kompilasi makalah ini menghimpun berbagai permasalahan dengan titik tolak pembahasan dan pendekatan yang berbeda-beda. Dalam pembahasan itu, tak jarang terjadi pengulangan dan tumpang tindih antara satu penulis dengan penulis yang lain. Namun adanya tumpang-tindih itu tak perlu merisaukan, jika ia dilihat secara komplementer. Artinya, pengulangan yang dikemukakan oleh seorang penulis haruslah dianggap melengkapi apa yang telah dikemukakan oleh penulis yang lain.

Melihat nama kedelapan tokoh penulis makalah dalam seminar ini, mungkin timbul kesangsian terhadap "obyektivitas" tulisan mereka dalam menganalisis pemikiran dan perjuangan Natsir. Kesangsian itu berawal dari kecenderungan aliran keagamaan yang dianut oleh para penulis, yang keseluruhannya dapat dikategorikan sebagai beraliran "modernis". Ini barangkali memang merupakan salah satu "kelemahan" dari seminar tentang Natsir ini, karena seluruh pembicaraanya berasal dari "kubu" aliran pemikiran yang sama.

Adanya dugaan demikian tak seluruhnya dapat disalahkan, dan kiranya bukan tidak dipikirkan oleh panitia pengarah seminar ini. Namun, karena kesulitan untuk mendapatkan kesediaan dari tokoh-tokoh dari aliran pemikiran yang lain, katakanlah misalnya dari aliran "tradisionalis", atau bahkan "revivalis" dan "fundamentalis", untuk menjadi pembicara dalam seminar itu, maka tokoh-tokoh yang ada dan bersedia ini sajalah yang dapat ditampilkan.

Namun jika disimak secara hati-hati tulisan dari para pemakalah dan juga tanggapan dari peserta seminar yang juga disertakan di dalam buku ini, kekhawatiran mengenai "obyektivitas" itu agaknya dapat dihindarkan. Tokoh-tokoh seperti Dr. Taufik Abdullah, Dr. Nurcholish Madjid dan Dr. Ichlasul Amal misalnya, dikenal luas oleh masyarakat akademis kita sebagai ilmuwan yang mempunyai integritas yang tinggi. Mungkin saja secara diam-diam mereka adalah "pengagum" atau sekurang-kurangnya "bersimpati" kepada Natsir. Tetapi hal itu tidaklah mendorong mereka untuk meninggalkan obyektivitas dalam analisis mereka. Apa yang dikemukakan dalam makalah-makalah yang mereka tulis, nampaknya tidaklah sekadar memuji-muji Natsir, tetapi juga memberikan analisa yang kritis terhadap berbagai aspek

dalam pemikiran dan perjuangan Natsir.

Memang, seperti telah dikatakan di awal tulisan ini, Natsir sendiri hanyalah seorang manusia sederhana dan bersahaja. Sepanjang hayatnya, ia tidak pernah mengharapakan pujian dan sanjungan. Orang-orang yang berada di sekitarnya memang menunjukkan sikap hormat yang tinggi kepadanya. Namun semuanya berada dalam batas-batas kewajaran dalam hubungan sesama manusia. Tak ada keinginan untuk mengkuilkan Natsir, yang memang ia sendiri tak pernah menginginkannya.

Seperti telah dikatakan di atas tadi, sebagai seorang demokrat sejati, Natsir senantiasa membuka diri terhadap kritik. Ketika masih menjabat sebagai Ketua Umum Masyumi, bukan sekali dua Natsir didebat habis-habisan oleh rekan-rekannya sendiri, bahkan dikecam secara terbuka melalui media cetak, misalnya K.H. Muhammad Isa Anshary dan Tamar Djaja. Dalam usia tua pun Natsir masih sering didebat oleh kalangan muda yang berada di sekitarnya. Tetapi ia bersikap biasa-biasa saja dengan perbedaan pendapat yang muncul itu.

Akhirnya, saya berharap, mudah-mudahan penerbitan makalah-makalah yang pernah disampaikan dalam seminar Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir ini akan membawa manfaat bagi siapa saja yang berminat untuk mengenal tokoh ini secara lebih mendalam. Kalau harapan itu tercapai, maka kepuasan batin yang senantiasa ada pada setiap penulis kiranya akan terpenuhi juga. Mudah-mudahan semua tulisan itu dapat menjadi amal shaleh bagi para penulisnya.

Jakarta, Mei 1996

Bismillahirrahmanirrahim

Rumusan Seminar

Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir

Dari presentasi beberapa pembawa makalah dan diskusi tentang Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir, 16-17 Juli 1994, yang diselenggarakan oleh Youth Islamic Study Club (YSIC) Al-Azhar Jakarta, beberapa hal dapat kita simpulkan :

1. Umum

Pertama, sulit diingkari bahwa Mohammad Natsir bukan hanya tokoh bidang keagamaan tapi juga tokoh Nasional dan Internasional.

Kedua, sebagai tokoh keagamaan, Mohammad Natsir telah menyumbangkan pemikirannya untuk membuka perspektif agama, keagamaan kaum muslimin Indonesia agar bersikap terbuka bagi ide pembahasan, terutama, yang berkaitan dengan implementasi ajaran agama dan kehidupan sosial,

Ketiga, sebagai tokoh nasional, Mohammad Natsir adalah seorang negarawan yang banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang integralis dan demokratis.

Keempat, di panggung Internasional, Mohammad Natsir dikenal pemikirannya yang multi dimensional dan salah satunya berpengaruh dalam proses modernisasi pemikiran Islam di dunia.

2. Khusus

Beberapa hal penting yang disarankan dalam rangka memahami sejarah perjuangan kehidupan dan pemikiran Mohammad Natsir, tercatat sebagai berikut:

1. Mohammad Natsir, tokoh nasional berbasis organisasi dan pemikiran Islam. Gagasan dan ide-idenya mengenai berbagai bidang kehidupan mencerminkan sikap dasar yang tidak memisahkan kehidupan beragama dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara dikotomis.
2. Sebagai tokoh sejarah, pemikirannya haruslah dilihat dalam kerangka rentang sejarah dan situasi saat itu. Dengan demikian sikap yang harus diambil bersifat kritis analitis dan mengabaikan kontekstualisasinya.
3. Kita tidak perlu mengkultuskan Mohammad Natsir dalam predikat apapun yang mungkin layak disandang. Sehingga, kita dapat lebih proporsional mereproduksi atau mereaktualisasi kembali segala gagasan ide-ide beliau bagi perkembangan kehidupan bermasyarakat dan pembangunan bangsa dan negara secara keseluruhan.

Rekomendasi :

1. Dalam kaitan memelihara basis pemikiran ide dan gagasan Mohammad Natsir, perlu didirikan suatu institusi yang mewakili usaha tersebut dan mencerminkan secara kental semangat beliau.
2. Mempertimbangkan saran pendirian Universitas Islam Internasional "Mohammad Natsir", berlokasi di Jakarta dalam upaya membangun sumberdaya manusia yang berkualitas Khoirul Ummah, berwawasan luas menjangkau segala aspek kehidupan dan pembangunan.
3. Kepada institusi-institusi keislaman dihimbau agar menerbitkan buku pendidikan dan perjuangan Mohammad Natsir untuk menjalin komunikasi umat dan bangsa, khususnya bagi generasi muda agar melanjutkan dan mewujudkan cita-cita mulia pada masa yang akan datang.
4. Mengusulkan pada Pemerintah agar Mohammad Natsir diberi penghargaan sesuai pemikiran dan perjuangannya sebagai tanda terima

kasih atas pemikiran dan perjuangan selama hayatnya pada bangsa dan negara.

Akhirnya satu petikan ayat yang selalu diingat, *".... Jangan kamu kira bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka tetap hidup akan tetapi kamu tidak mengetahuinya..."*

Jakarta, 17 Juli 1994

**Keynote Speech Menteri Agama R.I
PADA SEMINAR PEMIKIRAN
DAN PERJUANGAN M. NATSIR
Tanggal 16-17 Juli 1994 di YISC, Jakarta**

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada acara "Seminar Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir" pada hari ini.

Kemudian, saya mengucapkan selamat kepada panitia yang telah mengambil prakarsa melaksanakan acara yang penting ini. Menurut saya, sepantasnyalah seminar ini dilaksanakan mengingat jasa-jasa, perjuangan dan sumbangan besar M. Natsir kepada kehidupan negara, bangsa dan kaum muslimin Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai dan mengapresiasi jasa-jasa para pendahulunya.

M. Natsir adalah di antara sedikit manusia Indonesia yang multi dimensional dan begitu kompleks. Ia adalah seorang pemikir dan pembaharu pemikiran dan pengamalan Islam. Ia juga adalah intelektual Muslim yang akrab dengan berbagai wacana pemikiran, baik warisan pemikiran Islam sendiri, maupun pemikiran Timur dan Barat. Ia juga adalah seorang nasionalis sejati yang terlibat langsung dalam upaya pencapaian dan pembinaan kemerdekaan bangsa.

Natsir juga adalah seorang aktivis organisasi, yang bergerak sejak dari JIB, PII, Persis, Masyumi, sampai kepada DDII. Ia adalah politisi dan demokrat sejati, yang selalu berteguh hati memperjuangkan keyakinan politiknya secara konstitusional dan demokratis. Tetapi ia juga adalah da'i dengan kepedulian pokok membela dan menyelamatkan aqidah umat dari berbagai ancaman.

Natsir juga adalah sosok atau tokoh Internasional, yang turut mengangkat harkat negara dan bangsa di mata dunia. Melihat semua aspek kepribadian dan sosok Natsir ini, untuk memahaminya secara benar dan akurat, kita harus mempertimbangkan seluruh dimensi pemikiran dan kiprahnya.

Sebagai seorang pembaharu dan intelektual muslim, Natsir mempunyai kepedulian yang tinggi untuk memperbaiki paham dan pengalaman keagamaan kaum muslim di Indonesia. Baginya, kemajuan kaum muslimin hanya bisa dicapai jika mereka memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara murni dan konsekuen. Dalam upaya pembaruan pemikiran dan pengalaman Islam ini Natsir tidak jarang terlibat dalam polemik, khususnya melalui tulisan.

Dengan cara ini, Natsir sebenarnya telah berperan sebagai perintis dalam menciptakan wacana intelektual yang sehat, terbuka dan demokratis tentang Islam. Ia tidak mengecam dan mencaci maki, tetapi sebaliknya mengajak orang lain terlibat dalam dialog intelektual yang cerdas dan dewasa tentang masalah-masalah Islam dan kaum muslimin. Di sinilah terletak keistimewaan dan kekuatan Natsir sebagai pemikir dan pembaharu Islam.

Inilah salah satu keteladanan almarhum yang patut dicontoh dan diikuti setiap Pemikir Muslim yang peduli dengan kehidupan muslimin.

Sebagai politisi, Natsir adalah seorang nasionalis sejati. Ia adalah demokrat yang menghormati dan menghargai pendapat. Sebagai seorang politisi Muslim, dalam suasana politik di masa Soekarno, bisa dipahami kalau ia turut memperjuangkan cita-cita menjadikan Islam sebagai dasar negara. Tetapi, ketika perjuangan yang dilakukannya secara konstitusional ini gagal, ia menerimanya dengan lapang dada; dan sebaliknya dengan ikhlas menerima paradigma atau platform ideologis Pancasila yang disepakati secara nasional.

Di sini Natsir nampaknya sampai kepada kesimpulan, bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dengan ideologi kebangsaan, Pancasila. Semua sila-sila yang terdapat dalam Pancasila selaras dengan ajaran Islam; dan karena itu tidak perlu dipersoalkan lagi. Ini terlihat dari kegigihan almarhum membela dan menjelaskan Pancasila kepada masyarakat Internasional dalam kesempatan berbagai kunjungannya ke mancanegara.

Di sini terlihatlah betapa kuatnya kesetiaan Natsir kepada kepentingan bangsa. Sebagaimana terbukti dalam pemikiran dan kegiatannya sepanjang hayatnya, ia tidak mau hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri dengan mengorbankan kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Semua ini kembali dibuktikannya ketika Orde Baru mulai berdiri dan siap melancarkan program pembangunan. Dalam konteks ini, peranan Natsir sangat besar, misalnya, dalam upaya menciptakan kerukunan dan stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara memulai upaya penghapusan konfrontasi dengan Malaysia.

Kita semua tahu, bahwa stabilitas regional ini pada gilirannya akan mendorong stabilitas nasional, sehingga menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan. Natsir dengan mengesampingkan perasaan dan sentimen pribadinya tampil ke depan untuk melicinkan jalan ke arah ini.

Natsir, kita tahu, memang pernah mempunyai semacam perbedaan dengan pemerintahan Orde Baru. Tetapi, lagi-lagi perbedaan itu tidak membuatnya mengambil cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Dengan konsisten ia selalu menempuh cara-cara yang sah dan demokratis. Sebagai pembawa nurani umat dan bangsa, dengan titik tolak keyakinannya, ia berfungsi sebagai "moral force", walaupun berbagai konsekuensi diterimanya.

Tetapi, beberapa tahun terakhir ini, perubahan telah terjadi. Hubungan antara umat Islam dengan pemerintah semakin baik. Dan Alhamdulillah, almarhum Natsir sempat menyaksikan semua perubahan itu sebelum beliau meninggalkan dunia yang fana ini.

Almarhum Natsir telah mencoba melakukan pendekatan politik untuk memperjuangkan Islam atau memajukan umat dan bangsa. Sejak bermulanya pemerintahan Orde Baru, Natsir dengan secara sadar melakukan pendekatan lain, yang dapat kita sebut sebagai "pendekatan kultural".

Di sini yang menjadi titik tekan perhatian dan kegiatan beliau adalah da'wah dan pendidikan. Ini diwujudkan secara kelembagaan melalui Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII). Saya kira, almarhum dengan DDII merupakan salah satu organisasi perintis yang mengkader dan mengirim para da'i sampai ke tempat-tempat terpencil sekalipun, di berbagai pelosok Nusantara untuk memperkuat aqidah dan ibadah umat muslimin.

Mempertimbangkan aktivitas da'wah ini, maka tidak berlebihan kalau saya berpendapat, bahwa almarhum dengan DDII-nya memainkan peran yang cukup penting dalam mendorong terjadinya proses yang sering kita sebut belakangan ini sebagai "santrinisasi".

Berkat proses santrinisasi ini kita melihat terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas pemahaman dan pengamalan Islam di dalam tubuh umat muslimin. Dan ini pada gilirannya jelas merupakan sumbangan yang berharga dalam usaha pembangunan bangsa, yang bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, yang sejahtera lahir dan bathin, material dan spiritual.

Intelektualisme yang tinggi, komitmen, perjuangan dan kesetiaan kuat kepada Islam, telah menghantarkan Natsir untuk mendapatkan penghargaan dan respek yang begitu mendalam dari dunia Islam. Di sini almarhum menjadi salah satu di antara sedikit tokoh muslim Indonesia yang dipercayai untuk duduk di dalam kepemimpinan organisasi-organisasi Islam Internasional, semacam Muktamar 'Alam Islami dan Rabithah 'Alam Islami.

Kita masih merindukan dan menanti kemunculan tokoh-tokoh Islam Indonesia yang mampu memainkan peran seperti ini di masa sekarang dan mendatang. Sudah sepatutnyalah Indonesia yang mempunyai penduduk muslim terbanyak di dunia Islam, menampilkan tokoh-tokoh yang mampu mengikuti jejak langkah almarhum Natsir dalam berbagai organisasi Islam Internasional.

Demikianlah, banyak sungguh ketauladanan yang patut ditiru dari almarhum M. Natsir. Kesempatan yang baik dalam seminar ini, khususnya bagi generasi muda muslim, hendaknya dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk mengembangkan diri mengikuti jejak langkah almarhum. Inilah salah satu cara yang paling tepat untuk mengenang dan sekaligus menghargai jasa-jasa beliau.

Demikianlah pembicaraan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan usaha kita semua senantiasa diberkahi Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dr. H. Tarmizi Taher
Menteri Agama R.I

Pemikiran dan Perjuangan M. Natsir

Oleh: Dr. Anwar Harjono SH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Di antara orang-orang mukmin itu ada rijal (tokoh-tokoh pejuang) yang menepati apa yang telah mereka janjikan pada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada yang (masih) menunggu dan mereka tidak mengubah janjinya. (Al-Ahzab: 23).

Saudara-saudara peserta seminar yang terhormat.

Kalau kita mengadakan Seminar dua hari yang dimulai hari ini, maka yang kita seminarkan ini adalah pemikiran dan perjuangan tokoh pejuang mu'min seperti termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 23 tersebut.

Adapun kata-kata ini, mudah-mudahan dapat termasuk dalam bagian kedua dari ayat itu, yakni *minal muntadzin* (yang menunggu).

Pak Natsir sebagai pemikir dan pejuang sudah dikenal secara luas sejak masa muda sampai akhir hayatnya.

Walaupun demikian, kalau kita berseminar bukanlah untuk mengkultuskan almarhum, melainkan untuk mengambil pelajaran dari almarhum. Bahkan mengambil hikmahnya. Karena pemikiran dan perjuangan almarhum masih perlu diperluas lagi khususnya di kalangan generasi muda.

Kalau kita telusuri arus pemikiran almarhum selama ini, maka dua hal perlu kita catat, ialah bahwa arus pemikiran almarhum itu tidak dapat terlepas dari:

1. Hubungan antara agama dan kemerdekaan berpikir.
2. Hubungan antara agama dan bangsa.

Mengenai hubungan antara agama dan kemerdekaan berpikir, dapat kita pelajari lebih jauh dari buku karangan beliau yang berjudul *Islam Dan Akal Merdeka* yang ditulisnya mula-mula dalam majalah Panji Islam Medan pada tahun 1941.

Dalam buku itu, dibawah judul, kemerdekaan berpikir, tradisi dan disiplin, almarhum antara lain menyatakan:

"Salah satu dari tiang-tiang ajaran junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang penting ialah menghargai akal manusia dan memperlingkungnya daripada tindasan-tindasan yang mungkin dilakukan orang atas nikmat Tuhan yang tak ternilai itu. Junjungan kita meletakkan akal itu sebagai salah satu alat untuk mengetahui Tuhan" (hal. 7).

Dalam Islam akal mendapat tempat termulia. Dalam Islam akal tidak ditindas melainkan dipergunakan dan diberi jalan diberi mengalir untuk kemanfa'atan kita manusia.

Apakah ini juga berarti bahwa orang Islam harus melemparkan semua macam faham-faham lama dan harus menjadikan "akal merdekanya" sebagai hakim tertinggi dalam semua hal-hal? (hal 11).

Dengan akal merdeka orang kita bisa mencela, mengkritik dan mengejek-ejek orang pergi ke meriam si-jagur, dengan alasan-alasan, tidak ma'qul tidak rasional. Mereka yang dicela pandai pula mempertahankan perbuatannya dengan akal merdekanya" (hal 13).

Selanjutnya di bawah judul "*Quo Vadis akal merdeka?*" beliau mengatakan: Maka di dalam kemabukan akal merdeka, mereka tak tahu memperbedakan manakah kotoran yang mendatangkan yang mudharat harus dibuang, dan manakah barang yang asli yang bermanfaat yang harus dipelihara. Akal merdeka tak mengenal batas, tak menggaris batas.

Dengan akal merdeka mereka melemparkan semua yang ada dalam "tradisi" kuno, sesudah itu mereka masuk kepada "*gedachte tradisi*" made ini Switzerland, zonder critische zin zonder intiqad zonder banding dan selidik, apakah semua itu sewajar dengan dasar agama Islam, selaras dengan spirit of Islam. Tidak, asal cocok dengan kemauan akal merdeka, asal setuju dengan spirit of the west.

Paradoksal? begitu tanya beliau. Dijawabnya sendiri. Boleh jadi!

Akan tetapi semua ini berlaku, semua keadaan yang nyata, semua terjadi di hadapan kita (hal 15).

Lebih jauh almarhum menyatakan:

"Akal merdeka ibarat api yang mungkin lampu yang gemerlapan memimpin kita dari gelap gulita ke terang benderang. Seringkali mungkin pula ia menyala berkobar-kobar meniar bakar rumah dan gedung, menghancurkan barang yang ada.

Maka agama datang, bukan semata-mata memerdekakan akal. Agama datang membangunkan akal, membangkitkan akal, menggemarkan orang memakai akal sebagai suatu nikmat Ilahi yang maha indah.

Agama datang mengalirkan akal menurut aluran yang lurus, jangan melantur ke sana ke mari merampok pagar dan pematang-pematang". Demikian Pak Natsir.

Kalau kita simak baik-baik pernyataan almarhum ini, mungkin ada yang bertanya: Apakah relevansinya pemikiran-pemikiran beliau itu dengan realitas yang ada dalam masyarakat kita waktu itu?

Andaikata betul ada pertanyaan seperti itu, maka saya ingin minta perhatian mereka, bagaimana apabila kata "Kemerdekaan berpikir" yang beliau pakai dalam kalimat-kalimat itu, diganti dengan "Kebebasan" atau "Keterbukaan" yang waktu itu sedang menjadi topik polemik masyarakat.

Dan kalau ditambah dengan arus globalisasi informasi sebagai manifestasi akal merdeka yang sudah sangat canggihnya, maka akan sangat jelaslah relevansinya!

Kebebasan dan keterbukaan tidak berarti tanpa batas. Sebaliknya batasan-batasan itu tidak boleh berarti tekanan-tekanan. Apalagi penindasan-penindasan. Globalisasi informasi, dalam hal ini terutama karena datang dari barat yang masyarakatnya menganut prinsip "serba boleh" (*permissive society*) semua yang datang dari sana tidak harus ditelan mentah-mentah. Penyaringan-penyaringan mutlak diperlukan, mana-mana yang bermanfaat dan mana-mana yang merusak.

Di sinilah diperlukan dialog-dialog secara kontinue sehingga menemukan persepsi yang sama di antara lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lembaga kenegaraan.

Adapun mengenai hubungan antara agama, bangsa dan negara, Pak Natsir dalam tulisannya berjudul "*Revolusi Indonesia*" yang dipublikasikan pada bulan Juli 1954 di *Capita Selecta II*, mengungkapkan: betapa dunia takjub dan heran mendengar diproklamasikannya negara Indonesia sebagai bangsa yang dijuluki "*het zachste volk der narde*" bangsa yang paling lunak di dunia, rakyat Indonesia tiba-tiba mengalami metamorphose, dari seekor domba menjadi macan.

Perubahan hebat itu, menurut almarhum, terjadi karena Indonesia memiliki senjata immateriil yang dibangkitkan oleh para pemuka revolusi. Senjata ampuh itu ialah panggilan "**Allahu Akbar**".

Dalam hubungan dengan pidato-pidato almarhum Bung Tomo yang selalu memulai pidato-pidatonya dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, Pak Natsir memberikan komentar sebagai berikut: "Ia (bung Tomo) bukan saja berani tampil kemuka memimpin perjuangan, tetapi juga mempunyai suatu pengetahuan yang seringkali banyak orang tidak mengetahuinya, yaitu pengetahuan di mana terletak kunci daripada kekuatan bangsa kita ini. Dibukanya kunci hati umat yang banyak itu dengan perkataan "**Allahu Akbar**".

Tahu dia mencari teman. Tahu pula dia siapa-siapa teman yang dapat membangun tenaga dan menggelorakan tenaga itu".

Atas dasar pemikiran ini, almarhum tidak pernah melihat ada masalah hubungan Islam dan kebangsaan. Kita dapat menjadi muslim yang taat yang dengan gembira pula, menyanyikan Indonesia Tanah Airku: begitu kata beliau.

"Tidak ada perlunya", kata beliau lebih lanjut, seorang muslim itu harus meninggalkan kebangsaan dan kebudayaannya. Dalam ajaran Islam disebutkan, bahwa manusia dijadikan dalam golongan, bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang berbeda-beda. Bahasa pun bermacam-macam. Ini adalah fithrah. Atau natuur kata orang sekarang".

Yang menjadi masalah ialah, hendak diisi dengan apa negara kita ini. Juga bagaimana mengisi kemerdekaan. Pernyataan demikian harus dijawab demi kepentingan generasi kemudian.

Bagi almarhum, "mengisi kemerdekaan adalah sebuah rangkaian bersyukur dan berterima kasih. Diakuinya banyak kekurangan di negara kita, akan tetapi dengan segala cacat yang melekat pada Republik ini, kita harus menerima Republik ini dengan rasa syukur

nikmat. Bagi umat Islam mensyukuri nikmat itu, adalah suatu kewajiban”.

Akan masih terlalu banyak, kalau akan kita ungkapkan apa saja pemikiran dan perjuangan almarhum yang tidak terlepas dalam hubungan agama dengan kebebasan, kebangsaan dan kenegaraan, tetapi sekedar sebagai pembukaan dapat saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan para pembicara yang memang sangat kompeten dalam bidangnya masing-masing dapat lebih luas menguraikannya.

Sekian dan terimakasih.

Jakarta, $\frac{7 \text{ Shafar } 1415 \text{ H}}{16 \text{ Juli } 1994 \text{ M}}$

Natsir, Seorang Guru yang Perfeksionis Filosofis

Oleh: Dr. Taufik Abdullah

Natsir sebenarnya adalah orang besar, karena ia sudah menjadi bagian otobiografi saya. Buat saya, ini sudah menjadi pertanda apakah seseorang disebut besar atau tidak.

Ketika akhirnya Pak Natsir sebagai pemikir muda Islam, bergabung dalam Partai Islam Indonesia, maka ia sebenarnya, secara tidak langsung, sudah menyatakan sikapnya mengenai hubungan agama dan kebangsaan. Melihat nama partai ini saja sudah dapat diduga, tanpa menerangkan lagi, bahwa Islam adalah jiwa dan Indonesia adalah suatu konteks atau space atau struktur dalam mana jiwa itu harus diwujudkan.

Tampaknya, ini kesan saya, teks yang paling keras yang diberikan oleh Natsir bukanlah dari tulisan yang indah — Pak Natsir adalah salah seorang pemimpin kita yang paling leterir seleranya, indah dan persuasif — melainkan lebih banyak teks ini berwujud dalam tindakan. Patut diketahui, teks Natsir ada yang ditulis dan ada yang berwujud dalam tindakan.

Mengapa saya katakan teks tindakan bunyinya lebih keras ketimbang teks yang ditulis. Karena teks yang ditulis memberikan kebebasan tanpa batas, karena hanya berhadapan dengan kertas putih. Sedang, teks yang diwujudkan dalam tindakan adalah teks yang berbunyi nyaring. Karena itu ada benarnya kita bicara tidak hanya pemikiran pada seminar ini — pemikiran yang memberikan kebebasan tanpa batas — melainkan pula tindakan.

Kalau berbicara tentang teks tindakan, mau tak mau kita dihadapkan pada dua hal. Konteks tempat kita membuat tindakan itu yang memberikan suatu struktur atau wadah berbuat. Namun wadah ini

sendiri, sekaligus merupakan kendala. Teks tindakan adalah teks yang paling keras, karena hasil dialogis yang intens antara si aktor dengan struktur. Segala kemungkinan dan kemasukakalan sudah diperhitungkan.

Apakah bedanya teks yang ditulis dan teks yang diperbuat? Teks-teks yang ditulis Natsir mengandung dialogis bukan kontemplatif, yang berbicara sendiri. Ada teks yang ditulis sendiri, kemudian dianalisa dan mengharap orang lain membacanya. Dan ketika Pak Natsir menulis, seolah-olah ada audiens yang dihadapinya dan seolah-olah ada wajah-wajah yang diajak bicara.

Secara keseluruhan tulisan beliau bersifat dialog segitiga. Mula-mula, diamatinya situasi kemudian ditanggapinya persoalan tersebut, lalu dilemparkan kembali pada audiens. Hal ini tampak kalau kita baca komentar-komentar politik Pak Natsir di akhir tahun 30 awal 40-an, di sini jelas sekali merupakan dialog segitiga itu.

Dan Natsir tampaknya selalu terlibat dalam dialog itu. Ia tidak hanya seorang pemikir tapi juga seorang polemis, baik berpolemik dengan lingkungan, maupun berpolemik dengan seseorang yang dianggap sebagai mitra berfikir.

Karena selalu terlihat dalam dialog, lambat laun lingkungan atau orang lain lawan dia berdialog, mengalami perubahan. Kalau semua begitu, kemudian berubah jadi begini, demikian pula sebaliknya. Dari sini kita bisa memahami bahwa pemikiran Pak Natsir tidak baku melainkan mengalami perubahan pula. Artinya pemikiran Pak Natsir juga mengalami perkembangan.

Satu keuntungan dalam proses dialog ialah selalu ada perubahan atau perkembangan dalam pemikiran. Natsir bukan penulis sufi atau mistik yang berhubungan hanya satu arah. Sebagaimana hubungan dengan Allah, *hablum minallah* saja, tapi ia juga menulis bagaimana hubungan dengan antar manusia, *hablum minannaas* sebuah dunia yang selalu berubah ini.

Kalau kita amati urutan tulisannya dalam biografinya. Di sini terpantul dengan jelas perhatian utama sejak awal, memang telah terjadi perubahan. Kalau pada tahap pertama, Natsir muncul mula-mula sebagai pembela agama. Maka ketika ada seorang Belanda mengejek Islam, Natsir membalas dengan bahasa Belanda pula. Seolah ingin menunjukkan bahwa inilah Islam sesungguhnya.

Ini tahap pertama hubungan Natsir yang lebih *consens* pada Islam. Terbukti, ia menolak melanjutkan ke Perguruan Tinggi, dan ia lebih suka memilih bidang agama. Memang, kultur Islam sesungguhnya *consens* pada Islam. Tidak mengherankan bila ia lebih tertarik menekuni bidang agama, ketimbang melanjutkan sekolah, setelah tamat AMS dengan bea siswa.

Sebagai pembela agama, Natsir menyadari bahwa kunci persoalannya adalah bagaimana meningkatkan kecerdasan bangsa. Dan ini tak lain harus melalui bidang pendidikan. Dan memang sejak semula, ia bercita-cita ingin jadi guru.

Pada tahap kedua, Natsir berfikir bagaimana cara sebaiknya mendidik bangsa. Di sini ia mulai menulis tentang pendidikan. Ia lebih sibuk mempelajari bidang pendidikan, dan bahkan ia tampil sebagai guru. Ia sibuk menggeluti masalah Pedagogi, pembangunan sekolah. Maka Pak Natsir tampil sebagai guru yang terlibat.

Dalam kesempatan ini, Natsir memperkenalkan tokoh pemikir Islam tentang pendidikan, masa keemasan Islam dengan ahli fikirnya dan sebagainya. Jangan lupa ia menjadi guru setelah menetapkan dirinya sebagai pembela agama. Pada saat ini pula ia banyak mempelajari pemikiran para *orientalis*.

Pada tahap ketiga, Natsir tampil sebagai seorang komentator politik yang terlibat dalam berbagai macam peristiwa. Dari berbagai komentar politik yang ditulis Pak Natsir, saya kira, payah kita membayangkan orang yang ingin mempelajari masa akhir masa penjajahan Belanda, yang bisa melupakan tulisan Natsir.

Komentar politik Pak Natsir tidak hanya memberitakan kembali peristiwa politik tapi juga memberi komentar apa artinya peristiwa ini dalam konteks perjuangan bangsa. Salah satu yang ditulis dan dianalisanya adalah peristiwa dr. Cipto Mangunkusumo.

Ceritanya, Cipto Mangunkusumo melakukan demonstrasi mendukung Belanda pada tahun 40-an. Cipto yang pernah dibuang Belanda ke Banda Naire bersama Hatta dan Syahrir, tiba-tiba berubah. Alasan Cipto, Belanda adalah kekuatan demokrasi. Sedang Jerman kekuatan Fasis, Jepang militer Fasistis. Jadi bila berhadapan antara kekuatan demokrasi dan Fasis, masa depan Indonesia lebih memungkinkan dalam kekuatan demokrasi bila memihak Belanda..

Sebagai komentator politik, kemudian ia juga terlibat dalam politik. Sehingga ia mengambil pilihan, kalau dulunya ia seorang pemuda yang bergabung dalam Persatuan Islam kemudian Jong Islamiten Bond, dan kemudian ikut dalam partai sampai akhirnya ia mengajukan mosi integral di Parlemen supaya kembali bersatu kembali dan membangkitkan kembali RI. Namun setelah Orde Baru, kita melihat Natsir sebagai *wise man* dan ideal statemen yang selalu dihargai pada mulanya, belakangan dijadikan marginal dalam pentas politik.

Kalau dilihat, lapis-lapis di atas saling berpengaruh dalam kehidupan Natsir. Dua lapis pertama adalah lapis yang menentukan. Kalau lapis pertama ia sebagai pembela Islam, seperti menerangkan apakah sesungguhnya Islam. Maka pada lapis kedua dia tampil sebagai guru. Meski ia seorang Muballigh dengan segala macam ia lakukan, namun pada dasarnya saya melihat ia tetap seorang guru.

Bagi Natsir, dalam perkembangan pemikirannya sejak ia membela agama, agama tidak sekedar masalah pribadi dalam diri dan bukan pula ucapa yang dikutip, serta merangkul segala aspek kehidupan. Agama bukan pula sekedar label identitas. Bagi Natsir, Islam adalah jati diri sesungguhnya. Islam adalah jiwa dari yang sesungguhnya. Identitas kedirian inilah yang mengarahkan perjalanan hidupnya, ke mana ia harus melangkah.

Dalam teks-teks yang ditulis tampak identitasnya sebagai muslim. Ia ingin menjadi Muslim sesungguhnya. Perhatiannya sangat besar pada tradisi fase orientalis. Kedua, Identitas jati diri. Identitas ini yang menjadi landasan kritik tentang kecenderungan nasionalisme kultural yang ingin membanggakan kebangsaan yang bertolak dari tradisi pra Islami.

Natsir sangat kritis terhadap kemungkinan timbulnya sekularisasi pemikiran yang diberikan oleh kecenderungan akal merdeka yang tanpa batas. Kritik Natsir paling halus dan kena adalah ketika Soekarno menceritakan pada Natsir, tentang Ratna yang ingin membersihkan sesuatu di tubuhnya yang dijilat anjing.

Ratna ingin mencuci tujuh kali dengan tanah, sabun dan kaulin, sebagaimana anjuran Nabi. Tapi Bung Karno bilang "Tidak perlu sebab di jaman Nabi belum ada sabun". Menanggapi hal ini Natsir mengatakan "Tidak apa-apa mencuci dengan sabun." Tapi kalau argumentasi begini terus, maka tak ada akhirnya. Ratna ini akan tidur dengan nyenyak bila dikatakan cucilah dengan sabun dan lakukan juga sebagaimana dilakukan Nabi. Jadi masalahnya di mana batas

antara berfikir religius dengan berfikir yang sudah terlanjur sekularisme. Nah inilah beberapa hal di mana Natsir muncul dalam identitas keagamaannya.

Sebagai guru, akan selalu terpantul dalam tindakan pidatonya fikiran dan tulisannya. Ia selalu ingin memberikan tiga hal. Pertama, ia ingin memberi pengetahuan. *Kedua*, ia ingin memperkenalkan atau mempertebal kesadaran dan *Ketiga*, ia ingin tampil dengan kejernihan dalam berfikir. Sebagai guru, Natsir harus berfikir dengan jernih. Inilah yang tampak pada diri Natsir. Baik dalam tulisannya maupun dalam tindakan-tindakannya. Di samping kesederhanaan yang dipertebal.

Lalu bagaimana Natsir dengan agama dan kebangsaan? Natsir selalu terlibat dalam berdebat dan berdialog, jangan biarkan ia berfikir dengan kesendirian. Ia berfikir dalam situasi dialogis. Ketika Natsir tampil ke panggung tindakan, saat itu pula beberapa hal telah selesai. Indonesia telah menjadi tanah air. Pandangan antara cita-cita Indonesia Raya yang politik dengan cita-cita nasionalisme kultural yang sifatnya daerah, sudah mulai memudar.

Dan ketika Pak Natsir terlibat, kelihatan Indonesia telah menang karena pergerakan rakyat telah dikuasai oleh para nasionalisme politik. Sementara perdebatan antara golongan Islam dengan kebangsaan sedang berjalan.

Masalahnya ada dua hal ketika Natsir muncul. *Pertama*, munculnya kecenderungan pensakralan tanah air telah terjadi. Persakralan Ibu Pertiwi dilakukan. Hal ini yang ditentang Haji Agus Salim misalnya, ia mengkritik dengan khawatir jangan-jangan tanah air menjadi Tuhan. Maka terjadilah perdebatan antara Agus Salim dengan Soekarno.

Kedua, corak lain dari nasionalisme kultural telah mulai yaitu glorifikasi dari kebudayaan yang sifatnya pra Islam kembali muncul. Golongan Islam menyebut kaum nasionalis sebagai Majapahitisme, dan bukan nasionalisme yang muncul melainkan Majapahitisme.

Tentang Islam dan kebangsaan, Partai Muslim Indonesia (Permai) bertanya, apa sebabnya kita bertengkar sesama kita, yang Islam sibuk mengatakan Islam hebat demikian pula kaum kebangsaan. Mengapa kita tidak bersatu saja. Natsir bertanya mengapa ada kata "dan" di antara kata-kata Agama dan kebangsaan. Mengapa Islam dan Kebang-

saan. Tidak cukupkah Islam saja? Apa Islam tidak memadai? Sehingga diperlukan kata "dan".

Ini serangan yang tajam terhadap anak-anak sekolah agama. Seratus persen tokoh pergerakan di Sumatera Barat saat itu adalah keluaran sekolah agama. Jadi nasionalisme di Sumatera Barat bukan lantaran benci kepada Belanda, tapi bertolak dari pergolakan dalam kalangan Islam sendiri. Kebangsaan dilahirkan dari diskors Islam sendiri.

Satu hal yang paling keras dirasakan oleh Permai ketika harus tampil dengan argumennya dengan mengatakan, bahwa jiwa kita adalah Islam dan Indonesia adalah wadah tempat kita berbuat. Tapi Islam dan kebangsaan tetap berjalan.

Secara praktis, Permai kemudian kerjasama dengan Partindo. Tapi dalam perumusan ideologi, Permai lebih condong pada pendapat Natsir. Islam sebagai konsep yang totalistik yang di dalamnya segala hal bisa dibuat. Kalau begitu apa kebangsaan dalam pemikiran Pak Natsir.

Kebangsaan, menurut Natsir, adalah sesuatu yang *given* sesuatu yang sewajarnya saja. Dan ini telah terjaga oleh Al-Quran. Jadi bukan sesuatu hal yang dipersoalkan benar. Dalam tahap perdebatan ini, Natsir mengakui bahwa kebangsaan sebagai suatu cita-cita yang sifatnya dua.

Pertama bersifat *trans ethnic*. Dan *kedua*, kebangsaan sebagai sesuatu komunitas baru. Maka bisa difahami bahwa kebangsaan mendapat tempat terhormat dalam pemikiran Natsir. Tapi nasionalisme adalah masalah lain.

Tampaknya meskipun Pak Natsir tetap menggunakan kata kebangsaan, ia membedakan benar antara kebangsaan dan nasionalisme. Nasionalisme adalah mengideologikan cita-cita kebangsaan. Dalam proses nasionalisme Natsir agak dingin.

Karena setiap isme akan terlibat proses *inclusion* berarti masuknya tradisi non Islam. Padahal, masuknya Islam adalah keterputusan yang berarti pula tak ada kontinuitas. Seperti ketika seseorang mengucapkan dua kalimat shahadat maka terputuslah hubungan dia yang dulu dengan dia yang sekarang.

Dalam sejarah pun demikian, ketika proses Islamisasi terjadi maka terputuslah hubungan antara masa lalu dengan masa kini. Kekuatan

nasionalisme adalah keinginan untuk mencari akar-akar historis. Jadi ada pertentangan. Nasionalisme menghendaki suatu kontinuiti, suatu kesinambungan. Kalau ini dilanjutkan maka di sini orang mudah tergelincir pada masalah *ashabiah*. Suatu hal yang dipersoalkan oleh A. Hasan, Bandung.

Ketiga, yang namanya isme membutuhkan suatu hal yang ritualistik. Nasionalisme umumnya mempunyai kecenderungan ritualistik. Tahap kedua dari pemikiran Natsir ialah ketika masalah kebangsaan harus dihadapkan pada negara dan masyarakat.

Kredo utama dari Natsir, bersandar pada sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, "*Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan kepada Ku*". Pak Natsir berkali-kali mengatakan bahwa Negara bukan tujuan melainkan alat. Tujuan tak lain adalah kesempurnaan berlakunya Undang-undang Ilahi. Bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk masyarakat untuk kini dan nanti. Kalau Negara adalah alat berarti alat ini bisa dikompromikan. Yang tidak bisa adalah pegangan utama yakni keberlakuan hukum-hukum Ilahi.

Kalau negara adalah alat maka bisa saja negara Islam bukan suatu kemestian mutlak. Sebagai alat, tergantung pada suasana, waktu dan tempat. Masalahnya adalah, bagaimana alat merupakan konteks yang sesuai dan ramah bagi kebebasan dan keberlakuan hukum Ilahi yang kekal abadi.

Kesimpulannya, Natsir memang berhadapan dengan suatu masalah yang pelik, karena ia membayangkan terciptanya negara yang ideal dan belum ada contohnya dalam sejarah, kecuali mungkin jaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Tapi keuntungannya karena tak ada contoh, ia bisa membayangkan suatu negara yang ideal itu.

Natsir memang seorang idealis dalam dua hal. *Pertama*, idealis sebagai seorang yang menginginkan suatu hal yang realita yang sempurna. Di mana hukum Ilahi tercipta, masyarakat yang diridhoi tercipta dan negara yang sesuai, baik masyarakat dan pribadi muslim itu terwujud. Karena itu, selalu itu terbayang keinginan itu.

Kedua, Natsir seorang idealis dalam pengertian filosofis. Ia yakin benar bahwa kesadaran ide akhirnya akan bisa menumbuhkan realitas. Pak Natsir memang adalah seorang guru, guru bagi umatnya dan guru bagi kawan-kawannya. Dan sebagai guru memang ia seorang idealis. Guru yang ketika mengajar menginginkan murid-muridnya

akan berbuat sesuatu yang benar. Dan kegagalan Pak Natsir dalam politik memang adalah kegagalan dan keterkejutan seorang guru yang idealis menghadapi realitas yang keras.

Kegagalan ide filosofis Pak Natsir, adalah kegagalan seorang guru dalam menghadapi realitas. Bahwa, betapa dunia semakin cenderung pada materialistik.

Administrator Natsir Dalam Episode Sejarah

Oleh: Dr. Ichlasul Amal

ADALAH lazim bagi literatur-literatur yang mengupas tentang perkembangan politik di negara-ketiga pada tahun 50-an mendekotomikan aktor-aktor politiknya ke dalam dua kelompok yang berbeda secara diametral.

Pengelompokan ini bukan hanya penting dalam rangka menggambarkan dan menganalisa tingkah laku para aktor itu sendiri sebagai tokoh utama yang banyak menentukan kebijaksanaan negara. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa pengelompokan tersebut berguna untuk menjelaskan dan meramalkan kecenderungan politik yang akan terjadi.

Ilmuwan terkemuka, Eisenstadt misalnya, bicara tentang konflik yang terus menerus antara aktor atau pemimpin yang sangat memperhatikan ketertiban administrasi dengan aktor lain yang cenderung mengagung-agungkan simbol-simbol solidaritas.

Demikian juga Lucian W. Pye membedakan secara tajam tokoh-tokoh yang dengan teliti memperhitungkan masalah teknis dengan para pemimpin yang sangat berorientasi pada ideologi.

Demikian pula Glassburner seorang pengamat politik Indonesia mengelompokkan pemimpin-pemimpin Indonesia ke dalam kategori *development minded* dengan *histori minded*. Benjamin Higgins, pengamat tentang Indonesia yang lain, lebih senang menggunakan istilah "moderate" dan "nasionalist".

Sehubungan dengan pengelompokkan ini, karya master-piece Herbert Feith tentang perkembangan politik Indonesia tahun 1950-1959 secara lebih rinci dan komprehensif membedakan dua tipe

aktor dan pemimpin politik yang berperan utama dalam periode itu, yaitu "administrator" dan "solidarity maker".

Feith memberi ciri pemimpin yang "adminstrator" sebagai *leaders with the administrative, legal, technical and foreign language skills, required to run the distinctively modern apparatus of a modern state*.

Pemimpin tipe ini, menurut Feith, sangat yakin dan percaya bahwa masalah kebebasan-kebebasan atau kemerdekaan publik dan rule of law, adalah tiang pokok bagi terselenggaranya demokrasi politik. Dan berfungsinya lembaga-lembaga perwakilan merupakan penjaga utama dalam mencegah kemungkinan munculnya otoritarisme, fasisme dan demagogisme.

Di antara aktor-aktor dan pemimpin politik tahun 50-an yang menonjol yang tergolong dalam tipe ini adalah Hatta, Syahrir, Sultan Hamengku Buwono, Wilopo, Djuanda, Sjafruddin Prawiranegara, dan beberapa yang lain lagi.

Kabinet "Administrator" Natsir

Pembentukan Kabinet Natsir dan berlakunya Negara Kesatuan sebagai pengganti Republik Indonesia Serikat (RIS), berarti telah berakhir pula periode transisi menuju Kemerdekaan. Seperti kabinet Hatta, pendahulunya, Kabinet Natsir membawa beban tugas mengembalikan situasi revolusi ke dalam situasi normal dan meletakkan dasar-dasar politik demokrasi. Kegagalan dan jatuhnya Kabinet Natsir yang mempunyai masa jabatan relatif singkat, telah menandai pula awal kemerosotan politik demokrasi di Indonesia.

Sesudah Kabinet RIS, Hatta mengundurkan diri, Presiden Soekarno selama beberapa hari secara terus menerus mengadakan hearing dengan wakil-wakil yang besar pada saat itu untuk membicarakan komposisi dan program kabinet yang akan dibentuk, dan yang paling penting adalah membicarakan siapa yang diberi tanggung jawab untuk membentuknya.

Akhirnya pada 21 Agustus 1950 Presiden Soekarno menggunakan hak prerogatifnya menunjuk Mohammad Natsir, Ketua Dewan Eksekutif Masyumi – partai yang memiliki jumlah wakil terbesar di Parlemen (DPR), untuk bertindak sebagai formateur kabinet.

Sudah dapat diperkirakan sebelumnya, masalah utama yang akan dihadapi oleh Natsir sebagai formateur adalah bagaimana mengikutsertakan PNI, partai kedua terbesar di parlemen, dalam kabinet.

Natsir, sebagai personifikasi dari partai yang terbesar dan yang otomatis akan memegang jabatan sebagai Perdana Menteri, menetapkan suatu sikap bahwa posisi Masyumi di kabinet harus mencerminkan pengaruh yang lebih besar daripada partai-partai lain yang akan ikut duduk dalam kabinet.

PNI sebagai partai politik terbesar kedua dan yang merasa dibutuhkan oleh Masyumi, menolak tawaran Masyumi yang sangat terbatas ini. PNI menuntut jabatan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan, karena kedua jabatan ini secara politis dan sangat strategis.

Jabatan yang pertama dianggap penting, sangat menentukan dalam hal pengangkatan gubernur, residen dan bupati. Jabatan yang kedua dinilai strategis karena rasa takutnya akan pengaruh Islam atas sistem pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Di samping itu, ada perbedaan-perbedaan lain terutama yang menyangkut tipe-tipe tokoh yang akan diangkat. Dasar kepentingan dua partai terbesar ini yang sulit dipertemukan.

Atas dasar perbedaan-perbedaan ini, Natsir dua kali menawarkan untuk mengembalikan mandat formateur pada Presiden, tetapi Soekarno menginginkan agar Natsir mencoba lagi. PNI memperhitungkan bahwa Natsir tidak akan berani membentuk kabinet sendirian tanpa PNI.

Tetapi perhitungan PNI ternyata meleset. Natsir menerima tantangan yang dilempar PNI. Natsir akhirnya membentuk kabinet dengan Masyumi sebagai intinya, berkoalisi dengan beberapa partai terkecil serta beberapa tokoh politik non partai. PNI berada di luar kabinet, walaupun ini berarti mendorong PNI bergabung dengan PKI dan Partai Murba sebagai partai oposisi. Pada awal Oktober, Natsir melaporkan pada Presiden Soekarno susunan kabinet tanpa PNI. Atas keberhasilannya ini Natsir mendapat pujian "never a man for indecision".

Adapun komposisi kabinet Natsir adalah sebagai berikut:

Perdana Menteri	Mohammad Natsir (Masyumi)
Wakil Perdana Menteri	Sultan Hamengku Buwono (non partai)
Menteri Luar Negeri	Mr. Mohammad Roem (Masyumi)
Menteri Dalam Negeri	Mr. Assaat (non partai)
Menteri Pertahanan	Dr. Abdul Halim (non partai)
Menteri Kehakiman	Mr. Wongsonegoro (PIR)
Menteri Pencerangan	Pellaupessy (Fraksi Demokrasi)

Menteri Keuangan	Mr. Syafruddin Prawiranegara (Masyumi)
Menteri Pertanian	Mr. Tandiono Manu (PSI)
Menteri Perdagangan dan Industri	Dr. Sumitro Djojohadikusumo (PSI)
Menteri Komunikasi	Ir. Djuanda (non partai)
Menteri Pekerjaan Umum	Prof. H. Johannes (PIR)
Menteri Perburuhan	Suroso (Parindra)
Menteri Sosial	Harjadi (Katolik)
Menteri Pendidikan	Dr. Bahder Djohan (non partai)
Menteri Agama	KH. Wachid Hasjim (Masyumi)
Menteri Kesehatan	Johannes Leimena (Parkindo)
Menteri Negara	Harsono Tjokroaminoto (PSII)

Reaksi terhadap komposisi kabinet ini bermacam-macam, tetapi semuanya sependapat bahwa tindakan Natsir adalah tindakan yang sangat berani.

Sejak kabinet pertama (1945-1946) PNI tidak pernah tidak terwakili dalam kabinet, dan PNI pada saat itu merupakan partai yang sangat prestijius karena PNI telah memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan Negara Kesatuan.

Kabinet Natsir pada awal masa jabatannya menekankan pada pelaksanaan yang mendesak, yaitu reorganisasi dan rasionalisasi militer dan birokrasi, stabilitas di bidang keuangan dan peningkatan aktivitas ekonomi. Dalam merealisasikan program-program ekonominya, Kabinet Natsir memperoleh keuntungan karena tersedianya devisa luar negeri yang cukup besar, yang berasal dari meningkatnya harga-harga barang-barang ekspor utama Indonesia sebagai akibat dari eskalasi Perang Korea. Dana-dana luar negeri yang sangat besar yang terkumpul dari boom harga telah meningkatkan kemampuan kabinet dalam mengendalikan inflasi dengan cara liberalisasi sistem impor. Dari kebijaksanaan-kebijaksanaan kabinet ini mengakibatkan perbaikan-perbaikan yang substansi bagi kondisi ekonomi negara secara menyeluruh.

Walaupun demikian, beberapa saat kemudian Kabinet Natsir menghadapi serangan-serangan keras dari kelompok partai oposisi di Parlemen. Pendekatan perundingan yang dipakai oleh Natsir untuk membujuk Belanda agar menarik diri dari wilayah Irian Barat (kini Irian Jaya, pen) dianggap oleh kelompok oposisi sebagai sikap yang terlalu lunak dan lemah.

Pendekatan Natsir tersebut mengecewakan banyak tokoh-tokoh partai terutama dari partai-partai yang menganggap partai yang radikal revolusioner dan menyebabkan Presiden Soekarno marah. Walaupun Natsir pada akhirnya mampu mengatasi oposisi di parlemen mengenai masalah Irian Barat, kekecewaan terhadap kabinetnya semakin meningkat.

Dan akhirnya Kabinet Natsir jatuh juga, atas dasar isue Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 1950 yang menyangkut pendirian Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Eksekutif di Jawa dan Sumatera atas dasar-dasar yang dianggap menguntungkan Masyumi.

Salah satu alasan mengapa Kabinet Natsir sampai kehilangan dukungan dari beberapa partai yang semula mendukungnya adalah, karena sikap konsistensinya dalam menolak kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat patronal. Disamping meningkatnya secara berlipat ganda pendapatan pemerintah selama boom Perang Korea.

Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara secara tegas dan keras mengalokasikan dana-dana Pemerintah hanya semata-mata untuk pelaksanaan proyek-proyek ekonomi Pemerintah dan hampir tidak ada dari dana-dana tersebut yang digunakan untuk tujuan-tujuan politik. Tindakan-tindakan keuangan Kabinet Natsir hanya memberi kesempatan yang kecil sekali bagi pemimpin-pemimpin atau pendukung-pendukung pemerintah memperoleh keuntungan pribadi dari akses mereka terhadap dana-dana pemerintah.

Reperkusi sikap "Administrator"

Menjelang transformasi dari RIS ke Negara Kesatuan, Kabinet Halim (Negara RI sebagai bagian dari RIS) mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang memberikan dasar-dasar untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Eksekutif Daerah untuk tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya. PP. No. 39 1950 dibuat oleh Kabinet Halim atas pertimbangan bahwa tidak mungkin Dewan Perwakilan Daerah dapat dilaksanakan dalam jangka waktu singkat.

Dan untuk mengisi kekosongan tersebut dikeluarkan PP. No. 39 yang mengatur suatu sistem pemilihan yang didasarkan pada eksistensi organisasi-organisasi di daerah-daerah. Organisasi-organisasi ini dapat berbentuk partai, organisasi buruh, petani, wanita, pemuda, agama dan sebagainya. PP ini mengatur pembentukan Dewan Eksekutif Daerah yaitu wakil-wakil Partai yang dipilih dari Dewan Perwakilan Daerah secara proporsional.

Walaupun PP No. 39 ini dibuat oleh Kabinet Halim yang dimotori oleh Menteri Dalam Negeri Mr. Susanto Tirtoprodjo, tapi Kabinet Natsir sebagai penerus, mempunyai tanggung-jawab moral untuk melaksanakannya. Dalam prakteknya, PP ini sangat menguntungkan kedudukan Masyumi yang paling banyak mempunyai organisasi massa yang berafiliasi dengannya. Masyumi sebagai partai yang mempunyai sistem keanggotaan, baik langsung (perorangan) maupun tidak langsung (organisasi), otomatis menjadi partai yang dominan di banyak daerah Jawa dan Sumatera. Hal ini tidak dikehendaki oleh semua partai oposisi di parlemen.

Terlepas dari implikasi politik dari PP No. 39 ini menguntungkan Masyumi, sekaligus yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Natsir, ketegaran Kabinet Natsir dalam mempertahankan pelaksanaan PP ini, berkaitan erat dengan sikap yang menekankan pada rule of law kepemimpinan Natsir. Sikap yang sama terlihat pula dalam menyelesaikan persoalan politik yang berkembang di Bukittinggi, ibukota propinsi Sumatera Tengah, suatu wilayah yang sebagian besar penduduknya adalah orang Minangkabau. Mereka melihat Natsir bukan hanya sebagai tokoh, tetapi juga mewakili aspirasi dan kebanggaan etnik Minangkabau.

Beberapa saat setelah pengakuan kedaulatan, Desember 1949, suatu keadaan yang ironis berkembang di beberapa kota di Sumatera Barat. Antara kelompok masyarakat, yang terpaksa meninggalkan kota karena menolak bekerja sama dengan Belanda, dan kelompok kecil masyarakat yang tetap tinggal di kota karena mendapat keuntungan dari kehadiran kembali pemerintah Belanda.

Implementasi kebijaksanaan "rasional" Kabinet Hatta sering kali lebih menguntungkan kelompok kedua. Sebagai contoh, kelompok masyarakat yang telah mendukung revolusi dengan secara sukarela mau menerima uang Republik, URIPS (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera), dipaksa untuk menukarkannya dengan uang baru Pemerintah federal dengan nilai tukar 1 uang federal sama dengan 125 URIPS.

Banyak lagi kebijaksanaan Pemerintah Pusat yang menimbulkan kekecewaan di antara masyarakat Sumatera Barat sebagai pendukung gigih revolusi. Pada awal tahun 1950 di Bukittinggi kekecewaan semacam ini dimanifestasikan dalam suatu demonstrasi massa yang secara simbolis disebut "Demonstrasi Nasi Bungkus".

Demonstrasi ini dimaksudkan untuk mengingatkan tokoh-tokoh Republik yang menduduki posisi "empuk" di pemerintahan, di atas penderitaan nasib mereka yang dikorbankan selama revolusi. Penyesalan dan kekecewaan semakin memuncak ini akhirnya merembet ke Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah (DPRST) yang bersidang untuk pertama kali setelah revolusi pada April 1950.

Kekecewaan DPRST pada Pemerintah Pusat dimanifestasikan dalam bentuk mosi tidak percaya pada Gubernur Sumatera Tengah, Mr. Nasrun, seorang putera daerah, pegawai pamongpraja dan dikenal sangat legalistis. Gubernur Nasrun menolak dasar hukum mosi tidak percaya tersebut. Karena keyakinannya bahwa dia hanya bertanggung jawab pada Pemerintah Pusat dan tidak pada DPRST, maka dia tetap bekerja sebagai Gubernur tanpa memperhatikan mosi tersebut.

Menteri Dalam Negeri Republik di Yogyakarta, Mr. Susanto Tirtoprodjo, tidak menanggapi secara langsung mosi tersebut, tetapi mengirimkan telegram yang berisi instruksi agar semua fungsi administrasi Pemerintah Pusat yang ada di propinsi tersebut diletakkan di bawah kontrol Residen Sumatera Barat, R.M. Utojo. Tetapi penyelesaian ini juga tidak dapat diterima oleh DPRST. Setelah beberapa kali pertemuan di Bukittinggi dan Yogyakarta, antara wakil-wakil DPRST dengan Menteri, gagal mencapai penyelesaian.

DPRST memutuskan minta pada Pemerintah di Yogyakarta untuk memilih gubernur baru dari nama-nama yang telah dipilih oleh DPRST. Tiga nama yang dinominasi oleh DPRST itu adalah H. Ilyas Yacob, ketua DPRST, anggota PSI yang pernah menjadi Residen dan Gubernur Militer Sumatera Barat dan Wakil Gubernur Sumatera Tengah selama revolusi dan Dr. A. Rahim Usman, Wakil Ketua Dewan Eksekutif Sumatera Tengah. Atas tuntutan ini pemerintah Yogyakarta menanggapi dengan memindahkan Gubernur Nasrun, tetapi membiarkan jabatan gubernur tetap kosong.

Ketika Natsir menjadi Perdana Menteri, dia mengirim Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat ke Bukittinggi untuk mengadakan hearing dengan DPRST. Tetapi Assaat gagal mencapai persetujuan, karena alasan-alasan yang merefleksikan sikap secara keseluruhan, yang lebih menekankan pada capability daripada acceptability di Bukittinggi ini, kemudian menyusul pertemuan-pertemuan lain antara ketua DPRST dan Menteri di Jakarta. Pertemuan ini juga gagal mencapai penyelesaian. Dalam bulan Oktober, Assaat menunjuk Ruslan Muljoharjo, anggota Masyumi dan pamongpraja senior, sebagai Pejabat Gubernur.

Penunjukan ini menimbulkan reaksi-reaksi yang keras di antara tokoh-tokoh politik di Sumatera Barat, terutama di antara anggota DPRST. Sebagai orang Minang, mereka menyesali sikap sesama orang Minang terutama Natsir dan Assaat yang memilih orang Jawa sebagai gubernur di daerahnya, sementara banyak putra daerah yang dianggap mampu memegang jabatan tersebut. Mereka melihat keputusan Pemerintah Pusat tersebut mengecilkan dan menganggap remeh peranan Sumatera Barat selama revolusi.

Pada awal Desember 1950, DPRST mengeluarkan pernyataan yang berisi alasan mengapa menolak menerima Ruslan Muljoharjo, dan mengingatkan Pemerintah Pusat akan hak-haknya untuk mencalonkan kandidat gubernur sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948. Dalam menanggapi reaksi yang keras ini, Hatta, Natsir dan Assaat kemudian mengadakan pertemuan untuk membicarakan keadaan di Sumatera Tengah. Mereka sebenarnya telah coba mendapatkan tokoh Minangkabau yang dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pusat untuk menduduki jabatan gubernur.

Pilihan jatuh pada Mr. Sutan M. Rasjid, pejabat senior pada Kementerian Luar Negeri dan berorientasi ke PSI. Tetapi Rasjid menolak tawaran jabatan Gubernur tersebut. Sementara itu, Ruslan Muljoharjo telah fungsional sebagai Pejabat Gubernur, walaupun oposisi yang keras dari DPRST masih tetap berjalan.

Akhirnya, pada pertengahan Januari 1951, Perdana Menteri Natsir mengeluarkan satu keputusan final yaitu Peraturan Pemerintah Khusus yang membekukan DPRST dan menetapkan Ruslan Muljoharjo sebagai Pejabat Gubernur Sumatera Tengah.

Keadaan ini tetap status quo sampai 20 September 1957, ketika Letnan Kolonel Husein sebagai Ketua Dewan Banteng, mengambil alih kontrol atas pemerintahan di propinsi Sumatera Tengah, dan kudeta tak berdarah ini merupakan awal dari peristiwa PRRI.

Administrator Versus Primordialisme

Natsir sebagai tokoh nasional dan "administrator" kebijaksanaan dan pertimbangan politiknya adalah berwawasan makro nasional. Tetapi dia juga seorang Minangkabau yang secara etnis akan dilihat lebih dari sekedar tokoh nasional oleh masyarakat Minangkabau, terutama yang mempunyai kaitan erat dengan teritorial Sumatera

Barat. Dia juga dianggap mewakili Minangkabau bukan hanya di bidang politik, tetapi juga dalam pergaulannya dengan etnik-etnik yang lain. Sebagai negara "mosaik" Indonesia mempunyai perbedaan kultural dan etnik yang cukup tajam.

Dan dalam negara dan masyarakat yang demikian ini, ditambah lagi dengan keadaan negara yang baru merdeka, interaksi politik tidak hanya terwakili oleh aspirasi politik yang diwujudkan dalam partai politik dan ideologi. Tetapi juga banyak didasari oleh pertimbangan-pertimbangan dan emosi-emosi primordial, seperti agama, etnik dan solidaritas kedaerahan, walaupun emosi-emosi primordial ini dalam kepolitikan Indonesia jarang sekali ekspresif.

Justru, mungkin karena sikap "Administrator" Natsir yang sangat tegar seperti telah digambarkan di muka, maka yang memanfaatkan emosi-emosi primordial di kalangan masyarakat Sumatera Barat yang mempunyai kaitan khusus dengan Natsir adalah lawan-lawan politik Natsir.

Dalam rangka menghidupkan kembali DPRST yang selama ini tetap beku sebagai akibat dari PP khusus yang dikeluarkan oleh Kabinet Natsir, partai-partai "revolusioner" seperti Murba dan PKI yang merasa dirugikan oleh PP tersebut, secara terus-menerus menyerang pribadi Natsir.

Dt. Bagindo Basa Nan Kuning, Ketua partai kecil yang mempunyai basis massa di Sumatera Barat, Partai Adat Rakyat, yang secara ideologis mempunyai afiliasi dengan PKI, memanipulasi primordialisme rakyat Sumatera Barat tersebut. Dia mengutuk Natsir sebagai orang Minangkabau yang telah menggoncangkan nilai-nilai tradisi Minangkabau.

Dalam kata-katanya: "Natsir sebagai penghulu yang dilahirkan di daerah ini seharusnya *memacik arik* menggenggam teguh adat Minangkabau. Jika melupakan ini, maka ia akan terkutuk sebagai orang yang ke atas tidak terpujuk, ke bawah tidak berurat dan di tengah digirik kumbang".

Kekecewaan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat terhadap sejumlah tokoh-tokoh di Jakarta dan kebijaksanaan "administrator"-nya memang cukup beralasan. Selama revolusi, tokoh-tokoh Sumatera Barat telah mendemonstrasikan loyalitasnya yang tinggi terhadap tokoh-tokoh Republik di Pusat. Walaupun sebenarnya mereka mempunyai kebebasan yang besar untuk mengambil kebijaksanaannya sendiri, terlepas dari kepemimpinan Nasional Pusat, mereka selalu

mematuhi semua perintah-perintah yang berasal dari ibukota Republik di Yogyakarta.

Kesetiaan yang tinggi itu tentu saja sebagian berasal dari kenyataan bahwa orang Minangkabau merupakan komponen yang sangat penting dalam kepemimpinan Republik di Pusat. Dari lima Perdana Menteri Pertama Republik, empat di antaranya: Syahrir, Hatta, Halim dan Natsir, adalah orang Minangkabau. Tetapi orang-orang Minangkabau yang duduk di Sumatera Barat sebagai wakil mereka di Pusat, tidak melihat bahwa daerah kelahirannya berhak atas perlakuan khusus.

Tokoh-tokoh "administrator" tersebut setuju dan percaya betul dengan pendekatan "rasional" mereka, bahwa pertimbangan etnik dan kedaerahan seharusnya dikesampingkan dalam pertimbangan-pertimbangan pemerintahan dan pengangkatan personil. Seperti halnya orang Minangkabau di Sumatera Barat. Natsir dan tokoh Minangkabau lainnya "take it for granted" bahwa masyarakat Minangkabau Sumatera Barat pasti loyal padanya karena keterkaitan etnik mereka.

Episode di atas adalah sebagian contoh dari kedudukan seorang "administrator" dalam perkembangan politik di negara yang baru merdeka. Sikap dan cara berfikirnya adalah "one decade ahead" sehingga tidak hanya memberi peluang bagi rival-rival ideologinya yang tentu saja akan memanfaatkan peluang tersebut semaksimal mungkin untuk menjatuhkannya, tetapi juga seringkali tidak dapat diikuti dan diterima oleh teman dan pengikut sekubunya.

Karena keyakinannya atas rule of law dan fokus kebijaksanaannya yang menekankan bahwa masalah ekonomi dan administrasi Pemerintah harus dimanage atas dasar norma-norma khusus, yang jauh dari kriteria-kriteria primordialisme, termasuk norma-norma politik dan etnik. Dalam banyak hal, dua norma ini merupakan sumber dan basis utama suatu dukungan politik harus berhadapan dengan suatu kelompok elit politik yang kuat yang mengeksploitasi semangat revolusioner yang masih melekat pada sebagian besar publik. Dan menuntut bahwa ukuran revolusioner itu harus dijadikan momentum dan mistik dari negara Indonesia yang merdeka.

Demikianlah kabinet "administrator" Natsir hanya dapat bertahan selama tujuh bulan. Dan perkembangan politik selanjutnya menunjukkan bahwa politik semakin didominasi oleh tokoh-tokoh dan aktor yang berkebalikan dengan Natsir.

Diskusi Tentang Agama dan Kebangsaan.

Pembicara : **Dr. Taufik Abdullah dan Dr. Ichlasul Amal**
Moderator : **Drs. H. Mohammad Anwar**

Para Penanggap:

Dr. Ir. Mohammad Imaduddin Abdulrahim:

Saya hanya ingin memberikan beberapa catatan. Pertama tentang pemahaman kebangsaan yang dianut Mohammad Natsir, yang saya kenal. Beliau tegas-tegas membedakan antara Nasionalisme dan Patriotisme.

Kebanyakan orang, mengatakan – sebagaimana yang telah dikutip oleh Taufik Abdullah – bahwa orang Islam terlalu kurang rasa kebangsaannya. Padahal, yang saya ingat, beberapa pesan almarhum yang saya dengar sendiri dari mulut beliau, bahwa bagi kita, orang Islam, tidak mengenal alternatif Barat dan Timur dan sebagainya. Kita hanya mengenal satu alternatif ialah yang hak dan batil, di mana kita harus selamanya tegak mempertahankan yang hak. Itulah pendirian beliau.

Tentang kegagalan Pak Natsir, saya ingin mengatakan bahwa ini bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan beliau karena beliau start dari pendirian tauhid, aqidah yang kokoh.

Dan istilah Pak Taufik kurang tepat untuk menggunakan kata “kegagalan” politik, karena kegagalan politik dalam suatu negara bukan hanya perjuangan satu generasi, tapi satu estafet. Kalau dikatakan Mohammad Natsir itu gagal dalam politik, maka semua pejuang Islam atau pejuang nasional lainnya juga gagal. Dari Tengku Umar, Pangeran Diponegoro dan sebagainya, semua gagal. Karena kalah melawan Belanda. Perjuangan adalah satu estafet dalam periode. Beliau tidak gagal, beliau berhasil. Cuma penerusnya sekarang ini.

apakah kita bisa meneruskan segigih beliau apa tidak. Saya kurang senang dengan istilah kegagalan politik.

Dr. Ir. A.M. Syaefuddin:

Saya mendapat kesan bahwa Bapak Mohammad Natsir mengakhiri hidupnya dengan kegagalan. Hati saya berontak, sama dengan Bung Imaduddin. Karena menurut teori, sejarah itu suatu kontinyu, maka saya tidak pernah setuju. Tanpa Mohammad Natsir, barangkali, tidak ada kita. Oleh karena itu interpretasi mengenai perjuangan hendaknya diluruskan.

Saya juga tidak sepakat dengan pernyataan bahwa Mohammad Natsir mengakhiri hidupnya dalam posisi hanya sebagai guru, di mana guru tersebut identik dengan idealis. Beliau menganjurkan pada kader-kader muda pada waktu itu, masukilah Akabri, Perbankan, tidak hanya politik. Jadi dia realistik, belum pada puncak sebelum beliau meninggal, beliau melakukan ijtihad, beliau seorang mujtahid besar di bidang politik. Ini tidak disebut oleh Dr. Taufik Abdullah maupun Dr. Ichlasul Amal.

Saya juga tidak sepakat kalau dikatakan Mohammad Natsir mengakhiri hidupnya dengan sikap politik yang marginal. Tergantung siapa yang memandang. Pak Natsir tetap aktif dalam politik, di Petisi 50, dan maksimal, bukan marginal, serta selalu memberi nasihat kepada anggota DPR.

Masalah psikologis, saya kurang mengerti itu. Pak Natsir tidak pernah guncang psikologinya. Menurut yang saya tahu, beliau bersih selalu dan ketika mengambil keputusan, jernih. Orang yang guncang psikologinya disebut psikosomatik namanya. *Post Power Syndrom*, beliau tidak mengalami itu, walaupun menjadi Perdana Menteri hanya 7 bulan, beliau tetap tegar. Mohammad Natsir adalah satu anasir dari kontinyu sejarah dan beliau telah membuat sejarah, bukan ikut-ikutan sejarah.

Lukman Saefuddin:

Pertama, menyangkut konteks Pak Natsir dalam hubungan Islam dan kebangsaan atau Nasionalisme. Dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Februari 1956, terjadi pertentangan yang cukup tajam ketika pemerintahan Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Di

kalangan Masyumi terjadi pertentangan. Satu sisi menyetujui sikap PM Sjahrir, yang bersedia bekerjasama dengan Van Mook, Belanda, yang melahirkan Perjanjian Linggarjati. Dalam tubuh Masyumi terjadi dua kelompok. Satu kelompok yaitu Pak Natsir, Pak Sjafrudin, Pak Mohammad Room. Kelompok lain, adalah Pak Kasman Singodimejo dan Pak Yusuf Wibisono.

Kelompok Pak Natsir lebih menyetujui Perjanjian Linggarjati yang isinya tentang Indonesia Menjadi RIS. Lalu ada beberapa hak-hak Belanda terhadap negara ini. Sedangkan kubu Pak Kasman dan Wibisono menolak dengan tegas. Saya ingin mendapat tanggapan, berkenaan dengan dasar pemikiran Pak Natsir pada kedua event itu.

Kedua, berkaitan dengan keluarnya Masyumi dari Kabinet Ali Room dan Idham. Ketika Mukhtamar Masyumi 1956, Masyumi menyatakan keluar dari Kabinet, padahal saat itu justru satu-satunya Kabinet yang sangat kuat mengingat hubungan PNI dengan Islam. Islam yang diwakili Masyumi dan NU.

Dengan keluarnya Masyumi dari Kabinet, banyak pengamat mengatakan, di situlah salah satu langkah awal timbulnya PKI yang akhirnya bisa naik dan mempengaruhi kebijakan Bung Karno. Dan selanjutnya, menjadi Kabinet Kaki Empat. Mungkin ada pemikiran Pak Natsir yang saya sendiri belum menangkap ada apa di balik itu.

Terakhir, pernyataan menyangkut pembubaran Masyumi. Sebagian pihak mengatakan, Masyumi membubarkan diri. Sedangkan sejarah mencatat, bahwa pada 17 Agustus 1960, salah satu tokoh Masyumi, yaitu HM. Yunan Nasution dipanggil Bung Karno, lalu pada saat itu Pemerintah secara resmi membubarkan Masyumi, termasuk PSI yang juga dihadiri oleh Pak Subagio. Kalau memang Masyumi membubarkan diri, itu mulai kapan? Apakah sebelum 17 Agustus 1960 atau setelah itu.

Jawaban Dr. Taufik Abdullah:

Saya tidak pernah mengatakan kelemahan, yang saya katakan adalah kegagalan Natsir dalam Politik, bukan kegagalan perjuangan umat dalam politik. Artinya, tersingkirnya Pak Natsir adalah keterkejutan seorang guru yang idealis dalam menghadapi realitas yang keras.

Sekarang yang menjadi masalah, kalau dikatakan kegagalan tidak setuju ya boleh saja. Tapi bedakan satu hal. Kegagalan yang saya

katakan, adalah kegagalan biografis. Memang Pak Natsir dan Masyumi tidak berkuasa lagi. Saya tidak mengatakan kegagalan historis. Kita kan bicara Natsir, jadi biografi yang saya ceritakan, bukan sejarah perjuangan umat.

Karena itu, juga tidak benar apa yang dikatakan oleh AM. Saefudin yang mengatakan bahwa sejarah itu kontinyu. Itu kata kita, kita hidup terus-terusan kalau begitu. Dalam konsep Islam pun membedakan antara *darul harb* dan *darul Islam*. Sejarah bisa dipecah-pecah, tidak benar itu. Sejarah penuh dengan *discontinuity* tapi ini soal filsafat sejarah.

Kita juga harus bisa membedakan, ada kalanya seseorang kalah dalam pertempuran, tapi menang dalam perang. Bisa saja kalah dalam biografi tapi menang dalam sejarah. Setiap orang punya sejarah, selalu membedakan benar dan jelas, antara pertempuran dan perang. Orang bisa kalah dalam pertempuran, itu kan suatu event, suatu peristiwa, suatu kejadian tapi menang dalam perang. Seperti revolusi Indonesia ini, berapa kali tentara kita kalah dalam pertempuran. Artinya, berapa banyak kota-kota yang diduduki, itu kan kalah namanya dalam pertempuran, tapi akhirnya kedaulatan kembali ke tangan Indonesia, perang dimenangkan. Itu harus dibedakan benar. Kalau tidak, kita kacau dalam konsep.

Jadi sekali lagi saya katakan, supaya saya tidak dibilang sinisme, kita terpaksa harus membedakan fase-fase. Aristoteles memang membedakan mana yang tragis dan mana yang tragedi. Tragis adalah sesuatu yang menyedihkan. Kita sedih ketika seorang ibu dimakan oleh singa dan anaknya menangis. Sedang tragedi adalah suatu peristiwa yang menyedihkan. Sejarah manusia bisa dikatakan penuh tragedi, ketika manusia itu gagal tapi tidak bisa dimusnahkan. Revolusi Indonesia penuh dengan tragedi tetapi toh dimenangkan. Tragedi adalah kisah — kisah yang tidak pernah dimenangkan, tetapi tidak bisa dikalahkan.

Saya tidak mengatakan Pak Natsir idealis dalam artian pemimpi. Mana bisa seorang pemimpi jadi Ketua ini Ketua itu, dia memang idealis. Kalau dia pemimpi dia *historis of begining* pertama. Saya katakan dia seorang idealis dalam pengertian filosofis, yakin akan kekuatan kesadaran iman, tauhid. Tidak realitas yang materialistik yang akan menguasai sejarah ini, karena itu selalu dia katakan peneguhan iman, aqidah dan segala macam.

Saya pernah bertemu Pak Natsir, dan dia mengingatkan bagaimana aqidah kita pertahankan untuk menciptakan realitas baru. Itu yang idealis dan ini sudah ada dalam pemikiran tradisi filsafat lama. Idealisme yang dihantam oleh Karl Marx. Pak Natsir jelas bukan pengikut Karl Marx, karena dia tidak pernah cocok dengan komunisme, karena komunis anti idealis. Pak Natsir memang seorang idealis, bukan seorang pemimpi.

Kedua, saya bilang dia seorang idealis karena dia menciptakan sesuatu, *perfection of the society*, suatu masyarakat yang sempurna. Kesempurnaan masyarakat yang dia perjuangkan. Karena itu, berbagai macam kegagalan bisa dia alami. Perfection itu sesuatu yang payah mengejanya, karena itu perfection bisa diwujudkan dalam berbagai macam.

Soal marginal, saya tidak mengatakan dia memarginalkan diri, dia dimarginalkan. Saya memakai kata-kata yang lebih tinggi supaya tidak terlalu benar bahwa Pak Natsir sebagai Petisi 50.

Pertanyaan saudara Lukman tidak semua bisa saya jawab, karena ini juga tidak masalah. Soal perjanjian Linggarjati juga telah saya pelajari. Jangan terlalu dikontraskan, mana yang menentang dan mana yang pro dengan Linggarjati. Memang dinamika politik kita di masa revolusi adalah bagaimana harus berhadapan dengan Belanda. Berbagai kemungkinan terbuka antara orang yang menentang Linggarjati dan yang mau berunding.

Umumnya mereka yang tergabung dalam persatuan perjuangan yang dipimpin Tan Malaka yang menuntut supaya kita berunding dengan Belanda, tapi haruslah dengan dasar perlakuan kemerdekaan 100%, dengan tujuh program itu. Mengapa kelompok ini menuntut harga tinggi? Karena mereka juga percaya kepada rakyat. Mereka percaya kalau kita melawan Belanda kita bakal menang. Pak Sukiman dan Wibisono juga percaya, kalau kita perang kita akan menang.

Orang seperti Sjahrir, Natsir, Sjafruddin dan Roem akan mengatakan kita kompromi dulu, nanti pada waktunya kita adakan plebisit. Ini juga bertolak pada rakyat. Kalau plebisit kita pasti akan menang. Jangan dikontraskan benar seakan yang pro perjuangan itu yang paling berani, paling nasionalistis, diplomasi. Keduanya bertolak dari rasa kepercayaan pada rakyat. Kita sekarang bisa bertanya pada akhirnya, strategi bagaimana yang akhirnya menentukan, apakah kedaulatan kembali diakui.

Tentang keluarnya Masyumi dari Kabinet, itu setelah Pemilu. Masalah terpenting pada waktu itu adalah masalah penggarapan tanah di Sumatera Utara. Secara politis akan bagus kiranya kalau penggarapan tanah itu dibela. Tapi repotnya, pemerintah telah memberikan komitmen bahwa tanah perkebunan itu harus dikembalikan kepada pemilik sebelumnya, yaitu perusahaan-perusahaan Inggris. Maka timbul masalah integritas dalam politik, kejujuran dalam politik.

Dalam hal ini Masyumi, sepanjang yang saya ingat, akhirnya memilih bukan politik tetapi integritas dalam politik, kejujuran dalam politik. Kalau sekiranya Masyumi mempertahankan berpolitik *possesif of politic* barangkali menang, tapi menang yang dalam jangka pendek, *shortterm*. Itulah salah satu sebab mengapa saya katakan akhirnya Pak Natsir dan bukan hanya pada dia. Barangkali yang paling penting agama itu adalah sumber dari identitas dan tidak bisa tujuan menghalalkan segala cara.

Itu sisi dilema dari setiap partai politik yang berdasarkan agama, tidak hanya di Indonesia. Sebab agama bertolak dari hasrat untuk mewujudkan kesucian di permukaan bumi ini. Dalam politik berbagai hal harus ditemui, apakah kejujuran, integritas politik harus dipaksakan, atautkah keharusan politik, *political nationality* yang harus berbi-cara. Kadang-kadang, dilema yang tidak mudah teratasi, memilih *political nationality* itu berarti mengkhianati integritas, integritas ajaran.

Kalau integritas ajaran dikhianati, legitimasi dari partai sudah hilang secara moral. Kalau integritas politik yang diikuti maka kenyataan politik bisa berbicara lain. Itu dilema yang selalu ada dan dihadapi partai politik yang berdasarkan agama. Apalagi partai politik yang dipimpin oleh orang yang mempunyai integritas tinggi. Karena itu saya katakan, dia orang yang idealis di mana kemenangan akhirnya bisa ditegakkan. Bukan idealisme dalam hal pemimpi tapi idealisme keyakinan bahwa tauhid, aqidah, iman, akhirnya akan mendapatkan kata terakhir.

Masalah Masyumi dibubarkan, setahu saya, ya, dibubarkan. Kalau sekiranya Masyumi membubarkan diri, Prawoto tidak punya hak men-cak-mencak setelah Orde Baru, minta supaya Masyumi dikembalikan. Tapi karena dipaksa bubar, dia menganggap pembubaran Masyumi itu tidak legal, tidak sa, karena itu harus ditarik lagi. Tapi Pemerintah Orde Baru tidak setuju. Jadi memang hal yang sederhana. Prawoto

calon ahli hukum, tahu benar itu beda antara dibubarkan dan membubarkan. Kalau membubarkan, almarhum Prawoto tidak berhak, tapi ia ingin Masyumi dihidupkan lagi.

Jawaban Dr. Ichlasul Amal:

Saya ingin menggambarkan keadaan psikologis Pak Natsir yang kita lihat dalam segala hal selalu konsisten dengan pandangan dan sikap kebangsaannya. Tetapi pada saat itu, ketika beliau harus pergi ke Sumatera Barat dan itu adalah satu-satunya pilihan, tampak sikap Pak Natsir tidak konsisten dengan pandangan kebangsaan.

Ini yang saya katakan dengan goncangan tadi. Dan saya kira setiap orang pada suatu saat, apalagi sebagai politisi menghadapi suatu dilema yang sulit sekali. Tetapi saya gambarkan juga, walaupun dalam keadaan yang demikian, beliau tetap, misalnya, di dalam pertemuan sungai Dareh, masih menekankan kepada teman-temannya agar tidak lepas dari negara Indonesia secara keseluruhan.

Tentang kegagalan, memang demikianlah bagi seorang dalam menganalisa, sering kali sulit kita mau menamakan apa. Mungkin bisa kita namakan "belum berhasil". Tetapi sama saja sebenarnya, cuma eufimisme. Kalau saya katakan itu kegagalan, karena memang justru bisa kita lihat. Di dalam merealisasikan keyakinannya, kita bisa katakan Pak Natsir belum berhasil.

Drs. Lukman Harun:

Dalam berpolitik ada kalah dan ada menang. Masyumi pernah berkuasa kemudian tidak berkuasa lagi. Begitu juga partai-partai Islam seperti Parmusi, kemudian hancur lagi, itu biasa. Suatu hari saya tanya Pak Natsir, "Pak Natsir, kenapa dalam politik kita kalah?" Jawabnya, "Karena kita ikhlas dalam politik".

Pak Natsir kalah dalam berpolitik, Masyumi kalah, Parmusi kalah dan akhirnya hilang dari peredaran. Itu kan suatu kekalahan bukan kemenangan. Jadi ini informasi saja, bukan dukung Taufik. Saya tidak mengatakan kegagalan, kalah saya bilang. Kalau kita menang, kita akan terus. Kita tak berkuasa yang lain berkuasa.

Saudara Ichlasul, saya mau tanya, apa sih alasan Pak Natsir pergi

dari Jakarta ke Sumatera Barat. Hal apa yang mendorong beliau meninggalkan Jakarta dan kenapa beliau bergabung bersama PRRI yang kemudian menjadi RPI. Dan apa betul Pak Natsir tidak pernah jadi menteri? Apa alasan beliau memilih sikap demikian?

Drs. H.A.M. Fatwa:

Saya terpancing oleh rekan A.M. Syaefuddin yang menyinggung keikutsertaan Pak Natsir dalam Petisi 50. Ketika ramai-ramainya Petisi 50 mendapat tekanan, teror dan sebagainya, banyak keluarga besar Bulan Bintang menyesalkan dan menuduh Pak Natsir itu sebenarnya ikut-ikutan, tidak sadar tanda tangan ketika Fatwa datang menyodorkan di depannya.

Sebenarnya, Pak Natsir itu sudah menjelaskan ke beberapa lingkungan, tidak benar dia tanda tangani itu di dalam keadaan tidak sadar atau terkecoh. Beliau dengan sadar dan sudah terpikir. Kemudian banyak tokoh angkatan 45 dan berbagai tokoh-tokoh nasional disodorkan dan tanda tangan. Peristiwa ini juga mempertemukan beberapa tokoh yang selama ini agak jarang bertemu Jendral Nasution dan sebagainya. Menjelang akhir hayatnya Pak Natsir menegaskan, biar bagaimanapun Petisi 50 itu telah menjadi sejarah.

Pak Natsir itu gemar memberi katebelece. Pak Natsir sering dikritik oleh beberapa orang muda yang melihat beliau menerima tamu tidak putus-putusnya, sampai malam. Tamu siapa saja tidak dibeda-bedakan. Pasti diterima bergiliran. Mulai urusan taman kanak-kanak pun dikasih katebelece. Tetapi juga jangan dilupakan, katebelece nya di dalam urusan besar nasional dan internasional. Ali Murtopo yang dianggap arsitek Orde Baru pernah dikasih katebelece oleh Pak Natsir untuk bisa bertemu dengan Tengku Abdurahman. Itu andil besar untuk memulihkan dua rumpun negara dengan segala dampak nasional dan internasionalnya.

Dalam lingkungan pemerintahan kita dengan Jepang, di mana sekarang kita ini punya banyak berhutang budi pada Jepang, beliau itu merintisnya. Jadi kalau saya meminjam kata-kata Pak Anwar Haryono, Pak Natsir itu banyak kelemahannya tetapi juga di balik kelemahannya itu justru tersimpan kekuatan.

Menyambung pembicaraan Pak Lukman Harun atas pertanyaan langsung kepada Pak Natsir, mengapa kita banyak kalah di dalam

perjuangan? Dan sudah dijawab, katanya karena kita barangkali terlalu ikhlas. Saya tidak tahu apakah bisa dijadikan contoh di dalam susunan Kabinet pimpinan Pak Natsir. Saya perhatikan di sini lima non Islam. Bagaimana jiwa besar beliau. Saya pernah juga melihat Pak Natsir mengirim bunga kepada seorang tokoh pemuda Katolik karena simpati terhadap konsistensinya dia mewarisi sifat-sifat perjuangan rekan Pak Natsir dalam perjuangan politik.

Masyumi punya tokoh Sukiman dan Natsir. Barangkali kita bisa tercermin dalam pertanyaan saya ini. Mengapa Pak Natsir kelihatannya lebih dekat kepada kalangan PSI, sedangkan Pak Sukiman lebih dekat kepada kalangan PNI.

Victor Matondang:

Saya pikir sumbangan Pak Natsir paling besar adalah motivasinya dan inspirasinya dari keislaman yang dia gali dan kembangkan. Saya menanyakan kepada Pak Natsir karena Djoko Sutono pernah memberi kuliah yang mengatakan Pak Natsir itu menunjukkan kenegaraan dan bukan politisi. Ini saya tanyakan pada Pak Natsir. Pak Natsir bilang, umat yang memilih saya, mengamanatkan, lalu saya memperjuangkan dasar Islam dalam konstituante, itu syah.

Saya tanyakan, katanya dulu waktu bapak jadi Perdana Menteri tidak pernah setuju Pak T.B. Simatupang diangkat sebagai kepala staf, tapi setelah Dr. Sukiman menjadi Perdana Menteri, baru diterima. Pak Natsir menjawab: "Saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri, selalu bersama." Kita dengar, Pak Nasution juga tidak menghardi pelantikan T.B. Simatupang. Ibu Nasution yang disuruh, beliau pergi ke Jawa Barat yang pada waktu itu menghadapi DI/TII.

Dr. Yusril Ihza Mahendra SH:

Saya kira sayang sekali dalam sesi yang membahas tentang agama dan Nasionalisme ini, Taufik ataupun Ichlasul tidak menggunakan sumber primer tulisan Pak Natsir mengenai masalah itu. Ada beberapa tulisan Pak Natsir yang relevan membahas Islam dan Nasionalisme. Satu buku terbit pada 1932, judulnya *Risalah Debat Kebangsaan*. Debat tiga fihak antara Pak Natsir dan A. Hasan melawan Mochtar Lutfi, pemimpin Permai. Di sini terlihat gagasan-gagasan Pak Natsir untuk mendamaikan ide-ide universalis Islam dan ide-ide kebang-

saan. Buku kedua, pada 1938 Pak Natsir menulis satu risalah judulnya *Dengan Islam Keindonesiaan Mulya*. Dia mulai mengkritik pandangan-pandangan Ir. Sipatuhar pada waktu itu yang menolak Islam dan menekankan pada kebangsaan.

Sumber-sumber semacam ini saya kira penting untuk kita gunakan dalam melihat bagaimana wawasan Pak Natsir mengenai masalah Kebangsaan. Saya menangkap dari tulisan-tulisan itu bahwa Pak Natsir mencoba untuk mendamaikan gagasan-gagasan Universal Islam, yang dianggap tidak nasionalis karena Universal, berhadapan dengan Kebangsaan. Ide Pak Natsir selalu merujuk kepada Surah *Al-Hujurat* yang mengakui eksistensi suku-suku dan bangsa-bangsa, tapi menolak adanya nasionalisme yang mengarah kepada *Ashobiyah* dan menolak kebangsaan yang mengarah kepada *chauvinisme*.

Bagi Pak Natsir, kebangsaan adalah sesuatu yang fitrah dan alamiyah, jika manusia mencintai tanah air, tempat lahir dan dia dibesarkan oleh tanah airnya. Tetapi ide-ide universal Islam harus menjadi atau memberi nafas pada faham kebangsaan itu. Jadi sebetulnya, ada upaya untuk mendamaikan kedua pandangan ini.

Pertanyaan Lukman, Syaefuddin yang tidak dijawab oleh Pak Taufik dan Pak Ikhlusal Amal dan saya perlu tambahkan mengenai sikap tokoh-tokoh Masyumi ketika Sjahrir menjadi Perdana Menteri. Lukman mengatakan Sjahrir bekerjasama dengan Van Mook. Saya kira tidak bekerjasama, tapi Sjahrir waktu itu membuka perundingan dengan Van Mook di Gedung Dirjen Perla di depan stasiun KA Gambir. Memang, sikap orang-orang Masyumi berbeda-beda. Saya kira bukan hanya soal perundingan Sjahrir saja.

Masyumi di bawah pimpinan Sukiman di Yogya menolak. Masyumi secara resmi terlibat di dalam Kabinet Sjahrir tetapi memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya secara pribadi untuk duduk di dalam Kabinet, termasuk Pak Natsir yang juga ikut di dalam Kabinet.

Pak Natsir dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Fakultas Kedokteran UI, pada Nopember 1945, menolak perubahan Kabinet Presidential menjadi Parleментар. Walaupun kemudian, Pak Natsir melihat itu bukan satu soal yang prinsipil. Parleментар atau presidential itu soal keperluan saja, katanya, dan beliau juga menerima pengangkatannya sebagai Menteri di ruang Kabinet.

Bahwa Sjahrir berunding dengan Van Mook dan kemudian menyepakati azas-azas sebagaimana dituangkan dalam Linggarjati, bahwa Indonesia akan menjadi Republik Indonesia Serikat. Tapi dengan cara itu Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Pikiran Pak Natsir pada waktu itu menganggap perjuangan ini tidak dapat dicapai dengan segera.

Tulisan Pak Sjafruddin di *Berita Indonesia*, 5 Februari 1946, menganggap kita tidak mungkin akan mengalahkan Belanda dengan cara kekerasan. Dan karena itu, perundingan merupakan satu-satunya yang paling mungkin. Mereka menyokong untuk berunding, sedangkan pengurus Besar Masyumi di Yogya pada waktu itu, menolak politik perundingan.

Pak Natsir pikir Republik Indonesia Serikat (RIS) atau apa pun, tapi cita-cita kita tetap negara kesatuan. Jadi kita terima dulu bentuk serikat, dan nantinya mudah bentuk serikat itu kita hancurkan. Tapi kalau Belanda sudah menyerahkan kedaulatan kepada kita, maka kedaulatan itu tidak dapat dicabut lagi. Soal RIS itu soal yang dapat kita selesaikan dengan mudah. Dengan dasar itu mengapa kemudian Pak Natsir dapat menerima pandangan-pandangan Sjahrir untuk berunding dengan pihak Belanda.

Soal Masyumi membubarkan diri atau dibubarkan. Memang masalah ini sering jadi polemik. Kalau kita membaca Keppres 200/15 Agustus, 1960, dalam Keppres itu jelas dikatakan dengan menunjuk kepada peraturan pemerintah No. 7, 59, bahwa Masyumi, sebagian tokoh-tokohnya terlibat dalam pemberontakan, itu sesuai dengan fatwa Dr. Wiryono Projodikuro, ketua Mahkamah Agung, pada waktu itu.

Memang Masyumi sudah dibubarkan dengan Keppres No. 200/60, tetapi pelaksanaan pembubarannya dilaksanakan oleh Masyumi sendiri. Dikatakan Pak Prawoto pada waktu itu, ibarat vonis hakim. Vonisnya Masyumi sudah dihukum mati, tetapi eksekusi hukum mati itu diserahkan kepada si tervonis itu sendiri. Jadi dalam Keppres 200 dikatakan, jika dalam waktu tiga bulan Masyumi tidak membubarkan diri, maka Masyumi dinyatakan sebagai partai terlarang. Sebelum tiga bulan terakhir, Pak Prawoto membubarkan Masyumi.

Memang sudah dibubarkan secara hukum dengan Keppres 200 tapi pelaksanaan pembubaran dilakukan oleh Masyumi sendiri.

Statementnya ditandatangani oleh Pak Prawoto dengan Pak Yunan Nasution. Tidak terlalu salah kalau dikatakan dibubarkan, tapi tidak salah juga kalau dikatakan membubarkan diri. Kalau tidak ada statement pembubaran diri, maka Masyumi akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Dengan cara itu tidak benar orang menyatakan Masyumi partai terlarang. Yang mengatakan Masyumi partai terlarang itu PKI sebenarnya, walaupun sekarang ini masih banyak orang mengatakan Masyumi partai terlarang. Dengan tindakan Pak Yunan dan Pak Prawoto, Masyumi bukan partai terlarang.

Soal Masyumi keluar dari Kabinet Ali sehingga dengan tindakan itu PKI kemudian jadi besar. Saya kira Kabinet Kaki Empat itu bukan kabinet sesudah Ali. Sukarno sudah menginginkan Kabinet Kaki Empat walau PKI tidak masuk ke dalamnya. Dan memang persoalan-persoalan yang prinsipil di mana Masyumi anggap tindakan Ali sudah tidak dapat mereka terima ialah policy gerakan-gerakan daerah. Masyumi anggap masalahnya sudah selesai di masa Kabinet Pak Burhanuddin Harahap.

Tapi makin parah di zaman Kabinet Ali dan orientasinya makin sangat kejawa-jawaan dan perpecahan di dalam tubuh militer merupakan salah satu yang tidak dapat diatasi walaupun beberapa kali nasihat disampaikan oleh pimpinan partai kepada Kabinet Ali. Ali tetap tidak mau dengar dan beberapa kali keputusan-keputusan politik Kabinet Ali tidak diambil. Dan mengakibatkan Perdana Menteri Room dan menteri-menteri Masyumi mengeluarkan satu statement atau keluar dari Kabinet Ali.

Bapak Thamrin Manan:

Saya ingin mengetahui pandangan dan fikiran Pak Natsir mengenai Pancasila. Dari sebanyak rumusan Pancasila yang ada di negara kita ini, kiranya yang paling cocok, yang pernah saya baca yaitu pandangan Pak Natsir di dalam tafsir azas Republik Persatuan Indonesia. Tafsir azas Undang-undang Republik Persatuan Indonesia ini penting karena banyak pemuda kita yang tidak mengenal dan tidak tahu bahwa Pak Natsir ini seorang Pancasilais sejati.

Suatu kejadian, Pak Natsir dalam Konferensi Antar Umat Beragama, 1967-1968. Di situ terjadi pertentangan antara Islam dengan Kristen, khususnya dengan Pak Simatupang dan Pak Tambunan.

Tetapi di dalam hubungan pribadi, beliau-beliau itu sangat mesra. Ini betul-betul tauladan yang tidak ada duanya di dalam kita hidup bernegara.

Sebagai orang tua beliau pernah berjuang di Sumatera Barat dengan PRRI. Dia hitung satu-persatu nasi bungkus sekali makan dan dia hitung satu-persatu rumah yang ditempati, akhirnya dia rumuskan balas budinya itu di dalam bentuk proyek, yaitu proyek YARSI (Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat), Yayasan Kesejahteraan dan Yayasan Umat. Macam-macam lah yang beliau rumuskan di situ dalam tahun 1958. Itu konsep tentang *community development*, sebelum yang lainnya bicara tentang pembangunan desa, beliau lah perintisnya.

Beliau bukan sekedar politikus tapi juga seorang ekonom. Lebih utama lagi ketauladanan beliau. Kami bersama kawan-kawan pada waktu itu mendirikan sebuah lembaga, yaitu, lembaga pembela hak-hak azasi manusia. Anwar Harjono, Buyung Nasution, saya sendiri, juga akhirnya Princen.

Tauladan yang paling baik ialah menghadapi Soekarno, musuh bebuvutan. Bagaimana beliau disiksa, di Rumah Tahanan Militer (RTM) di Keagung. Setelah Orde Baru lahir beliau direhabilitir semua hak-haknya. Rumah diambil sehingga beliau tinggal di salah satu paviliun kecil di jalan Blora. Pernah seorang Menteri Belanda datang di paviliun itu dan saya hadir di situ, yaitu, Professor Cornellember, Presiden Direktur Pertama Garuda Indonesia.

Yang ingin saya sampaikan di sini, begitu Soekarno jatuh, banyak orang menggunakan kesempatan, melampiaskan seluruh perasaan. Tapi saya belum pernah mendengar Pak Natsir mencaci lawan-lawan politiknya. Itulah ketauladanan bagi siapa saja, untuk yang muda-muda tapi juga yang tua-tua ini.

Ibu Farida:

Tadi saya mendengar ungkapan Lukman Harun bahwa kita kalah karena ikhlas. Tapi soal kalah, saya teladani dari pemimpin-pemimpin kita Mohammad Hatta, yang selalu mengatakan biarlah kita kalah tapi untuk menang. Terbukti Mohammad Natsir yang dikatakan kalah tapi akhirnya menang, karena beliau tidak pernah mau kerjasama dengan PKI.

Jawaban Dr. Taufik Abdullah:

Sebagian besar yang diajukan hanya tambahan informasi dan banyak juga yang penting tetapi juga banyak yang salah tempat. Misalnya masih ada yang lain-lain tetapi lepas karena menggebu-gebu semangat ingin menyampaikan.

Sebenarnya, bagaimana usaha kita memahami pemikiran perjuangan seseorang yang telah diakui banyak orang, tapi tidak tergelincir kepada sentimental. Sebab kalau kita sudah mengakui orang itu besar, secara subjektif kita sudah pro dia. Kalau kita terlibat dalam perasaan, kita akan bertangisan sekarang. Karena itu, saya selalu dikritik karena terlalu dingin dan terlalu distance. Tetapi itu tugas saya.

Jadi, maaf saja kalau saya tidak mau terlarut dalam *sentimentality* terhadap tokoh. Kalau itu dianggap kesalahan, persetan dengan kesalahan itu dan saya tidak akan berubah dan saya akan tetap *cold* dan saya akan tetap distance dan cukuplah Bapak-bapak yang pencinta-pencinta yang melarutkan cintanya itu dalam syair dan sajak itu.

Ada satu hal yang selalu saya ingat. Saya juga pernah dikasih katebelece oleh Natsir ketika saya akan riset. Natsir kasih saya surat kepada Datuk Kalimakayo. Isinya, Datuk terimalah Abdullah ini, anak baik. Satu hal yang tidak pernah saya lupakan, dia bilang begini, "*jangan cupak diubah orang manggalaih jalan-jalan dialih urang lalu.*" Maksudnya, janganlah hakikat kita diubah orang lain, janganlah tujuan kita diubah oleh orang yang hanya lewat saja.

Jadi, apapun yang terjadi, bagaimanapun perubahan yang terjadi buat saya, realitis tekad itu. Tujuan harus jelas dari awal, karena itulah tidak heran berbagai kegagalan bisa dialami karena yang penting adalah seperti kata Lukman itu, keikhlasan. Itulah yang saya katakan dilema seorang tokoh politik, soal statement yang mementingkan *morality*. Dan terhadap Natsir dan Hatta bahkan juga terhadap Sjahrir, kita akan selalu berhadapan dengan etika dilema kalau terlibat dalam politik.

Kesimpulan akhir terhadap Natsir ini bukan sekarang, tapi nanti dan besok. Jadi Natsir begini Natsir begitu serahkan saja besok. Sekarang kita lihat adalah sejarah. Sejarah bukan hanya masa lalu tetapi juga sebuah negeri yang lain. Marilah kita bertamasya dengan penuh perhatian di negeri lain itu. Repotnya, negeri lain itu adalah juga bagian dari diri kita, karena itu kita harus terpaksa hati-hati atau

kalau tidak, kita akan terlibat dalam hal yang selalu tidak disenangi oleh Pak Natsir, suatu hal yang tidak selalu kita elakkan, yakni pengkultusan. Ketika pengkultusan terjadi, kita sudah tidak bisa mempelajari Natsir.

Jawaban Dr. Ichlasul Amal:

Alasan Pak Natsir meninggalkan Jakarta. Sebetulnya merupakan obsesi saya juga untuk mencari jawabannya ke beberapa orang, yang kurang lebih aktif pada saat itu. Saya tanyakan pada Professor Herbert Feith yang juga dekat dengan Pak Natsir. Ada jawaban yang penting, pada saat itu suasana Jakarta, terutama sekitar Pak Natsir sendiri, ada teror yang luar biasa. Sehingga banyak pendukung Pak Natsir mengharapkan Pak Natsir supaya meninggalkan Jakarta demi keselamatan dan kelangsungan Masyumi.

Keadaan memang sudah tidak bisa dihindari, teror dari bermacam-macam kelompok, bukan hanya dari PKI tetapi juga dari kelompok-kelompok yang tidak pakai nama. Jadi memang betul-betul teror politik dan teror fisik yang tidak bisa dihindari.

Itu yang bisa saya dapatkan. Tapi saya sendiri juga tidak sempat berbicara dengan Pak Natsir mengenai masalah ini, karena memang sulit untuk menjawab keadaan itu dari orang yang terlibat dalam masalah ini.

Natsir, Seorang Tokoh yang Universalis

Oleh: Dr. Nurcholish Madjid

Tulisan ini hanya renungan atau kesan pribadi saya karena saya tidak bisa mengklaim telah melakukan penelitian mendalam. Tapi kesan pribadi mengenai Agama dan kebijakan ini sudah saya geluti sejak saya menyadari persoalan yang kita hadapi yakni sejak masa aktif sampai sekarang.

Kesan pertama, Pak Natsir adalah seorang manusia, dan sebagai manusia beliau seorang humanis. Pengertian humanis di sini adalah bahwa Pak Natsir menampilkan diri di dalam nilai kemanusiaan dalam bentuknya yang penuh. Dan ini tentu saja karena beliau seorang muslim. Kalau saya sebutkan pertama adalah manusia kemudian muslim. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa kita sebelum menjadi muslim memiliki fitrah manusia. Sedang muslim hanyalah merupakan atribut formal.

Dan setiap orang, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dengan demikian kemanusiaan adalah primordial. Artinya ia sudah melekat pada diri kita sejak sebelum kita lahir. Kemusliman Pak Natsir inilah yang membuat kita bisa mengetahui bagaimana Pak Natsir melihat hubungan agama dengan kebijakan.

Ada suatu teori yang tak bisa dibantah ialah bahwa keyakinan seseorang mempengaruhi perilakunya, tidak saja dalam perilaku sehari-hari melainkan juga dalam sikap yang lebih besar seperti sikap politik, sosial, dan sebagainya. Karena itu, kita bisa menduga bahwa Pak Natsir sangat banyak dipengaruhi oleh keislaman beliau. Ini terbukti tidak saja dalam tingkah laku yang tercatat sebagai fakta sejarah. Melainkan juga dari warisan intelektualnya berupa tulisan-tulisan.

Ketika beliau manusia, yang kemudian menjadi integral kembali karena keislamannya, dengan menggunakan Islam sebagai sumber ilham tingkah laku. Maka kita dapati seorang Natsir yang sangat responsif terhadap perkembangan zaman. Karena itu hampir semua literatur Barat berkenaan dengan Natsir dan Masyuminya perkataan demokrasi dan keadilan sosial, tak pernah lepas.

Artinya, mereka ini adalah orang-orang demokrat yang memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial. Sehingga orang menyebut Masyumi adalah orang kiri muslim. Yakni orang yang memiliki komitmen yang sangat emosional terhadap cita-cita keadilan sosial. Saya kira, produk-produk Cornell banyak mendukung hal ini. Dan suatu ketika seorang orientalis bernama W. Montgomery Watt diundang menghadiri seminar tentang biografi nabi Muhammad di Islamabad, pertengahan 70 an. Salah seorang peserta ketika itu adalah Mohammad Natsir.

Ketika diminta kesannya tentang seminar ini didepan civitas sebuah universitas di AS, Watt menyatakan kekecewaannya terhadap peserta seminar, kecuali Natsir. Karena hanya Natsir saja yang mampu mengemukakan sosok Nabi yang memiliki kemampuan memberikan responsif terhadap perkembangan zaman. Malah, Natsir disebut Watt sebagai seorang akomodasionis kreatif. Suatu istilah yang bersayap. Natsir sendiri tidak setuju istilah itu.

Tapi yang dimaksud Watt bukanlah orang yang tak punya prinsip, melainkan orang yang tahu situasi dan kemudian melakukan adjustment seperlunya, maka Natsir disebut kreatif. Pengertian akomodasi di sini pun bukan akomodasi pada pemerintah melainkan responsif pada zaman.

Lalu melihat argumen Natsir yang dijabarkan dalam tulisannya tentang demokrasi, barangkali sudah tidak asing. Tapi di tangan Natsir, demokrasi mempunyai dimensi dan interpretasi yang luas seperti misalnya musyawarah. Salah satu kata-kata kunci wawasan politik yang dikembangkan oleh Natsir adalah syura (musyawarah) sebagai konsep demokrasi.

Syura dalam pandangan Natsir yang belakangan diterjemahkan sedemikian rupa, sehingga banyak sekali kecocokan dengan konsep demokrasi modern. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa Natsir adalah seorang demokrat modern. Yaitu memberikan setiap orang mempunyai hak untuk kebebasan bicara dan menyatakan pendapat serta menghargai pendapat ini.

Sejak semula orang-orang Masyumi, di mana Natsir idolanya, sangat artikulit terhadap masalah hak azasi, dan memang sejak semula mereka sangat sensitif terhadap hak azasi. Dengan demikian, saya kira motif perlawanan Natsir terhadap Bung Karno beberapa waktu yang lalu, adalah lantaran Bung Karno dianggap sebagai orang yang merampas hak azasi itu.

Saya melihat, Natsir orang yang optimistis menghadapi zaman, tak takut modernisasi. Natsir sendiri tampil sebagai Bapak modernis Islam di Indonesia. Saya sering mengemukakan bahwa Bapak Modernitas di tanah air adalah Haji Agus Salim. Tapi Natsir penerus yang paling konsisten. Alasannya adalah, antara lain karena Pak Natsir berpendidikan modern. Anasila terakhir, Natsir dengan Masyumi adalah merupakan suatu kelompok, kalau dilihat dari sosiologi, adalah kelas intelektual lapis pertama terbaik di tanah air.

Beliau-beliau ini adalah kelompok orang terbaik hasil episode Belanda dalam arti positif. Apalagi mereka kemudian menjadi universalis. Tanpa menjadi nasionalis yang atavisme dan nativisme. Saya tetap melihat Natsir sebagai nasionalis. Buktinya beliau maju dengan mosi integral pada tahun 1950 an dan kemudian diberi kesempatan membentuk kabinet.

Tapi dari celah polemik dengan Bung Karno dan lainnya berkenaan dengan Nasionalisme. Kelebihan Natsir dari yang lain adalah Natsir bebas dari Atavisme dan Nativisme. Atavisme adalah segala sesuatu dari masa lalu, yang selalu otentik baik. Pak Natsir tidak melihat bahwa apapun yang diwariskan masa lalu selalu baik. Dan tidak juga beranggapan faham yang berasal negeri sendiri adalah baik.

Namun sifat universalitas Natsir inilah yang justru mungkin menjadi sumber kegagalan beliau. Yaitu ketika beliau menjadi universalitas, dengan cita-citanya yang tinggi, beliau seolah mengawang di angkasa dan tak berpijak pada realitas kultural mayoritas, terutama suku Jawa. Dan sepak terjang seorang universalis sebagai seorang yang berkeinginan membentuk masyarakat sedemikian ideal menjadi bagai lampu pijar di tengah lautan. Tapi karena tak berpijak pada kultur yang ada di Indonesia, maka beliau tak bisa mengalahkan Bung Karno.

Tanpa mengabaikan segala kebaikan Pemerintah sekarang, kita harus mengakui bahwa kita menemukan kesulitan yakni kita kehilangan orientasi pada nilai-nilai universalitas. Misalnya kebebasan, hak azasi, dan nilai-nilai yang mestinya sudah kita serap dengan baik,

setelah sekian lama merdeka namun tercerer. Demikian pula conflict of interest yang tak ada di dalam nativisme. Di samping kurangnya kesadaran bahwa mengorbankan untuk kepentingan keluarga di atas kepentingan nasional adalah tindakan yang tak sesuai dengan etika demokrasi modern.

Suatu thesa yang omong kosong adalah seandainya Natsir dengan cita-citanya yang tinggi juga mampu menerapkan konteks kultural setempat dalam titik rata-rata pola kultural Indonesia dari segi politik praktis, barangkali kita bisa melihat Natsir yang sukses.

Tentang Agama dan Ideologi. Natsir melihat agama dengan total yang menunjukkan ketulusan beliau. Tapi di sini saya sedikit berbeda dengan beliau. Ketika Natsir mengatakan bahwa Agama adalah Ideologi.

Menurut saya, agama adalah sesuatu yang lebih tinggi dari Ideologi. Bisa menjadi sumber ideologi. Bahkan harus menjadi sumber ideologi bagi pemeluk agama. Tapi agama sendiri tidak boleh didegradasi sebagai ideologi. Memang ini masalah rumusan apa yang dimaksud ideologi.

Karena itu, seorang Muslim harus berideologi berdasarkan Islam. Tapi bukan Islam itu yang ideologi. Karena di sini ada masalah interpretasi, maka dalam ruang lingkup Islam yang besar, masih ada kemungkinan timbulnya berbagai ideologi. Bahkan, kadangkala bertentangan.

Pemahaman Islam seseorang, diwarnai situasi kongkrit pengalamannya dalam konteks sosial dan ekonomi. Meskipun secara sosial mungkin dibenarkan menurut kenyataannya. Kita pun boleh bertanya, sebetulnya pemahaman kita tentang agama didekte oleh masyarakat. Tapi menurut saya, kita harus mengangkat diri kita di atas situasi. Oleh sebab itu, jangan sampai karena kita merasa beruntung, maka agama kita adalah jenis agama yang mendukung keberuntungan kita. Sebab kenyataannya, sepanjang sejarah memang begitu. Lihat saja faham Jabariah yang didukung habis-habisan oleh rejim Bani Umayyah. Karena Jabariah mentolerir kekuasaan rejim Umayyah. Menjawab oposisi Hasan al Bisri, Umayyah menjawab, "Apapun yang kami lakukan adalah atas kehendak Tuhan".

Jadi Agama masih memberikan ruang munculnya ideologi. Oleh sebab sangat memungkinkan timbulnya pertentangan. Maka lahir

ideologi Jabariah, Kadariah dan sebagainya. Dan di zaman Modern, tidak sedikit orang Islam, karena situasi tertentu, mengambil Islam sebagai sumber faham sosialisme. Sebagaimana Cokroaminoto yang pernah menulis Islam dan Sosialisme.

Bagi kita yang relevan sekarang adalah Islam sebagai agama yang mendukung enterprenurship. Ini tidak salah, sebatas pengetahuan kita tentang agama sesuai konteks kita. Tapi agama sendiri lebih tinggi dari apa yang kita fahami. Karena itu bukan ideologi. Ideologi adalah ketika kita mendukung enterprenurship, dan ketika kita mendukung inisiatif sebagai sesuatu yang berharga.

Suatu hal yang dikagumi dari Natsir adalah komitmennya terhadap keadilan sosial. Masyumi menghormati hak pribadi, anti feodalisme, anti kolonialisme. Itulah sebabnya mengapa orang mengatakan bahwa Masyumi adalah orang kiri muslim. Orang yang memperjuangkan keadilan sosial, memperjuangkan hak pribadi dan berhadapan dengan sistim feodalisme yang bercampur atavisme dan nativisme.

Berbicara tentang kontroversi dari segi legitimasi politik. Ijinkan saya menyempatkan diri mengungkapkan anekdot pribadi. Saya bisa mengklaim bahwa saya tumbuh dari keluarga yang sangat Masyumi tapi hanya dalam Politik, tapi dalam agama saya sangat Nahdatul Ulama (NU). Ayah saya dekat Hasyim Asyhari, Ayah tetap bertahan di Masyumi ketika Paman-paman saya keluar dari NU, dan menyusul keluarnya NU dari Masyumi, 1952. Ayah saya bersikap demikian karena setia pada Hasyim Asyhari yang pernah menjadi Rois Akbar Masyumi.

Hasyim Asyhari pernah membuat statemen yang menyatakan bahwa Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam yang sah. Menurut ayah saya ini fatwa tapi menurut saya ini merupakan statemen belaka. Dan rupanya ini tetap dipegang teguh ayah saya maka ia tak mau keluar dari Masyumi. Mengenai masalah legitimasi kepemimpinan. Paman saya kalau menggugat ayah saya selalu mengatakan, "Anda ulama tapi pemimpin Anda orang sekolahan." Maksudnya, Pak Natsir Cs itu orang sekolahan. Artinya, dibalik ini mereka tidak mengakui keabsahan mereka ini sebagai pemimpin Islam.

Oleh sebab itu, keluarnya NU dari Masyumi bukan karena kedudukan tapi menyangkut masalah legitimasi politik. NU beranggapan bahwa Islam harus dipimpin oleh ulama bukan orang sekolahan. Ayah saya menjawab, sebagaimana sering diutarakan Masyumi

pada setiap saat, terutama dalam kampanye, mengutip al-Quran, "Kalau suatu perkara diserahkan pada bukan ahlinya, tunggu saja saat kehancuran." Ayah saya berpendapat, masalah Politik diserahkan pada orang yang ahli politik, yakni Masyumi. Soal agama diserahkan pada ahlinya, seperti orang Tebu Ireng.

Dalam perjuangannya, tampak ada kesan bahwa Pak Natsir mewakili kelompok sosial yang tidak meliputi semua kelompok lapisan masyarakat, melainkan mewakili kelas menengah. Secara geografis, mereka adalah orang yang tinggal di kota-kota sedang. Ini merupakan basis Masyumi yang kemudian sangat banyak dikaitkan dengan entrepreneurship, kewirausahaan pribumi.

Sekarang kita melihat suatu kerugian luar biasa. Ketika Orde Baru pertama kali muncul, semestinya, alangkah baiknya kalau waktu itu, program pembangunan digarap oleh orang entrepreneurship yang jenius. Tapi ini tidak berjalan, karena ada gap kredibilitas politik yang sampai sekarang masih kita rasakan.

Mohammad Natsir dan Sayyid Abul A'la Maududi Telaah Tentang Dinamik Islam dan Transformasinya ke Dalam Ideologi Sosial dan Politik

Oleh: Dr. Yusril Ihza Mahendra

Pendahuluan

Jika kita melihat kepada Islam sebagai sebuah agama finalitas, maka salah satu persoalan kritis yang mungkin akan mengusik kita ialah, bagaimanakah doktrin agama yang diyakini telah bersifat final itu akan mampu membuat dirinya relevan dengan situasi dunia yang berubah?

Dilihat dari asumsi teoritis, tak mungkin akan ada doktrin agama yang statis jika agama itu ingin terus menerus menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Agama Hindu dan Sikh membenarkan hal ini. Dalam sistem kedua agama ini, setiap waktu mungkin saja muncul tokoh-tokoh baru yang akan mengembangkan doktrin-doktrin baru, namun tetap berada dalam kerangka sistem keagamaan yang telah terbentuk. Islam menolak kehadiran tokoh-tokoh "revisionis" seperti itu, seperti nampak dalam penolakan mayoritas kaum Muslimin atas Mirza Ghulam Ahmad yang mendakwakan diri sebagai seorang nabi.

Bagaimanakah cara paling mudah untuk melihat dinamik doktrin sebuah agama?. Salah satu cara yang mungkin ialah melihat agama dan konteks sosialnya. Doktrin adalah nilai-nilai yang bersifat abstrak. Tetapi, ketika sebuah komunitas agama menggunakan simbol-simbol keagamaannya dalam suatu gerakan sosial dan politik, maka wajah agama itu akan tampak dalam wujudnya yang kongkrit.

Jadi, dalam konteks sosial dan politiknya, dinamik Islam nampak dalam usaha umatnya untuk terus menerus melakukan transformasi doktrin dalam menghadapi dunia yang berubah. Doktrin sendiri memang mendorong proses transformasi itu. Sementara perubahan suasana sekitar juga seakan memancing keharusan transformasi itu.

Tetapi proses transformasi adalah persoalan elit. Karena itu pribadi tokoh-tokoh yang melakukan proses transformasi itu juga memberikan andil kepada corak transformasi yang dilakukannya. Sementara suasana persekitaran yang berbeda, juga akan melahirkan bentuk-bentuk transformasi doktrin ke dalam rumusan-rumusan ideologis yang berbeda satu sama lainnya. Dengan asumsi teoritis seperti ini, mungkin dapat dikatakan memang hanya ada satu Islam sebagai doktrin.

Namun manifestasi ideologis Islam — sebagai hasil sebuah usaha transformatif — akan tampil dalam wajah yang mengandung nuansa-nuansa yang berbeda. Kalau demikian halnya, menyamaratakan semua gerakan-gerakan politik Islam dan menempatkannya ke dalam satu kotak kategori tertentu, adalah suatu kekeliruan yang mendasar. Adakah bukti-bukti empiris untuk menyokong rumusan-rumusan teoritis ini?

Kita akan melihatnya dalam kasus transformasi doktrin ke dalam ideologi sosial dan politik seperti dilakukan oleh Muhammad Natsir dan Sayyid Abul A'la Maududi.

Kasus Natsir dan Maududi

Natsir dan Maududi adalah dua tokoh sezaman yang sama-sama dikenal luas di dunia Islam. Tetapi kedua-duanya lahir dan hidup dalam suasana persekitaran sosial dan politik yang berbeda.

Natsir (1908-1993) lahir di Indonesia dan bergerak dalam konteks Indonesia. Maududi (1903-1979) lahir di India, dan kemudian "hijrah" ke Pakistan.

Natsir menempuh pendidikan Barat namun mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh. Maududi sepenuhnya, menempuh pendidikan tradisional Islam, namun cukup luas menela'ah literatur-literatur Barat secara otodidak. Kedua-duanya sama-sama aktif dalam pergerakan Islam.

Natsir tampil menjadi ketua Masyumi, partai Islam terbesar di Indonesia — dan juga di dunia — pada zamannya. Maududi menjadi

ketua Jama'at-i-Islami, partai Islam bercorak elit dan beranggota relatif sedikit (tahun 1958 anggota partai ini berjumlah 1258 orang). Bedanya, Natsir dan Masyumi terlibat langsung ke dalam politik. Masyumi pernah memegang kekuasaan politik di Indonesia. Sebaliknya, Jama'at-i-Islami selamanya menjadi partai "marginal" baik di India maupun di Pakistan.

Maududi sendiri tak pernah memegang jabatan politik formal. Ia dan partainya lebih banyak memainkan peranan sebagai kelompok oposisi dan kelompok penekan dalam sejarah politik Pakistan. Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Jama'at-i-Islami ikut dibubarkan oleh Jenderal Ayyub Khan bersama seluruh partai di Pakistan pada tahun 1958 (namun dihidupkan kembali pada tahun 1962). Usaha merehabilitasi Masyumi setelah kejatuhan pemerintah Presiden Soekarno tidak berhasil. Secara resmi Masyumi sudah tidak ada lagi. Namun sebahagian ide-idenya nampak masih tetap hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Kasus Natsir dan Maududi, agaknya relevan untuk menunjukkan bagaimana dinamik doktrin Islam ke dalam realitas sosial dan politik dalam dua masyarakat yang berbeda. Dinamik itu, sekaligus menunjukkan bagaimana Islam yang ditampilkan dalam bentuk ideologi dan perilaku politik dapat menimbulkan nuansa-nuansa yang berbeda, karena adanya faktor-faktor tertentu yang mendorong terjadinya perbedaan itu.

Titik Tolak Pandangan: Natsir dan Maududi

Natsir dan Maududi sama-sama melihat Islam sebagai agama yang "lengkap dan sempurna". Tetapi pendekatan keduanya dalam menafsirkan doktrin mempunyai kecenderungan yang berbeda. Natsir lebih cenderung menafsirkan doktrin sosial politik Islam itu secara "elastis dan fleksibel". Sementara Maududi lebih cenderung menafsirkannya secara "rigit dan literalis".

Kedua kecenderungan titik tolak penafsiran ini, dalam kajian politik Islam kontemporer, sering dikategorikan sebagai kecenderungan ke arah "modernisme" dan "fundamentalisme". Natsir agaknya, dapat dikategorikan sebagai sosok dari tokoh modernisme politik, sementara Maududi agaknya dapat digolongkan ke dalam eksponen fundamentalisme politik Islam.

Latar belakang pendidikan yang berbeda dari kedua tokoh ini, serta perbedaan suasana sekelilingnya nampak mempengaruhi pendekatan yang berbeda ini. Natsir yang berpendidikan Barat dan berguru kepada ulama-ulama pembaharu memang terdorong untuk melakukan pendekatan demikian. Sementara Maududi, yang dididik dalam lingkungan madrasah tradisional yang menentang ide-ide kaum modernis Sayyid Ahmad Khan, dapat dimengerti jika cenderung menggunakan pendekatan yang berbeda dari Natsir.

Natsir yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang dominan Muslim, merasa tidak terlalu khawatir dengan ancaman pihak lain jika ia bersikap fleksibel dalam menafsirkan Islam. Sementara Maududi yang hidup di tengah-tengah minoritas Islam yang merasa terancam dengan kaum Hindu yang dominan, cenderung untuk bersikap eksklusif dalam menafsirkan Islam. Karena itu, jika sejak muda Natsir bergabung dengan pergerakan kaum pembaharu, Maududi sebaliknya berada dalam barisan kelompok ulama Deoband dan Jama'at-i-Ulama Hind yang menentang paham kaum modernis yang dianggap "kebarat-baratan".

Meskipun Natsir percaya bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, namun ia melihat kesempurnaan ajaran Islam itu – terutama doktrin sosial politiknya – justru karena ia hanya memberikan panduan-panduan yang bersifat umum, dan tidak dalam bentuk perincian-perinciannya. Karena itu, ia berpendapat bahwa ijtihad harus digalakkan. Ia tidak menafsirkan bahwa ijtihad itu telah dilakukan oleh para ulama dan pemikir Islam dari zaman-zaman yang lampau dan semuanya itu khazanah warisan tradisi Islam. Namun ijtihad mereka, adalah respons mereka kepada suatu zaman tertentu.

Sedangkan pelaksanaan ajaran agama itu, menurut Natsir, "haruslah dengan mengingat tempat dan zamannya". Dengan demikian, ijtihad dan ijma' alim ulama dari zaman yang lampau, senantiasa dapat diperbaharui ketika situasi sosial dan politik masyarakat juga telah berubah.

Latar belakang pendidikan Barat yang dialami Natsir mendorongnya untuk secara langsung berkenalan dengan alam pikiran Barat modern. Baginya, pengetahuan demikian adalah "hikmah", sebagai hasil dari perkembangan sebuah peradaban. Dengan berpegang kepada hadis Nabi bahwa hikmah adalah ibarat harta orang beriman yang hilang, sehingga di manapun hikmah itu ditemui, ia wajib di-

ambil, maka Natsir leluasa saja menggunakan alam pikiran Barat modern itu dalam usahanya untuk mentransformasikan doktrin.

Pemikiran Natsir mengenai nasionalisme dan demokrasi misalnya, cukup diwarnai oleh pemikiran Barat modern. Ia menilai positif kepada nasionalisme dan menganggapnya sebagai fithrah manusia yang wajar untuk mencintai tanah airnya, sepanjang tidak menjadikan nasionalisme itu sebagai yang dipertaruhkan.

Nasionalisme, menurut Natsir, harus mendapatkan nafas keagamaan agar tidak menimbulkan perasaan *ta'asub* dan *chauvinisme*. Karena itu, sejak muda, Natsir terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menerima pandangan dalam perjuangan pembentukan sebuah negara-bangsa (*nation state*) adalah suatu keharusan. Ia adalah sebuah "alat" yang perlu untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam ke dalam situasi yang kongkrit.

Dalam membahas demokrasi, Natsir yakin bahwa prinsip – prinsip Islam tentang "syura" lebih dekat kepada rumusan-rumusan demokrasi modern, dengan meletakkan prinsip-prinsip "hudud" (batas-batas) dan etik keagamaan sebagai panduan dalam mengambil keputusan.

Dengan demikian, ia berusaha untuk memperdamaikan teori kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan Tuhan. Karena itu, Natsir mengatakan bahwa Islam itu menganut faham "Theistic Democracy", yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Keputusan mayoritas rakyat yang berpedoman kepada ketuhanan. Keputusan mayoritas rakyat yang berpedoman kepada nilai-nilai ketuhanan itu, menurut Natsir, dapat dianggap sebagai *ijma'* kaum muslimin yang mengikat untuk tempat dan zaman tertentu.

Sosialisasi politik Natsir semenjak awal, mendorongnya pula untuk bersikap positif dalam memandang adanya pluralisme dalam masyarakat. Di masa kecil, ia telah menyaksikan debat-debat antara kaum pembaharu dengan ulama konservatif di satu pihak, dan debat-debat golongan Islam dengan golongan adat Minangkabau.

Pluralisme masyarakat, bagi Natsir adalah suatu realitas yang tak dapat ditolak. Ia sering mengutip surat Al-Hujurat 13 sebagai titik tolak penerimaan yang positif kepada pluralisme. Pluralisme agama-agama, bagi Natsir juga merupakan suatu realitas sosial yang selamanya tak mungkin akan dihilangkan.

Namun ditengah prularisme itu, dapat diusahakan adanya "kalimatun sawa" yang diharapkan dapat dijadikan landasan bersama untuk

menjadi titik temu dalam memecahkan persoalan-persoalan bersama.

Karena itu, tidak terlalu mengherankan, jika dalam perilaku politiknya, Natsir senantiasa bersedia bekerjasama dengan pihak-pihak lain, bahkan dengan kelompok bukan Muslim, atas dasar kejujuran dan kemasalahatan bersama.

Maududi yang juga meyakini kesempurnaan Islam, lebih cenderung melihat Islam itu benar-benar mencakupi segala-galanya. Maududilah yang nampaknya mula-mula mengatakan bahwa Islam itu adalah sebuah supra sistem, yang di dalamnya mengandung berbagai sistem, seperti sistem politik, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sebagainya.

Kesempurnaan Islam itu, menurutnya, semakin kokoh dengan warisan tradisi pemikiran Islam sepanjang sejarah, terutama oleh ulama-ulama terkemuka yang tergolong sebagai "mujaddid". Karena itu, walaupun Maududi juga mengakui pentingnya ijtihad, ia lebih cenderung merekonstruksi warisan tradisi pemikiran Islam klasik dan menuangkannya ke dalam bahasa politik kontemporer.

Ia ingin memelihara kemurnian doktrin dan tradisinya, dan karena itu cenderung untuk menolak pemikiran Barat modern. Hikmah bagi Maududi, harus dicari di dalam tradisi Islam sendiri, bukan dalam warisan tradisi di luar Islam. Dalam hal ini, Maududi memang berbeda dengan Natsir.

Karena hal-hal di atas, dapat dimengerti mengapa Maududi secara tegas menolak ide-ide nasionalisme dan menolak gagasan Indian Muslim League tentang perlunya pembentukan sebuah negara Muslim yang terpisah dari India yang didominasi kaum Hindu. Nasionalisme, menurut Maududi, adalah "ashabiyah" yang bertentangan dengan doktrin Islam seperti dikatakan dalam hadits-hadits Nabi.

Perjuangan Islam, menurutnya, bukanlah berusaha untuk membentuk sebuah negara-bangsa (nation-state), tetapi perjuangan untuk menjadikan Islam sebagai "jalan hidup dan sistem kehidupan di atas dunia ini". Maududi pun menentang cita-cita demokrasi yang dikemukakan Muslim League sehubungan dengan ide mereka dalam pembentukan Pakistan sebagai "a Muslim state". Secara literalis, dengan menunjuk kasus demokrasi di Barat, Maududi mengartikan demokrasi sebagai pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas.

Kehendak mayoritas adalah hukum, karena "kedaulatan" ada di

tangan rakyat. Dengan demikian, menurut Maududi, demokrasi adalah "syirik" karena mengenyampingkan Tuhan sebagai satu-satunya pihak yang berwenang dalam menetapkan hukum. Sejalan dengan teori Maududi tentang "kekhalifahan manusia", maka baginya dalam Islam tidak ada tempat bagi demokrasi.

Sosialisasi pendidikan di sekolah-sekolah agama tradisional, serta lingkungan masyarakatnya yang terus-menerus merasa terancam oleh dominasi Hindu, mendorongnya untuk bersikap eksklusif dan cenderung untuk menolak pluralisme masyarakat. Islam, bagi Maududi, adalah satu-satunya kebenaran di atas dunia ini. Masyarakat di dunia ini, menurutnya, terbagi ke dalam dua golongan besar, yaitu antara "masyarakat Islam" (al-Nizam al-Islami) dan "masyarakat Jahiliyah" (al-Nizam al-Jahili), suatu ide yang kemudian mempengaruhi Sayyid Qutb, salah seorang ideolog terkemuka al-Ikhwan al-Muslimun. Antara kedua susunan masyarakat itu, menurut Maududi, tidak akan ada kompromi. Yang satu adalah "haq" dan yang lain adalah "bathil".

Pandangan Maududi ini, mempengaruhi kecenderungan perilaku politiknya yang juga enggan untuk bekerjasama dan berkompromi dengan pihak-pihak yang lain. Bukan saja dengan pihak Hindu, tetapi juga dengan kelompok-kelompok Muslim yang tidak sefaham dengan pikirannya. Maududi akhirnya cenderung bersikap negatif dalam memandang pluralisme masyarakat. Maududi, nampaknya mengambil pendirian yang berbeda dengan Natsir.

Sebagai seorang politikus yang terlibat dalam pengelolaan kekuasaan negara, Natsir memang terdorong untuk bersikap realistik dan pragmatik dalam menentukan sikap politik. Ketika Indonesia merdeka – walaupun bukan berdasarkan Islam seperti diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Islam dalam BPUPKI – Natsir menerima pengangkatannya sebagai anggota KNIP dan kemudian sebagai menteri di zaman revolusi. Ada dua alasan mengapa ia bersikap demikian.

Pertama, ia melihat bahwa negara Republik Indonesia yang diproklamasikan itu – dengan undang-undang dasar yang masih bersifat sementara – tidaklah bertentangan dengan asas-asas politik Islam. *Kedua*, ia melihat negara RI adalah modal dasar untuk menyusun masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena itu bagaimanapun bentuk dan susunan negara itu, ia harus dipertahankan lebih dahulu dari pihak-pihak yang ingin merobahnya. Perjuangan untuk menerapkan nilai-nilai Islam dapat ditunda, sampai keadaan untuk memperjuangkan hal itu telah memungkinkan.

Sebaliknya Maududi yang sejak awal enggan untuk terlibat dalam perjuangan politik, dan lebih memusatkan gerakannya yang bersifat ideologis, cenderung enggan pula untuk bersikap realistis dan pragmatik dalam mengambil langkah-langkah politik.

Sejak dicetuskannya ide pembentukan Pakistan pada tahun 1941, Maududi tidak bersedia menyokong ide itu. Dari sudut pandang ideologis, ia menolak menyokong pembentukan Pakistan, karena konsep tentang negara Pakistan itu baginya masih samar-samar. Ia ingin tokoh-tokoh Muslim League lebih dulu meyakinkan dirinya bahwa Pakistan yang dicita-citakan itu "benar-benar sebuah negara Islam". Kalau tidak, ia takkan menyokongnya. Akhirnya Maududi dan partainya, Jama'ati-i-Islami, memang sama sekali tak mengambil bagian dalam pembentukan Pakistan, ketika Jinnah berhasil membentuknya pada tahun 1947.

Nampaknya, karena terjadinya berbagai teror terhadap umat Islam di India ketika pemisahan India-Pakistan, Maududi akhirnya "hijrah" ke negara baru itu. Jadi jika dibandingkan dengan langkah Maududi, Natsir nampak lebih realistis dan pragmatik dalam mengambil langkah politik. Maududi lebih bersikap ideologis.

Perbedaan kedudukan kedua tokoh itu dalam posisi politik, mempengaruhi juga transformasi doktrin ke dalam ideologi politik dan strategi politiknya. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Natsir dan partai yang ia menjadi tokohnya, Masyumi, mulai terlibat dalam kancah pengelolaan kekuasaan negara.

Dengan demikian, Natsir mempunyai pengalaman pahit-getirnya mengendalikan kekuasaan dan ikut serta memimpin negara yang masih muda. Ada masanya ia menjadi Menteri dan Perdana Menteri, tetapi ada masanya pula ia menjadi oposisi di parlemen. Tokoh yang berada dalam posisi demikian, memang terdorong untuk mengambil langkah-langkah yang kompromistik dengan mempertimbangkan formasi kekuatan politik riil di lapangan. Sebagai seorang yang memegang tanggung jawab pemerintahan, ia pun terdorong pula untuk menyelesaikan masalah-masalah kongkrit dalam masa yang singkat.

Sebagai oposan politik, ia harus menentukan sikap terbaik bagaimana harus menempatkan diri dalam suasana demikian. Oleh sebab itu, sikap politik Natsir kadang-kadang terlihat moderat. Tapi pernah pula ia mengambil langkah yang tanpa kompromi, misalnya ketika

menghadapi penerapan sistem Demokrasi Terpimpin yang dipaksakan oleh Sukarno dengan dukungan PKI.

Maududi berada dalam posisi yang berbeda dengan Natsir. Partainya, Jama'at-i-Islami adalah sebuah partai marginal dalam politik Pakistan. Selama berkiprah dalam politik hingga tahun 1958, satu-satunya partisipasi resmi Jama'at-i-Islami dalam perpolitikan Pakistan ialah satu orang anggota DPRD tingkat propinsi. Tak seorang pun wakil Jama'at dalam pemerintahan Pakistan, juga di Parlemen Pusat dan Majelis Konstituante.

Dalam posisi demikian, Maududi dapat terus "konsisten" dengan langkah politiknya, yaitu selamanya menjadi tokoh oposisi tidak resmi di luar parlemen. Sebagai seorang tokoh yang tidak pernah diserahi tanggung jawab mengelola kekuasaan negara, Maududi dapat dengan leluasa menuangkan ide-idenya dalam berbagai tulisan.

Dalam posisi demikian, dapat difahami jika ide-idenya cenderung bersifat absolut dan mengandung idealisme yang tinggi. Ia menulis sesuatu tidak dalam konteks politik yang ril, tetapi berada dalam dunia ide yang terkadang berbeda jauh, atau bahkan samasekali tidak berhubungan dengan realitas perpolitikan dan masalah-masalah kongkrit yang dihadapi Pakistan.

Dalam konteks kedudukan yang berbeda seperti di atas itu, juga dapat dimengerti mengapa transformasi doktrin mengenai susunan negara dan sistem pemerintahan yang dikemukakan Natsir dengan Maududi mengandung perbedaan-perbedaan yang tajam. Natsir melihat negara secara kongkrit sebagaimana ia sendiri terlibat dalam pengelolaannya.

Karena itu, ia cenderung menerima realitas bagaimana sebuah negara berjalan dalam praktek, namun di sana-sini ia berusaha untuk memberikan corak dan sifat keislaman kepadanya. Prinsip syura dilihat oleh Natsir sebagai sesuatu yang dapat diimplementasikan ke dalam sebuah parlemen negara modern dengan sistem multi partai. Corak kekhalifahan dalam pemerintahan zaman sahabat dapat disesuaikan dengan tradisi pemerintahan parlementer, di mana kepala pemerintahan tunduk kepada mandat dan pengawasan parlemen.

Syari'at Islam bagi Natsir adalah "sumber hukum" yang perlu diijtihadkan oleh pemerintah dan parlemen, untuk kemudian diundangkan ke dalam bentuk peraturan perundangan dan kebijakan

pemerintah. Sebuah dokumen Masyumi, yaitu draf Konstitusi Republik (Islam) Indonesia (1956), yang Natsir ikut terlibat secara intensif dalam pertemuannya, memperlihatkan dengan jelas bagaimana konsep negara menurut Masyumi.

Draf itu memperlihatkan bagaimana Masyumi berusaha untuk mempertemukan prinsip-prinsip politik Islam dengan UUD Sementara RI Tahun 1950. Draf itu memperlihatkan ide sebuah negara dengan sistem pemerintahan parlementer modern, yang disebut oleh Masyumi sebagai "negara hukum yang demokratis berdasarkan Islam".

Approach Maududi dalam merumuskan teori kenegaraan berbeda dengan Natsir. Sebagai seorang "idealis" yang berada di luar panggung kekuasaan politik, pendekatan Maududi kepada negara bertitik tolak dari konsep yang abstrak mengenai negara, yaitu negara yang dibayangkan bersifat ideal sebagaimana pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khulafa al-Rasyidin.

Maududi tegas menolak teori Trias Politica, bahkan teori tentang pembagian kekuasaan. Kekuasaan tertinggi pemerintahan berada di tangan seorang Khalifah yang mendapat mandat dari seluruh rakyat yang menjadi "Khalifah" yang sesungguhnya di dalam negara. Khalifah memerintah tanpa batas waktu. Majelis Syura atau Ahlul Halli Wal Aqdi adalah "badan penasihat" kepada Khalifah yang nasihat-nasihatnya tidak mengikat. Keputusan untuk mengesahkan undang-undang juga berada di tangan Khalifah setelah mendengar nasihat Majelis Syura.

Dalam sistem pemerintahan seperti di atas, menurut Maududi, tidak ada oposisi. Seluruh anggota Majelis Syura akan sepakat jika Khalifah berada di jalan yang benar. Sebaliknya seluruh anggotanya dengan serta merta akan menjadi oposisi jika Khalifah melakukan kesalahan.

Jika terjadi perselisihan antara Khalifah dengan Majelis Syura, maka keputusannya diserahkan kepada referendum. Jika referendum memihak Khalifah, maka Majelis Syura harus membubarkan diri. Sebaliknya, jika referendum memihak Majelis Syura, maka "terpujilah kepada Khalifah apakah ia akan terus memegang jabatannya, atau menawarkan mengundurkan diri".

Maududi sendiri mengatakan, bahwa idenya mengenai "negara Islam" itu adalah dalam bentuk yang ideal. Negara demikian akan

terwujud jika rakyat Pakistan benar-benar telah menjadi Mukmin yang sejati sebagaimana di zaman Nabi dan para sahabat.

Memang menjadi persoalan di dalam realitas politik, adakah manusia yang benar-benar mampu menjadi seorang khalifah di zaman modern ini tanpa menjadi seorang diktator dengan model negara Islam yang dikemukakan oleh Maududi. Adakah manusia di Pakistan yang sekualitas dengan pribadi nabi Muhammad SAW dan empat khalifah sesudahnya yang mampu bertindak adil, walaupun tanpa mekanisme kontrol yang efektif untuk mengawasi perilakunya?

Menjadi persoalan pula, kapankah rakyat Pakistan akan benar-benar menjadi Mukmin sejati seperti dibayangkannya. Jadi memang pendekatan Maududi terhadap negara bertolak dari idealisme, dan bukan sebuah usaha untuk memecahkan problem-problem kongkrit yang dihadapi oleh Pakistan sebagai negara baru dengan berbagai masalah yang rumit seperti dihadapi oleh Jinnah dan Liaquat Ali Khan.

Jadi dibandingkan dengan Natsir, Maududi memang berbeda. Natsir nampak sedemikian jauh berusaha untuk menerapkan asas-asas Islam ke dalam sebuah negara modern dengan approach yang kongkrit. Ide Natsir nampak sedemikian jauh berkompromi dengan realitas dunia modern dan problem-problem kongkrit yang dihadapi oleh Indonesia. Karena itu, ide Natsir mengenai negara nampak "kurang orisinal" jika dihubungkan dengan "negara ideal" di zaman Nabi dan Khulafa al-Rasyidin.

Maududi sebaliknya, nampak lebih bersifat "orisinal" Islam. Approachnya kepada negara tidak bertolak dari realitas, tetapi bertolak dari idealisme. Ia ingin menjelmakan kembali "negara Islam ideal" sebagaimana telah dipraktekkan oleh Nabi dan Khulafa al-Rasyidin itu di zaman kontemporer.

Maududi juga tidak memberikan suatu strategi untuk mencapai tujuannya dalam bentuk negara Islam yang ideal itu. Jama'at-i-Islami sendiri, memang tidak mempunyai wakil dalam Majlis Konstituante Pakistan untuk memperjuangkan idenya itu.

Ini berbeda dengan Masyumi, yang secara kongkrit memperjuangkan cita-cita kenegaraan mereka dalam perdebatan Majlis Konstituante RI dengan kekuatan yang cukup untuk memaksa Majlis itu agar berkompromi dengan gagasannya, jika sekiranya Presiden Sukarno tidak mendekritkan pembubaran majlis itu pada bulan juli 1959.

Penutup

Dari kasus Natsir dan Maududi di atas, nampak bahwa Islam adalah agama yang dinamik, meskipun doktrinnya telah bersifat final dengan berakhirnya pintu kenabian. Dinamik itu terutama nampak dalam doktrin sosial-politik Islam dengan realitas sosial para penganutnya. Dunia yang terus berubah telah mendorong elit keagamaan Islam untuk terus menerus melakukan transformasi doktrin ke dalam bentuk ideologi sosial dan politik. Dengan cara itu, mereka berusaha agar agama tetap menjadi pembimbing dalam berbuat dan berperilaku.

Namun, proses transformasi itu sendiri, seperti terlihat dalam kasus Natsir dan Maududi, nampak sangat situasional. Kecenderungan pribadi para tokoh, latar belakang pendidikan, sosialisasi politiknya, posisinya dalam politik yang kongkrit, dan suasana persekitaran politik di mana mereka hidup, adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa transformasi doktrin ke dalam bentuk ideologi sosial dan politik mempunyai nuansa-nuansa yang berbeda.

Adalah suatu kekeliruan jika menganggap semua ideologi gerakan politik Islam adalah sama. Kasus Natsir dan Maududi menjadi salah satu "bukti" empiris, bagaimana doktrin yang sama ditransformasikan ke dalam sosok ideologi sosial dan politik yang berbeda, kendatipun kedua tokoh itu hidup dalam zaman yang sama.

Topik Diskusi : **Konsepsi Pak Natsir tentang Agama dan Politik.**
Pembicara : **Dr. Nurcholis Madjid dan Dr. Yusril Ihza.**

Para Penanggap :

Dr. Ir. A.M. Syaefuddin:

Untuk Yusril. Saya khawatir ini menjadi rumusan, rumusan kondisional. Kalau rumusan kondisional memang bisa berubah, tapi kalau diterima oleh orang yang awam mengkhawatirkan. Dengan komparasi antara Dr. Mohammad Natsir dengan Maududi, apakah analog orang yang berkuasa dan orang yang belum berkuasa atau analog modernis dan tradisional?

Kalau Pak Natsir disebut modernis, sedang Maududi tradisional nativistik, kemudian dikaitkan dengan implikasi seorang modernis yang negarawan, politisi, yang selalu menganut keputusan-keputusan kompromistis. Sejauh mana keputusan kompromistis tanpa menanggalkan keistiqomahan? Karena dalam jiwa Dr. Mohammad Natsir terpancar jiwa istiqomah. Apa makna istiqomah dengan perubahan perilaku politik? Apa benar orang yang belum diberi kekuasaan akan menjadi fundamentalis?

Oleh karena itu, rumusan kondisional itu harap diperjelas, apakah kekuasaan mendorong manusia menjadi kompromistis, mungkin maksimal sampai kepada murtad dan munafiq. Apakah sama kalau berkuasa menjadi modernis sedang kalau tidak berkuasa menjadi fundamentalis? Apakah dengan Petisi 50 analog, karena anggotanya sebagian Purnawirawan. Apakah mereka ini masuk kelompok fundamentalis?

Drs. Lukman Harun

Ada yang ingin saya garis bawahi ketika Cak Nur menyebut *Moslem Left*. Saya ingat tahun 1949/1950 Muktamar GPII di Semarang, Ketua

Panitiaanya Pak Munawir Sadzali. Pak Harso Cokroaminoto berpidato, antara lain mengatakan, "saya ini Muslim GPII asli, saya ini Masyumi asli, SI asli dan insya Allah saya Muslim Kiri". Jadi, buat saya ini bukan sesuatu yang terlalu mengagetkan.

Kalau kita lacak dokumen-dokumen lama, ternyata istilah-istilah yang sekarang populer, sebelumnya sudah kita temukan. Ketika saya berbicara di ISTN mendiskusikan Pemikiran Islam Kiri Hasan Hanafi. Saya bilang, "Harso Cokroaminoto tahun 1954 mengaku Muslim Kiri dengan konotasi bahwa dia sangat peduli kepada pembebasan kaum tertindas".

Kemudian ada yang menarik, Cak Nur mengatakan, kegagalan Pak Natsir antara lain karena Pak Natsir tidak memahami kultur mayoritas yang ada di sini. Saya kira ada benarnya. Kalau kita tarik Masyumi keseluruhan, kita tahu di Masyumi ada sayap Natsir dan ada sayap Sukiman. Sukiman nasionalis punya kultur Jawa tapi ketika Masyumi dibubarkan, sayap Sukiman juga turut dibubarkan. Jadi sama artinya memahami kultur tetap saja pada akhirnya tidak berakar. Tetapi perlu lebih digali apa yang dimaksud tidak memahami kultur itu.

Pak Natsir menjelang wafatnya, sempat bicara panjang lebar. Saya tanya sikap Pak Natsir terhadap Pak Kiman. "Pak, dulu pernah Pak Natsir melakukan tindakan indisipliner. Partai Masyumi tidak setuju Linggarjati tapi Bapak tetap saja setuju dan duduk dalam Kabinet. Itu kan undisipliner. Begitu juga Pak Kiman dan Pak Anwar Haryono dan sebagainya, ikut persatuan dan perjuangan bersama Tan Malaka. Mengapa Pak Natsir membiarkan Pak Kiman membawa Masyumi menjadi 1 banding 147 dari berbagai organisasi yang ada, karena Masyumi sama dengan Angkatan Muda Kereta Api dan sebagainya, dalam persatuan perjuangan dan tidak ada yang tidak setuju Linggarjati.

Pak Natsir menjawab, "Pak Kiman (Sukiman) itu orang Jawa dan dominan. Jadi tidak mungkin waktu itu saya," kata Natsir, "melakukan penentangan oposisi kepada Pak Kiman". Jadi dari situ rasa-rasanya saya menangkap sedikit-sedikit Pak Natsir tahu juga itu soal kultur itu.

Kemudian, soal Islam bukan ideologi, saya setuju. Saya juga punya pikiran Islam itu bukan ideologi, tapi ada aspek-aspek tertentu yang bisa ditarik menjadi ideologi. Sejak 1932, Pak Natsir juga mengatakan begitu. Pak Natsir menulis kebangsaan Muslimin atau kebangsaan Muslimun. Bagi Pak Natsir, Islam itu sumber inspirasi dan motivasi,

tempat kita mengadukan persoalan ketika susah dan senang, dan sebagainya. Ringkasnya, hal ini untuk menggampangkan persoalan saja. Itulah ideologi kita. Saya kira, Yusril juga mengatakan itu, cuma untuk menyederhanakan. Sebab, apapun juga, pada akhirnya kalau ditanya apa ideologimu, jawabnya tentu Islam.

Buat Yusril, saya tertarik membandingkan Maududi dengan Pak Natsir dan saya teringat tulisan Fazlur Rahman, guru Cak Nur dan Syafii Ma'arif. Fazlur Rahman dalam satu tulisan pernah mengatakan bahwa Pak Natsir dan Muhammadiyah di Indonesia jauh lebih maju ketimbang Maududi dan Jama'at-i-Islami. Waktu itu saya pikir memang ada kesamaan. Maksud saya, sangat berbeda antara Maududi dengan pikiran-pikiran Masyumi dan malahan Masyumi lebih dekat kepada Fazlur Rahman.

Fazlur Rahman antara lain mengatakan, bunga Bank bukan riba, Pak Natsir tidak jelas. Tapi Pak Sjaf (Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Keuangan Masyumi, pen) jelas mengatakan kalau bunga 6% setahun, 12% kalau dihitung dengan inflasi segala macam bukan riba. Mengkreditkan barang lebih riba, kata Pak Sjaf, sedang Pak Natsir tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi gurunya Pak Natsir tahun 1930-an, Ustad Hasan mengatakan, bunga Bank itu bukan riba. Kalau menganggap riba adalah haram, ambil saja bunganya dan gunakan untuk yang kotor-kotor seperti membersihkan WC Umum. Saya ingin penjelasan dari Yusril apakah benar hal itu. Kalau benar, harus dikoreksi Fazlur Rahman, tidak harus dimusuhi. Saya minta penjelasan, sebab ada kecenderungan Fazlur Rahman dimusuhi. Kalau melihat begini, Fazlur Rahman dekat ke Masyumi. Jangan-jangan pernah jadi Ketua Cabang Masyumi di Islamabad.

Hadimulyo

Ada satu hal yang menarik tentang penilaian atas pemikiran dan perjuangan Pak Natsir. Ada persamaan antara Ichlasul Amal dan Taufik Abdulah maupun Cak Nur dalam memberikan kesimpulan. Bahwa Pak Natsir gagal dalam politik. Saya melihat pandangan semacam ini tipikal atau khas kalangan intelektual atau para cendekiawan yang dibesarkan dalam suasana Orde Baru sekarang. Jadi memang ada semacam jarak antara politik dan kehidupan intelektual. Padahal, kalau kita kaji pada zaman Pak Natsir, saya kira saat itu Pemimpin Partai, pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh po-

litik, pada dasarnya adalah orang-orang terbaik dalam golongannya masing-masing.

Pertanyaan saya satu saja, mengapa dalam Orde Baru ini ada kecenderungan kaum intelektual membuat distansi dunia Barat dengan dunia politik. Padahal itu tidak terjadi pada zaman pergerakan atau zaman penjajahan sampai 1950-an.

Kedua, Lukman Harun bilang ketika bertemu Pak Natsir beliau mengatakan bahwa kita selalu kalah terus karena terlalu ikhlas. Saya jadi ingat ketika bersama Dawam Rahardjo dan almarhum Iqbal Saimima, yang waktu itu di kantor LSP Setiabudi, berencana membuat buku tentang Masyumi dan kami undang Pak Natsir dan Pak Yunan. Waktu itu kami-kami yang tua-tua ini terlalu *khusnuldzon* dalam berpolitik. Oleh karena itu saya sampai sekarang masih terpikir apakah memang politik itu seperti itu?

Jawaban Dr. Nurcholis Majid:

Menanggapi Lukman Harun. Saya sendiri terkesan dengan satu label, dengan satu cap positif yang diberikan para peninjau luar pada Masyumi sebagai Moslem Left. Saya setuju tanpa mengambil left dari segi jargon politik yaitu komunis, tetapi left di sini adalah masalah perspektif saja. Left diambil dari posisi di parlemen Inggris, siapa di kiri dan siapa di kanan dari pimpinan saja. Kenyataannya golongan kanan duduknya sebelah kiri dan yang kiri duduknya sebelah kanan.

Jadi yang relevan, yang dimaksud dengan left, adalah orang-orang yang mempunyai komitmen begitu tulus dan emosional kepada keadilan, perjuangan, membela orang kecil, punya solidaritas kaum du'afa dan sebagainya, dan menurut saya, itu eksposisi dari Islam yang paling baik menurut zamannya. Mungkin sekarang tidak relevan, karena ada program-program ad-hoc lain yang barangkali sama pentingnya, seperti dorongan kewiraswastaan yang notabene juga dilakukan oleh orang-orang Masyumi.

Saya juga menyetujui mengenai Islam dan ideologi sangat persis. Saya terima kasih sekali dengan saudara Yusril yang memberikan kejelasan dari dokumen yang *portable*. Jadi memang rupanya buku Pak Tamar Jaya banyak memberikan salah faham. Bagi saya, kita di sini melihat ada persamaan yang prinsipil. Agama lebih tinggi dari ideologi, sedang ideologi diberi batasan rumusan-rumusan dan sebagai-

nya. Ide itu produk manusia, karenanya tidak mungkin mempunyai nilai sakral yang mutlak.

Tetapi ada suatu ideologi yang diambil dari sumber-sumber sakral yaitu agama. Karena itu seorang muslim harus mempunyai ideologi berdasarkan Islam, tetapi tidak boleh mengklaim bahwa Islam adalah ideologinya. Sebab menyamakan pemahamannya dengan Islam itu sendiri, akhirnya *wathokhulidzi 'ulmin 'alim*. Bahwa, di atas dia yang tahu ada Yang Maha Tahu, tidak bisa para ulama saja. Sampai sekarang, kalau mengakhiri suatu uraian kita sering mengucapkan, "wallahu alam wabissawab". Ini suatu didikan yang rendah hati, bahwa yang kita usahakan cuma reka-reka saja, untuk mengetahui sebab yang benar hanya Allah semata. Karena itu setiap ideologi terikat oleh ruang dan waktu.

Ada suatu rumusan para ahli ideologi, yaitu: sebuah ideologi cenderung ketinggalan zaman ketika ideologi itu tidak lagi bisa diperbaharui. Lihat saja Komunisme hancur ketinggalan zaman. Maka sejak semula, kita namakan kalau toh kita punya ideologi seperti Panca-sila harus kita persepsi sebagai ideologi terbuka. Informasi yang baru dari Saudara Yusril bahwa Pak Natsir, ternyata dia pragmatis mengandung istilah yang berbahaya juga sebetulnya.

Tetapi itu mencerminkan persepsi ideologi supaya terbuka. Semuanya bukan tawaran terakhir, *it's not final*. Jadi karena itu memang Islam itu terbuka menurut saya. Islam itu terbuka, sekurang-kurangnya bagaimana menafsirkan, melakukan dan melaksanakannya secara teknis.

Soal bingung dengan sikap saya, Pak Natsir dulu waktu tampil juga membingungkan orang. Jadi saya kira saya tidak unik dan lebih baik bingung dari pada pasti salah. Bingung itu permulaan kita mencari. Kalau anda pasti, pasti melawan atau pasti menyetujui, itu bukan yang kita kehendaki.

Terus terang saja, kepada mereka yang fanatik mendukung saya, saya khawatir. Saya selalu mengingatkan, bahwa Qur'an mengatakan *waidz kabaro talladzina tubi'u alladzina taba'un* artinya ingat, suatu saat nanti mereka yang diikuti akan lepas tangan di akhirat. Dan saya akan lepas tangan kalau caranya mengikuti saya seperti itu. Saya tidak mau Anda mengatakan, saya masuk neraka gara-gara Anda. Agama sendiri mengajarkan kita harus mengikuti secara kritis.

Kita mau cara penganutan kepada agama secara kritis. Menurut saya, bahaya terbesar bagi mereka yang menganut – seperti dikatakan Yusril – yang menganut Pak Natsir adalah kalau idealisasi dan romantisasi Pak Natsir tanpa dipelajari secara kritis dan apa adanya. Apa yang dilakukan Yusril harus dilakukan lebih banyak lagi studi ilmiah yang kritis.

Mengenai gagal dan tidak gagal (usaha yang diperjuangkan oleh Pak Natsir, pen), juga merupakan istilah dan bagaimana perspektif melihat persoalan ini. Kita maksudkan gagal dalam arti wujud praktis saja dalam memegang pemerintahan dan sebagainya. Saya kira dengan begitu maka sebetulnya perkataan gagal tadi kita lihat dulu dari segi idenya. Saya boleh mengklaim bahwa saya masih melanjutkan idenya Masyumi. Anda boleh setuju boleh tidak, itu soal lain. Tapi saya bisa mengajukan argumen banyak sekali. Yang saya lakukan di Paramadina adalah Masyumi, suatu sikap tidak takut kepada modernitas. Optimis, kita pasti bisa *menghandle*.

Jawaban Dr. Yusril Ihza Mahendra

Ada beberapa hal yang disampaikan kepada saya dari Pak A.M. Syaefuddin mengenai istilah fundamentalis. Sebetulnya sebagai istilah, saya menggunakan itu dalam pengertian yang netral, satu kategori yang berpolitik sebetulnya. Jadi haraplah supaya istilah fundamentalis itu tidak diartikan secara negatif. Memang, salah satu ciri modernisme itu ialah kecenderungan ke arah kompromistik. Kalau memegang kekuasaan cenderung berkompromi, tapi demokratik. Ada juga orang punya kekuasaan justru tidak mau kompromi dan dipaksakan segala sesuatu karena dia memiliki kekuasaan itu.

Pak Natsir memang cenderung kompromistik ketika ikut berbagai kekuasaan atau malah memegang kekuasaan itu sendiri. Dari segi ini saya lihat dia realistik. Misalnya, ketika ia diserah tugas membentuk kabinet. Natsir beberapa kali mengadakan perundingan dengan Sidik Joyosukarso dan Suwiryo, tapi dua tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) ini sulit untuk bisa berkompromi. Terutama mengenai komposisi keanggotaan kabinet. Berapa kali dicoba, tapi gagal. Kalau perlu dibentuk Second Kabinet.

Di sini Pak Natsir, walaupun Second Kabinet yang seharusnya tidak tergantung kepada sokongan Parlemen, komposisi Kabinetnya tetap mempertimbangkan komposisi sokongan Parlemen untuk memper-

oleh kepercayaan dalam menyampaikan program dan susunan portofolionya. Oleh sebab itu, komposisi Kabinet Pak Natsir banyak menimbulkan ketidakpuasan di pihak lain, yang paling keras mengkritik adalah Ichsan Syahrir. Ichsan Syahrir mengatakan kabinet Natsir bukan kabinet Masyumi. Ketika kabinet itu meminta veto kepercayaan, dua kawan Pak Natsir walk out dari Parlemen, yaitu Yusuf Wibisono dan Burhanuddin Harahap. Mereka tidak setuju dengan program kabinet Natsir dan personalianya.

Kita melihat, orang harus mengambil keputusan-keputusan yang kompromistik, walaupun terkadang terpaksa harus debat dengan kawan sendiri. Dari segi ini saya kira realistik. Jadi harus ditempatkan secara proporsional. Kalau Pak Natsir tidak memperhitungkan kekuatan semacam itu, walaupun second kabinet, ia akan dihadapkan pada kesulitan mendapatkan kepercayaan dari parlemen. Karena itu kompromistik.

Kompromistik berada dalam kekuasaan yang demokratis. Kekuasaan diktator tidak akan ada kompromi, bahkan memaksa kehendaknya untuk menindas kelompok-kelompok lain. Jadi bukan sesuatu yang mutlak. Saya mengatakan kecenderungan saya menggunakan bahasa ilmu sosial yang sangat humanistik, yang tidak positivistik, yang mengatakan dia harus begini dan harus begitu.

Memang banyak faktor kenapa orang yang berpendidikan Barat cenderung kearah modernis dibanding mereka berpendidikan tradisional. Tapi Pak Natsir tidak juga selalu berkompromi. Ada hal-hal di mana ia menolak berkompromi.

Orang yang memegang teguh nilai-nilai Islam, tahu kapan berkompromi dan kapan ia harus menolaknya. Misalnya ketika menghadapi Demokrasi Terpimpin. Pak Natsir sama sekali tidak dapat berkompromi dengan Soekarno. Karena itu ia mengambil langkah yang sangat besar implikasi dan resikonya, yaitu bergabung dalam rapat di Sungai Dareh untuk membentuk PRRI dan sama sekali tidak mau berkompromi dengan Soekarno. Mengapa begitu? Natsir mengatakan, Masyumi itu hanya bisa sendiri, bisa tegak karena ada reason – detre-nya, yaitu, demokrasi. Kalau demokrasi tidak ada, maka tidak ada alasan lagi untuk hidup.

Menjelang Masyumi bubar – surat Pak Natsir yang ditujukan kepada Kolonel Nursirwan – menjelaskan Prawoto tidak perlu bertanya kepada saya (Pak Natsir, pen), langkah apa yang harus diambil Ma-

syumi tetap ada atau bubar. Dan ketika saya tanya Room, beliau mengatakan negara ini akan menjadi totaliter Soekarno. Lebih baik kita bubar. Kalau tidak, kita akan jadi mayat hidup di tengah-tengah kondisi semacam ini.

Saya pikir, keputusan-keputusan mereka itu bukan tidak ada dasar pikirannya. Pernah saya tanya Pak Nursirwan, benar kita bubar? Kalau kita tidak bubar pada waktu itu, semua akan bubar, toh semua partai bubar sekarang. PNI bubar yang pada waktu itu berkuasa. Jadi ini persoalannya.

Pak A.M. Sjaefuddin menanyakan di mana batas istiqomah? Kompromistik itu minimal kompromistik dan maksimal murtad. Saya pikir tidak sejauh itu dalam persoalan politik. Politik harus dilihat dengan kacamata yang riil dan persoalan politik memang harus ditangani secara politik, walaupun kita berpegang teguh kepada etik yang kuat.

Sebetulnya Pak Natsir sendiri mengatakan politik itu netral saja. Tetapi bagaimana orang menggunakan kekuasaan itu, adakah berlandaskan nilai etik? Saya yakin Pak Natsir merupakan eksponen dalam hal ini. Orang yang mencoba untuk menerapkan etik keagamaan dalam perilaku politik beliau.

Jadi istilah fundamentalis tidak usah diartikan secara negatif. Apakah penguasa jadi kompromis dan kalau oposan menjadi fundamentalis? Saya mengatakan kecenderungannya memang begitu tapi tidak selalu mesti begitu, meskipun pada umumnya memang demikian.

Saya sendiri membuktikan secara empiris kasus partai PAS Malaysia. Ketika PAS beroposisi, sangat fundamentalis, maunya negara Islam. Maunya Malaysia dianggap negara Islam. Tapi ketika menang di Kelantan, semua programnya macet tidak bisa jalan. Dalam kampanye PAS bilang semua wanita tidak boleh kerja. *Satu*, Negara Islam tidak ada pajak, yang ada hanya zakat. *Dua*, hukum Islam yang harus dilaksanakan adalah *hudud*. Dan *ketiga*, yang disebut dengan pengikut Inggris itu semua kafir. Tapi ketika PAS menang dan memerintah di Kelantan, para pengusaha mengatakan enak betul buka usaha di Kelantan. Tidak bayar pajak, hanya zakat 2,5% satu tahun. Akibatnya, Kelantan akan bangkrut.

Akhirnya PAS bilang, kita tunda dulu. Sekarang kita pakai pajak saja. Satu dia gagal. Kedua ketika dia bilang tidak boleh wanita kerja,

langsung rumah sakit tutup. Malam-malam rakyat protes, bagaimana ke rumah sakit, padahal ini darurat. Bolehlah wanita bekerja. Akhirnya, semua beralih kepada darurat dan Maududi semuanya darurat. Sebagai *diexcition* kepada keputusan-keputusan politik dia darurat, namun kemudian menjadi pemberian dan menyimpang dari prinsip-prinsip politiknya sendiri.

Ketika saya membuat tesis (tentang Natsir, pen) saya bertanya, apa yang sedang terjadi kalau seorang modernis tersingkir dari kekuasaan. Kemudian sekian lama berada di luar kekuasaan? Sebaliknya, orang fundamentalis yang tiba-tiba memegang kekuasaan, bagaimana sikap politiknya? Saya katakan orang fundamentalis yang tiba-tiba memegang kekuasaan, pelan-pelan dia berubah menjadi modernis. Saya memberi contoh PAS (Partai Politik Malaysia, pen) Anwar Ibrahim dan Penguasa Iran.

Ketika berkuasa, Hashemi Rafsanjani menjadi moderat. Sebaliknya orang-orang yang tersingkir dari kekuasaan, walaupun mulanya modernis lama-lama bergerak ke arah fundamentalis. Kalau kita teliti secara jujur, Masyumi yang sekian lama tidak lagi memegang kekuasaan pelan-pelan pemikiran politiknya juga sudah jauh berubah, dibanding ketika mereka berada dalam kekuasaan. Dan ini saya katakan sebagai kecenderungan. Tapi A.M. Syaefuddin melihat dari sudut ilmu pasti, yang begini satu kecenderungan dan dalam ilmu sosial mungkin begitu.

Menanggapi Lukman Harun, saya pikir Fazlur Rahman memang mengatakan begitu dan pengetahuan orang mengenai Jemaat Islam lebih banyak didasarkan kepada propaganda-propaganda yang ditulis oleh Mariam Jamilah dan Kursid Ahmad. Jadi kalau Mariam Jamilah mengatakan Jemaat Islami organisasi Islam di dunia paling disiplin dan paling top, orang di sini percaya. Tapi ketika saya cek ke Pakistan, saya tanya berapa banyak Jemaat Islam punya sekolah. Mereka bilang dua madrasah, satu taman kanak-kanak, satu rumah sakit, satu poliklinik, dan satu akademi ulama di Lahore. Rupanya akademi ulama itu yang disebut Jemaat Islami.

Dibanding Muhammadiyah, Jema'at Islami kecil sekali. Propaganda Mariam Jamilah itu bukan main pengaruhnya. Dan saya kira memang dari kelompok yang agak cenderung pada fundamentalis.

Ketika saya ke Malaysia, seorang profesor Cina bertanya, "Apakah

Arqam di Indonesia begitu besar?"

"Ah, siapa bilang, tidak", kata saya. "Memang ada di Depok segala macam".

"Tidak," katanya, "di sini Ketua Cawangan Arqam dalam pidatonya di suatu masjid mengatakan, apa sebab Soeharto sekarang politiknya berubah, lebih cenderung memihak Islam? "Sebab," katanya, "salah seorang Arqam menjadi penasehat politik Pak Harto".

Kadang-kadang organisasi yang agak fundamentalis itu suka propaganda yang bukan main. Membikin orang keliru dan saya kira orang Masyumi sangat *low profile*. Kebanyakan begitu. Seperti Pak Kyai Nur Ali di Bekasi. Peranannya besar dalam pertempuran Kerawang - Bekasi, tapi tidak mau disebut. "Nanti hilang pahalanya", katanya.

Lalu T.B. Simatupang yang banyak menulis laporan dari Banara seolah-olah dia itu besar betul. Tapi Pak Nasution bilang kalau Simatupang perang, masa bisa nulis-nulis besar begitu. Simatupang itu tidak ada apa-apanya. Tapi dari Lebak Bulus sampai Kramat Jati diberi nama Jalan Simatupang. Seolah dibanding orang lain, dia lebih banyak berbuat.

Pandangan dan Kebijaksanaan Mohammad Natsir dalam Masalah Pendidikan

**(Suatu renungan penulis yang dirangkum dari
hasil bacaan dialog dan kerjasama dengan beliau
selama periode 1966-1992)**

Oleh: Prof. Dr. Jusuf A. Feisal, S.Pd.

Mukaddimah

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik memiliki peran di masa datang. Sekali pun pendidikan modern di Indonesia dimulai pada 1536, yaitu ketika Portugis datang ke Tanah Air dan mempropagandakan Agama Katholik. Tapi sebelumnya, pendidikan Islam sudah dimulai sejak Islam masuk Indonesia, 674 Masehi (lihat: pendapat Thomas Arnold dalam *The Preaching of Islam*) walau dalam bentuk yang sederhana.

Dari data sejarah pertumbuhan umat manusia, baik secara tersurat maupun tersirat, ditemukan bukti-bukti — setelah melalui proses analisis — bahwa maju mudurnya satu kaum, bergantung pada pelajaran dan pendidikan yang berlaku dalam kalangan mereka. Artinya, kemunduran dan kemajuan bergantung pada ada atau tidaknya sifat-sifat dan bibit-bibit kesanggupan dalam suatu umat yang menjadikan mereka layak atau tidak menduduki tempat yang mulia di atas dunia ini.

Ada atau tidaknya sifat-sifat dan kesanggupan ini bergantung kepada didikan jasmani dan rohani, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Mujaadilah ayat 11:

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat".

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perubahan, perkembangan dan pembaharuan dalam struktur dan jenjang pendidikan. Meliputi antara lain: organisasi, kurikulum dan disain silabus, metodologi, proses pendidikan, kelembagaan dan manajemen pengelolannya.

Salah satu indikator utama adalah munculnya lembaga setelah Pesantren, yakni Madrasah dan sekolah Islam. Bahkan, sekolah umum yang mewajibkan pendidikan agama mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi. Meskipun demikian, marilah kita periksa diri dan umat kita sekarang. Apakah dalam diri kita masing-masing dan dalam kalangan kita, ada sifat-sifat dan kekuatan serta kecakapan dan kesanggupan seperti mereka dulu? Menurut sunnatullah, semua sifat dan kesanggupan itu tidak dapat dicapai kecuali dengan didikan yang sungguh-sungguh.

Dari kedua rangkaian kalimat yang berbentuk pertanyaan. Dan pertanyaan ini mendorong penulis untuk memikirkan. *Pertama*, apakah umat Islam dewasa ini memerlukan sifat-sifat, kekuatan, kecakapan dan kesanggupan untuk menduduki tempat yang mulia di Indonesia ini.

Artinya, apakah peranan umat Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini tidak hanya sekedar cukup proporsional dari segi demografis. Akan tetapi, justru signifikan dari segi kemampuan kompetitif untuk, paling tidak, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa lain.

Kedua, jika jawabannya perlu, tentu akan muncul pertanyaan yang berikutnya ialah, bagaimana cara melaksanakannya, yaitu bagaimana proses dan pelaksanaan pendidikannya.

Ketiga, ungkapan didikan yang sungguh-sungguh tentu tidak hanya mengandung implikasi semantik yang berkonotasi kesungguhan cara pelaksanaannya saja. Akan tetapi, secara profesional dan akademis, bagaimana umat Islam dapat menjabarkan dasar dan tujuan pendidikan menurut Islam. Sehingga memiliki kadar akuntabilitas yang terjabar di dalam proses penyelenggaraan yang menghasilkan keluaran yang kompetitif.

Apabila kenyataan yang obyektif kesempatan dan peranan umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan politik serta yang lain-lain dianggap benar,

tampaknya kenyataan itu memiliki indikator-indikator yang dapat melahirkan kesimpulan, bahwa umat Islam baru memiliki kesempatan dan peranan minimal. Selanjutnya, apabila kita sepakat bahwa memang demikian keadaannya, maka hal itu sangat mungkin berkolerasi dengan sistem pendidikan yang belum menunjang tercapainya kesempatan dan peran tersebut.

Dari alur pikiran, pandangan dan analisis tersebut di atas, beberapa hipotesis dapat diturunkan sebagai berikut: *Pertama*, Lembaga pendidikan Islam seperti, Pesantren, Madrasah dan bahkan sekolah Islam, program pendidikannya belum relevan dengan sasaran yang hendak dicapai. Baik untuk sasaran profesional seperti menjadi da'i penyebar ajaran Islam dan pembina perilaku umat Islam secara Islami. Maupun untuk sasaran akademis, menjadi ahli dalam salah satu atau beberapa bidang studi "ilmu-ilmu agama".

Kedua, Lembaga pendidikan umum yang melaksanakan pendidikan Islam, termasuk "sekolah Islam" tidak memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang kuat untuk memberikan kemampuan bersaing. Dan dapat mengikuti tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta mencapai hasil yang secara kompetitif diakui memiliki kemampuan profesional, sebagai tenaga trampil yang mampu mengaplikasikan kemampuan teknologisnya atau sebagai insan akademis yang menunjukkan kepakaran dibidang disiplin ilmu.

Ketiga, Tradisi ilmiah yang semata-mata pembuktian kebenarannya hanya didasarkan kepada bukti-bukti kuantitatif-empirik dan melahirkan kepribadian lulusannya yang terbelah. Tidak mampu mengintegrasikan nilai dan fungsi ke dalam satu kesatuan bangunan epistemologi ilmu dan aplikasinya di dalam tugas-tugas pembangunan umat Islam dan bangsanya.

Keempat, Sikap dan pemikiran dikotomi seperti tersebut, membutuhkan terobosan baru dengan menggunakan pendekatan integralistik dalam mengkolaborasi kebenaran, yaitu memadukan antara nilai dan fungsi dengan struktur dan metodologi ilmu.

Kelima, melakukan pembenahan dalam menetapkan tujuan, penjabaran sasaran pendidikan, substansi, struktur, kompartementalisasi kurikulum dan disain mutasi dan spesialisasi programnya.

Keenam, melaksanakan sistem pengadaan dan pengembangan guru yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan penyelesaian masalahnya

seperti tersebut pada bagian Kedua sampai dengan Kelima tersebut di atas.

Landasan dan Tujuan Pendidikan.

Bagi orang yang tidak memiliki pegangan hidup yang benar, semakin lama ia memperdalam ilmu, semakin hilang rasanya tempat berpijak. Apa yang kemarin masih benar, sekarang sudah tak betul lagi. Apa yang betul sekarang, besok sudah salah pula. Demikian wetenschap!

Rohani yang dahaga pada tempat berpegang yang teguh, satu barang yang absolut, yang mutlak. Tempat menyangkutkan sauh bila ditimpa gelombang kehidupan, tempat bernaung yang teduh, bila datang pancaroba rohani. Semua ini tak mungkin diperoleh dengan semata-mata berpuluh dalil, ratusan aksioma dan hipoteses yang diperolehnya dengan wetenschap itu.

Kisah bunuh diri Prof. Ehrenfest setelah terlebih dahulu membunuh anaknya karena kecewa anaknya tidak memiliki potensi intelektual yang sama dengan dirinya, walaupun sudah diupayakan pendidikannya. Sebelum ia bunuh diri dan membunuh anaknya, ia membuat surat kepada koleganya Prof. Kohnstamm yang bunyinya antara lain, "Yang tak ada pada saya ialah kepercayaan kepada Tuhan. Agama adalah perlu. Tetapi barangsiapa yang tidak mampu memiliki Agama, ia mungkin binasa lantaran itu, yakni bila ia tidak bisa beragama".

Bandingkan peristiwa itu dengan peristiwa tatkala Luqman berkata kepada anaknya yang sedang ia beri didikan:

Hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Tuhan, sesungguhnya syirik itu ialah sebesar-besar kezaliman. (Q.S. Luqman: 13)

Dan Surah Ali Imron ayat: 112:

Malapetaka dan kehinaanlah yang akan menimpa mereka, di mana saja mereka berada. Kecuali apabila mereka mempunyai hubungan dengan Allah dan pertalian sesama manusia.

Dalam pandangan Pak Natsir hubungan Tauhid dengan substansi, cakupan, tingkat dan susunan materi pelajaran. Tauhid seyogyanya menjadi landasan pendidikan karena keyakinan tersebut tidak hanya membentuk kepribadian (karakter) yang tangguh, berani hidup me-

ngurangi berbagai kesulitan, bahaya, tipu-daya dan bahkan malapetaka, tetapi juga berani mati demi tegaknya kebenaran dan perintah ilahi.

Pada diri anak didik telah terbentuk suatu keihlasan, kejujuran dan keberanian serta rasa tanggung jawab untuk melaksanakan suatu tugas atau kewajiban yang diyakini kebenarannya. Sebagaimana dilukiskan dalam Al-Qur'an surah As-Saffaat ayat 102, dan tatkala umurnya sudah lanjut tatkala ia berkata:

Hai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau, bagaimanakah pendapatmu dalam hal itu?" Anaknya menjawab: "Ya bapakku, kerjakanlah apa yang telah disuruh: sungguh-sungguh akan bapak ketahui bahwa aku ini termasuk golongan orang-orang yang teguh dan kuat kebatinannya! (maksudnya kondisi batinnya).

Pak Natsir menyarankan kepada kita bahwa landasan pendidikan bagi umat Islam — sebagai salah satu butir dari berbagai butir dalam sistem pendidikan, adalah Tauhid. Keyakinan akan keesaan Allah akan menempa ketangguhan pribadi seseorang dalam melaksanakan tugas kemanusiaannya sebagai hamba Allah. Maupun yang beribadah kepada-Nya sebagai makhluk sosial, yang mampu melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Tauhid pada hakekatnya adalah landasan seluruh aspek kehidupan manusia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Dalam arti khusus (*mahdhah*) maupun dalam melaksanakan kewajiban kulturalnya sebagai anggota masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia (*ghairamahdhah/muamalah/ihsan*), berakhlakul karimah antara sesama manusia dan terhadap makhluk lainnya (sebagai manusia yang berbudaya atau sebagai manusia yang berperadaban tinggi).

Tujuan pendidikan — dengan terlebih dahulu mendudukkan masalah pertentangan antara pendidikan Barat dengan pendidikan Islam — Pak Natsir mengemukakan keterkaitan antara tujuan pendidikan Islam dengan landasan tauhid. Suatu ciri dasar yang membedakan kedua sistem tersebut yaitu menetapkan tujuan hidup sebagaimana diungkapkan oleh Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56 yaitu, ... dan Aku (Allah) tidak jadikan Jin dan Manusia, melainkan untuk menyembah Aku.

Akan memperhambakan diri kepada Allah inilah, tujuan hidup kita di atas dunia ini. Dan lantaran itu, inilah pula tujuan didikan

yang wajib kita berikan kepada anak-anak kita.

"Menyembah Allah" itu melingkupi semua ketaatan dan ketundukan kepada semua perintah Ilahi yang membawa kepada kebesaran dunia dan kemenangan akhirat, Memang untuk membawa kepada kebesaran dunia dan kemenangan akhirat, memerlukan penguasaan ilmu dan keterampilan yang tidak hanya bersifat ilmu agama dalam arti khusus, akan tetapi ilmu (*modern science*) dan teknologi.

Pengetahuan dan teknologi merupakan alat, bukan tujuan, untuk melaksanakan kehidupan. Baik yang terkait dengan perintah Allah SWT secara langsung, maupun hubungannya dengan Interaksionalnya dengan makhluk Tuhan yang lainnya.

Khususnya dengan umat manusia dan dalam hubungan dengan peningkatan kemampuan dirinya (melaksanakan ibadah mahdhah dan ghaira mahdhah). Itulah cita-cita pendidikan Islam (*Islamietisch paedagogisch ideaal*). Apakah hal ini didikan ke-"Barat"-an atau ke-"timur"-an namanya, tidak menjadi soal. Timur kepunyaan Allah, Barat pun kepunyaan Allah.

Sebagai filosofis, Pak Natsir memiliki satu pandangan filsafat integralistik yang menyatukan jiwa dan raga. Pada masa ini merupakan titik balik (*the turning point*) dalam konsep ilmu (*science*), masyarakat dan budaya, atau peradaban.

Bagi hamba Allah, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, bukanlah dua barang yang bertentangan yang harus dipisahkan, melainkan dua serangkai yang harus lengkap melingkupi dan dilebur menjadi satu susunan yang harmonis dan seimbang.

Sesuai firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 143:

.... dan demikian kami jadikan kamu suatu umat yang seimbang, adil dan harmonis. supaya kamu menjadi pengawas bagi manusia, dan Rasul menjadi pengawas atas kamu.

Bapak M. Natsir, baik pandangannya tentang pendidikan, sikap maupun perilakunya sehari-hari, selalu menunjukkan ciri-ciri sebagai umatan wasathon. Sehingga secara mendalam beliau melihat kebenaran, yang bersifat Islami di dalam kultur Barat dan sebaliknya secara obyektif beranggapan bahwa masih banyak di dalam peradaban Islam hal-hal yang kurang atau tidak Islami.

Tentu saja hal ini bukan generalisasi kategori, tetapi merupakan ungkapan yang dihasilkan dari suatu pengamatan yang cermat dan teliti dalam rangka mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, ancaman dan kesempatan. Demi terbentuknya dan berkembangnya umat yang dapat membuktikan kebenaran nilai-nilai Islam, sehingga umat manusia menjadi saksi akan kebenaran tersebut *Li takuunu syuhadaan alannaas*.

Pelaksanaan Pendidikan Islam

Bila kita perhatikan sepak terjang Pak Natsir dalam perjuangan hidupnya sebagai seorang yang berlatar belakang pendidikan Barat dan pendidikan Islam. Beliau menjadi guru dan melaksanakan pendidikan Islam, yang kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan formal. Dengan peringkat jenjang yang setara dengan taman kanak-kanak (kindergarten) HIS (Holland Inlandsche School), MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) dan bahkan AMS (Algemene Middelbaar School) yang kemudian bernama Pendis (Pendidikan Islam).

Di samping itu, beliau banyak menerbitkan tulisan yang sangat dalam kandungannya, di mass media. Di antaranya "*Pembela Islam*", "*Pedoman Islam*", "*Panji Islam*" dan lain-lain. Di samping buku-bukunya seperti *Capita Selecta*, dan tulisan-tulisan dalam bentuk buku dan ditulis oleh orang lain. Misalnya, "*Moh. Natsir dalam Revolusi Indonesia*", dan "*Islam dan akal merdeka*".

Beliau tidak hanya melakukan tugas-tugas kewartawanan tetapi juga tampil sebagai pemikir dalam berbagai bidang. Bahkan sebagai pemimpin yang memiliki gagasan-gagasannya dan kemampuan manajemennya. Mulai JIB (Jong Islamieten Bond), anggota Dewan Da'wah, dan lain-lain.

Sampai akhir hayatnya tidak hentinya memberikan pandangan, gagasan dan bahkan sebagai pemrakarsa untuk kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek yang bermanfaat bagi umat. Baik secara nasional maupun internasional. Antara lain, Rabithah Alam Islami, Mu'tamar Alam Islami sampai-sampai gagasan-gagasannya mengenai masjid kampus, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKSPTIS), Rumah Sakit Islam, Perguruan Tinggi Islam International, Konferensi Dunia tentang pendidikan Islam dan lain-lain.

Salah satu inferensi yang dapat ditarik ialah bahwa Pak Natsir mengajarkan kepada umat Islam pentingnya kegiatan terpadu antara pendidikan dan kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan politik sebagai suatu upaya kemasyarakatan (politik keumatan). Dan upaya politik yang menuju partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintahan serta kerjasama kemasyarakatan dengan pendekatan modus vivendi dan modus operandi (politik kekuasaan).

Dengan meletakkan usaha pendidikan dan da'wah pada umumnya sebagai landasan yang harus dibina secara terus-menerus dan berkesinambungan. Bahkan memperlakukan kegiatan tersebut sebagai basis untuk kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk kegiatan dalam pemerintahan.

Dalam hal ini kita melihat langkah ketika membangun Dewan Dakwah Islamiyah sebagai organisasi da'wah dalam arti yang luas, pada saat peranan politik umat Islam yang ditandai oleh dibubarkannya Masyumi, sampai merosotnya jumlah wakil rakyat yang mewakili partai politik Islam, baik di Lembaga Legislatif maupun di eksekutif pelaksanaan pendidikan umat Islam dalam bentuk kegiatannya meliputi pendidikan kemasyarakatan seperti pengajian, diskusi kelompok (usroh) dan Tabligh (bi lisanil maqol - bi lisanil haal).

Beliau menyarankan didirikannya semacam Sekolah Tinggi Islam di samping penataran-penataran yang bersifat non formal bagi para muballigh dan penyuluh Islam yang kurikulumnya mengandung ilmu pengetahuan umum (modern science) dan ketrampilan. Seperti, bahasa, ilmu alam, ilmu bumi, ilmu hitung, sejarah dan lain-lain sebagai penambah melengkapi persediaannya untuk pekerjaan sebagai muballigh Islam kelak.

Sebaliknya di dalam upaya melaksanakan optimalisasi, peningkatan kompetitif umat Islam dalam ilmu-ilmu modern hendaknya membuat satu sekolah untuk ilmu keduniaan (kebaratan) dan memakai semangat Islam sebagai dasar,

Walaupun kita menyaksikan pandangan beliau pada saat itu mengenai semangat Islam terkesan sebagai nilai pendamping dalam modern science. Terutama apabila dihubungkan dengan suasana pada saat itu, epistemologi ilmu dan teknologi bersifat bebas nilai (*value free*). Akan tetapi kalau kita hubungkan kata dasar yang beliau pakai dan perkembangan dalam masa-masa selanjutnya, beliau sangat mendukung konsep IDI (Islam untuk Disiplin Ilmu).

Suatu upaya pembaharuan epistemologi ilmu dengan pendekatan integralistik (tidak hanya didasarkan kepada data empirik belaka yang merupakan gejala-gejala lahir atau fisik sebagai satu-satunya pembuktian kebenaran dan dasar untuk mengambil kesimpulan secara inferensial). Maka kata *dasar* tersebut merupakan nuansa ekspresi implisit sebuah renungan tentang integratifnya nilai dan fungsi dalam konsep ilmu.

Selanjutnya, senapas dengan pandangan beliau mengenai pentingnya ilmu pengetahuan umum, dalam upaya pendidikan menuju tercapainya kematangan otak (*maturiteit*) atau persediaan rohani yang cukup untuk berpikir menurut garisan ilmu pengetahuan. Suatu kompetensi yang kini banyak dikeluhkan oleh sebagai kekurangan sistem pendidikan formal.

Di dalam proses belajar mengajar beliau mendorong umat Islam untuk mau mendirikan Sekolah Guru dan mengajak generasi muda untuk mau berkorban menjadi guru. Dan orangtua sudi pula mengarahkan anak-anak dan kemenakan mereka, menyebarkan diri dalam kalangan rakyat. Mengarahkan mereka memasuki sekolah-sekolah guru yang ada, baik kepunyaan pemerintah ataupun bukan, asal dengan cita-cita akan bekerja dibarisan rakyat, bukan dibelakang loket kantoran mereka. Supaya orang tua-tua kita menambah banyak-nya sekolah-sekolah guru partikelir

Sementara itu, beliau wanti-wanti agar kita memperhatikan satu keterampilan yang memiliki peran strategis dalam proses belajar-mengajar. Yaitu suatu teknik atau kemampuan yang harus diajarkan atau dilatih kepada anak didik agar proses belajarnya berhasil ialah teknik belajar.

Beliau mengemukakan pendapat Prof. van der Ley dalam rapat Paedagogisch Studie Comité, "De heeren weten niet wat studeeren atau ketidakmampuan para pemegang diploma HBS untuk menerima pelajaran sekolah tinggi.

Pak Natsir menyampaikan pendapat ini dalam pandangannya yang lain yaitu pentingnya melaksanakan "integrasi raw input". Sekolah tinggi dapat menerima murid tidak hanya lulusan HBS tetapi juga lulusan Tsanawiyah dan Pesantren yang cukup matang untuk menduduki bangku sekolah tinggi.

Maafum mukholafah gagasan ini ialah bahwa umat Islam harus melakukan upaya-upaya pendidikan yang anak didiknya dapat meme-

nuli syarat-syarat (requirements) untuk bisa diterima di Sekolah Tinggi. Artinya, Pesantren dan Madrasah Tsanawiyah harus menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bahan ajarannya didisain demikian rupa, sehingga memberikan kematangan kepada anak didiknya dalam penguasaan ilmu pengetahuan umum dan kemampuan berpikir yang diperlukan untuk keberhasilan dan penyelesaian dan penyelesaian studinya di Perguruan Tinggi.

Kurang lebih 30 tahun setelah ide ini dikumpulkan dan setelah umat Islam mengupayakan perkembangan pendidikan dari bentuk pesantren ke bentuk madrasah dan Sekolah Islam. Departemen Agama bersama Departemen Pendidikan dan Dalam Negeri mengeluarkan SK Bersama yang isinya mewajibkan Madrasah Negeri untuk melengkapi kurikulumnya dengan Ilmu Pengetahuan Umum, agar lulusan Madrasah mempunyai akses memasuki Pendidikan Lanjutan Umum.

Pendekatan "tambal sulam" (*scissor-and-paste*) dalam desain kurikulum di madrasah, dalam analisis empiriknya menimbulkan keraguan sehingga terjadi perbandingan 70%-30% diubah kembali menjadi 30%-70% (antara Ilmu Pengetahuan Umum - Ilmu Agama).

Seperti halnya membalikkan arus lalu-lintas di satu jalan yang padat yang dimulai dari sebelah Selatan ke sebelah Utara, di ubah menjadi dari arah Utara ke arah Selatan yang kemudian, karena tidak mengurangi arus lalu lintas, diubah lagi dari arah Selatan ke Utara.

Wallaahu a'lam apakah pendekatan ini dapat menyelesaikan masalahnya. Atau mungkin kita sudah waktunya memikirkan penyelesaian masalahnya dengan pendekatan lain. Umpamanya melakukan pendekatan integratif untuk masing-masing kelompok Ilmu Pengetahuan Umum yang berhubungan dengan Ilmu Agama dan selanjutnya.

Atau bahkan sesuai dengan trend masa kini seperti yang terjadi di seluruh dunia pendekatan integralistik (*integralistic approach*) dalam epistemologi ilmu (antar ilmu nilai Islam, fungsi dengan struktur dan metodologi ilmu).

Apabila hal ini terjadi, penulis melihat kelayakan (*feasibility*) terlaksananya program efektif di Pesantren dan Madrasah untuk - sesuai dengan kemampuan atau hasratnya - memilih program disiplin ilmu selain Ilmu Agama. Dan begitu juga sebaliknya di sekolah umum yang memiliki kekhususan agama.

Dengan demikian, baik Pesantren, Madrasah maupun sekolah Islam memiliki "daya tampung" yang lebih terbuka bagi generasi muda Islam yang ingin meraih kemajuan dalam berbagai bidang tanpa harus menanggalkan keislamannya. Bahkan sekaligus membuktikan bahwa Islam benar-benar merupakan rahmatan lil alamin, selain secara kooperatif mengembangkan "kemitraan" dalam upaya pembangunan bangsa khususnya di bidang pendidikan.

Apabila pendekatan integralistik yang terjadi baik dalam epistemologi ilmu maupun dalam penyelenggaraan program pendidikan, tidak hanya akan menimbulkan keterbukaan dan kesemestian. Tetapi juga akan membantu upaya keterpaduan dalam sistem pendidikan bangsa kita. Dan tidak akan terjadi dualisme dalam golongan intelegensia Indonesia, khususnya di kalangan umat Islam, karena masing-masing keahlian dalam bidang-bidang tertentu bisa berdiri sama dalam panggung dunia ilmu secara akademis intelektual atau dalam dunia pengabdian secara profesional.

Kedudukan dan Koordinasi Lembaga Pendidikan Swasta

Adalah suatu kenyataan bahwa usaha pendidikan, terutama dalam suatu negara yang penduduknya sangat besar dan menempati wilayah yang sangat luas, tidak mungkin merupakan upaya monopoli. Ia harus merupakan upaya bersama pula antara "orang tua, masyarakat dan pemerintah". Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan swasta sangat mungkin untuk lebih luas dan lebih besar jumlahnya, daripada penyelenggaraan pendidikan negeri.

Konsekuensinya peningkatan kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung kepada kualitas individu yang memperoleh pendidikan di perguruan swasta, di samping lulusan sekolah negeri. Pertumbuhan sekolah swasta di Indonesia, khususnya di kalangan umat Islam, secara historis, sudah diakui keberadaannya, tinggal lagi pengakuan akan pentingnya dan manfaatnya bagi peningkatan kualitas bangsa, umat Islam khususnya.

Tidak bisa lain pendidikan Islam harus diupayakan peningkatan mutunya yang demikian rupa, secara sistematis, lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut harus mampu menawarkan program pendidikan yang secara kompetitif. Hal ini menghajatkan usaha bersama di kalangan Islam yang terkoordinasi secara baik.

Bilamana sudah ada badan yang akan menjadi pusat permusyawaratan, maka ada dua tiga pula cara untuk memulai usaha koordinasi itu. Dari atas yang barangkali boleh dinamakan "deduktif".

Cara yang pertama, umpamanya: Perguruan Tinggi menawarkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kandidat studen yang akan diterima. Berdasarkan kepada tawaran itu, Perguruan Menengah mengatur rencana pelajarannya yang sepadan dengan itu. Sesudah itu, terus pula menawarkan kepada Perguruan Rendah, syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan kandidat-kandidat murid sekolah menengah nantinya. Dengan begitu rencana pelajaran segenap lapisan tersusun.

Cara yang kedua: Pemimpin-pemimpin Perguruan Rendah mulai merancang satu rencana pelajaran yang dapat diikuti kalangan sekolah-sekolah rendah, rancangan itu dibahas wakil-wakil Perguruan Menengah. Dan setelah musyawarah itu menghasilkan hal tertentu, maka dapatlah Perguruan Menengah mendasarkan rencana pelajarannya atas rencana pelajaran Perguruan Rendah itu pula. Dan seterusnya kewajiban pula bagi Perguruan Menengah menyediakan kesempatan bagi murid-murid yang hendak menyambung pelajaran ke Sekolah Tinggi.

Bapak M. Natsir sejak tahun 1930, yaitu ketika pandangan terakhir ini dituliskan beliau telah menyatakan gagasannya tentang upaya kebutuhan upaya koordinatif di kalangan lembaga-lembaga pendidikan Islam, bahkan sampai kepada saat dimunculkannya gagasan-gagasan untuk dibentuknya Badan Kerjasama Pendidikan Pesantren dan Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta yang sampai saat ini masih hidup.

Selain itu dari kata-katanya yang berbunyi Perguruan Menengah menyediakan kesempatan bagi murid-murid yang hendak melanjutkan ke Sekolah Tinggi mengandung "mafhum muwafaqah" atau entailment. Isinya, perlunya kurikulum yang sedikit, berbeda dengan kurikulum yang "melayani" mereka yang "tidak akan" melanjutkan pelajarannya ke Perguruan Tinggi. Mungkin hal ini sejalan dengan program Pemerintah sejak tahun ajaran 1994 adanya program keterampilan bagi sekolah umum di samping adanya sekolah khusus untuk keterampilan yang disebut sekolah kejuruan.

Sifat atau gagasan kerjasama yang sejalan dengan ide demokrasi seperti usul beliau mengenai dibentuknya "Permusi" atau Perikatan

Perguruan-Perguruan Muslim Indonesia tidak melemahkan kehalusan budinya, yang tampak pada ide-ide kooperatif dengan pemerintah dalam bentuk kemitraan yang saling bantu. Pemerintah mengusahakan kesempatan untuk menerima pelajaran yang baik dengan sebisanya; sekiranya Pemerintah tak sanggup mencukupkan yang demikian secukup-cukupnya, hendaklah memberi tunjangan yang sebesar-besarnya kepada perguruan-perguruan swasta yang memberi pelajaran yang baik.

Tingkat pelajaran yang kurang baik harus dicoba dengan segera agar mencapai tingkatan pelajaran-pelajaran yang sempurna dengan tunjangan pemerintah. Apabila mereka dalam hal ini tidak juga mendapat hasil yang baik, maka tetaplah dia (perguruan swasta) dengan hakikatnya yang ada, sebagai pekerjaan sosial yang kurang berharga

Ide-idenya tentang kerjasama di antara Perguruan Islam swasta dan di antara Perguruan Islam Pemerintah secara universal terkait dengan pandangan kemanusiaan yang tidak bersifat chauvinistik atau nativistik. Secara sosial politik dapat dikategorikan kepada upaya yang berhubungan dengan "machtvorming" dan secara diplomatis merupakan upaya lobby yang mendasarkan rasionalnya terhadap suatu dasar.

Mohammad Natsir dan Konsep Pendidikan yang Integral

Oleh: Dr. Mochtar Naim

1

Ketika saya mahasiswa, 1950-an di Yogyakarta, saya memilih kegiatan kemahasiswaan yang persis sama seperti yang dilakukan oleh adik-adik dan anak-kemenakan kita di Youth Islamic Study Club (YISC) Al-Azhar. Bersama kawan-kawan lain di Asrama Yasma, Mesjid Syuhada, dan di luarnya, kami mendirikan Islam Study Club (ISC), yang kegiatannya terpusat di Mesjid Syuhada dan dapurnya Asrama Yasma.

ISC sebenarnya bermula di Solo, di bawah pimpinan Mr. Moeljono (?), kemudian meluas ke Semarang, Surabaya, dan kota-kota lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Kami bahkan melakukan konferensi tahunan bersama, untuk menyamakan langkah dan bahasa, seperti istilah sekarang, walau dengan konotasi yang jauh berbeda – karena pada waktu itu kita masih berfikir egaliter dalam bingkai demokrasi. Dan ketika saya ke McGill, Kanada melanjutkan studi, 1957, ISC bahkan berkembang dan maju pesat. Nama-nama yang kemudian menjadi orang besar dan berpangkat tinggi di birokrasi Pemerintah yang dahulu bersekolah di zaman saya di Yogya itu banyak yang menjadi aktivis dan pengikut setia dari ISC.

Kegiatan ceramah dan diskusi dilakukan secara rutin sekali sebulan, dengan mengundang tokoh-tokoh terkenal dalam bidangnya masing-masing. Pengajian setiap Minggu subuh dengan nama Kuliah Subuh. Agaknya nama Kuliah Subuh ini kami yang menciptakan dahulu di Yogyakarta, yang kemudian berkembang dikota-kota lainnya di seluruh Indonesia.

Untuk Kuliah Subuh tenaga penceramahnya lebih banyak kami andalkan kepada tokoh-tokoh ulama dan intelek yang tinggal di Yogya, termasuk KH Anwar Musaddad, Pak A.R., Pak Baswedan, Pak Ahmad Basuni, dan sebagainya. Sementara penceramah untuk ISC sekali sebulan, kecuali yang dekat-dekat, dari Yogya, Solo dan Semarang, kami-pun juga mengundang dari Jakarta, termasuk Pak Hatta, Pak Hamka, Pak Kasman Singodimedjo dan Pak Natsir.

Pak Natsir di ISC ketika itu menyampaikan konsep "Integrasi Pendidikan dalam Islam" kata "integral" dan "integrasi" ini sudah bukan barang baru lagi dalam kamus perbendaharaan politik dan kebudayaan Indonesia. Karena Pak Natsir di tahun 1950 mengajukan Mosi Integral di Parlemen RIS, yang menjadi historik dan sangat terkenal itu, yaitu menyatukan Indonesia yang terpecah-pecah ke dalam negara-negara bagian itu (Negara RI Yogya dan negara-negara Federal bentukan Belanda) menjadi sebuah negara kesatuan R.I.

Pak Natsir tidak mempersoalkan apakah bentuknya unitaris atau federal, yang pokok bersatu dalam satu negara kesatuan yang utuh. Dalam pikiran Pak Natsir waktu itu, saya duga, negara federal pun adalah juga satu bentuk dari negara kesatuan, di samping yang berbentuk unitaris. Hanya *timing* dan sikonnya barangkali yang tak tepat untuk menonjolkan bentuk federalis pada waktu itu, karena yang ingin dibubarkan adalah yang berbentuk federal itu pula.

Yang dituju sesungguhnya adalah: negara-negara boneka bentukan Belanda itu harus dihapus, karena kemerdekaan itu bukanlah pemberian Belanda, tetapi hasil dari perjuangan bangsa sendiri, dengan darah dan nyawa dan melalui perjuangan diplomasi di forum-forum Nasional dan Internasional. Negara-negara boneka harus diintegrasikan ke dalam Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta tanggal 17 Agustus 1945.¹

2

Dalam ceramah beliau sekitar tahun 1955 di ISC, Yogya, beliau mengemukakan konsep integrasi pendidikan. Kebetulan waktu itu hangat dibicarakan tentang kemungkinan dihapusnya wewenang Departemen Agama dan departemen lainnya mengurus sekolah-sekolah sendiri, dan langsung di bawah pengelolaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu, nama departemen adalah kementerian.

Dalam diskusi-diskusi dan obrolan-obrolan santai tapi hangat, di asrama Yasma mayoritas dari kami tidak menginginkan diintegrasikannya pengelolaan pendidikan dalam berbagai bentuk dan corak warna itu ke tangan PDK yang didominasi oleh orang "sekuler", karena khawatir akan "mematikan", atau sekurangnya "mengecilkan" peranan Islam dalam bidang pendidikan.

Rata-rata kami berpendapat bahwa Kementerian Agama adalah basis perjuangan umat Islam dalam Pemerintahan untuk berjalannya ajaran Islam, minimal di kalangan umat sendiri. Maka akhirnya diputuskan mengundang Pak Natsir.

Anehnya, seperti Mosi Integral itu juga, Pak Natsir tidak menyinggung masalah mau diletakkan ke mana sekolah-sekolah agama yang di bawah Kementerian Agama itu. Yang beliau singgung adalah hal-hal yang esensial dari pendidikan. Yaitu mengenai filosofi, wezen, di dunia sebagai hamba Allah. Sekaligus Khalifah Allah di muka bumi ini, untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti.

Maka dalam konteks ini masalah dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum yang dihebohkan oleh kita-kita ini sampai sekarang, menjadi kecil artinya. Walaupun Pak Natsir, seperti dalam tulisan-tulisannya sejak tahun 1930-an, bukan tidak menyinggung mengenai dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama, karena hal ini ada seginya sendiri.

Tetapi masalah yang utama bagi Pak Natsir sejak dari semula adalah bagaimana mengembalikan masalah pendidikan ini kepada pokok pangkal semula. Pendidikan, sebagaimana yang lain-lainnya dari berbagai aspek kehidupan umat Islam, harus bermula dan memancar dari Kalimah Tauhid, dan merujuk tiap kali kepada Kalimah Tauhid itu.

Pidato beliau pada rapat Persatuan Islam di Bogor, 17 Juni 1934, dengan judul "*Ideologi Didikan Islam*"² maupun tulisan beliau di *Pedoman Masyarakat* tiga tahun kemudian (1937), dengan judul "*Tauhid Sebagai Dasar Didikan*",³ dengan jelas dan gamblang sekali menggariskan ideologi pendidikan ummat Islam yang harus bertitik-tolak dari dan berorientasi kepada kata Tauhid, yang bersimpul dalam dua kalimah syahadah itu.

Hal ini bahkan beliau pertegas lagi dalam sebuah tangkisan atas kritik tajam Dr. I.J. Brugmans dalam bukunya: *Geschiedenis van het*

Onderwijs in Ned. Indie, dengan judul tulisan: "*Hakikat Agama Islam*", yang dimuat dalam *Panji Islam* (Oktober 1938).⁴

Dalam pidato beliau di Bogor itu secara retorik beliau menanyakan: "Apakah kiranya menjadi tujuan dari didikan Islam itu?" Beliau jawab sendiri dengan terlebih dahulu menjelaskan secara ringkas arti "didikan" itu sendiri.

Mari kita ikuti sejenak bagaimana halus sayatnya Pak Natsir menguraikan masalah yang sangat mendasar ini (.... padahal umur beliau waktu itu masih 26 tahun).

"Yang dinamakan "didikan" ialah satu pimpinan jasmani dan rohani yang menuju kepada kesempurnaan dan lengkapnya sifat-sifat kemanusiaan dengan arti yang sesungguhnya. Pimpinan semacam ini sekurangnya a.l. perlu kepada dua perkara:

- a. Satu tujuan yang tertentu tempat mengarahkan didikan.
- b. Satu asas tempat mendasarkannya.

"Akan sia-sialah tiap pimpinan itu apabila ketinggalan salah satu dari yang dua ini". Pertanyaan: "Apakah tujuan yang akan dituju oleh didikan kita?", sebenarnya tidak pula dapat dijawab sebelum menjawab pertanyaan yang lebih tinggi lagi, yaitu: "Apakah tujuan hidup kita di dunia ini?" Kedua pertanyaan ini tidak dapat dipisahkan, keduanya sama (identiek). "Tujuan didikan ialah Tujuan-Hidup".

Qur'anul-Hakim menjawab pertanyaan ini begini: *Dan Aku (Allah), inilah tujuan hidup kita di atas dunia ini. Dan lantaran itu, inilah pula tujuan didikan yang wajib kita berikan kepada anak-anak kita, yang lagi sedang menghadapi kehidupan.*⁵

Dan syarat untuk menjadi hamba Allah, dijelaskan lagi, ada dua: "yang sebenar-benarnya takut kepada Allah", dan "mempunyai ilmu". Bukanlah Natsir kalau argumentasi tidak didasarkan kepada dalil ayat dan hadits.

Beliau mensitir ayat 28 Surah Fathir:

Bahwa yang sebenar-benarnya takut kepada Allah itu ialah hamba-hamba-Nya yang mempunyai ilmu, sesungguhnya Allah itu Berkuasa lagi Pengampun. Memiliki ilmu, oleh karena itu, adalah syarat yang penting untuk menjadi hamba Allah.

Dan karenanya Allah meninggikan derajat hamba-Nya yang berilmu sebagai pemimpin untuk manusia. Mereka menurut perintah Allah dan

berbuat baik kepada sesama makhluk, lagi menunaikan ibadah terhadap Tuhannya". (Al Baqarah: 177).

Dan hanya kepada merekalah Tuhan mewariskan dunia ini" (Al-Anbiya: 105-106). Menghambakan diri bukanlah untuk kepentingan yang disembah (Allah) tetapi untuk kepentingan yang menyembah sendiri. (An-Naml: 40).

Natsir lalu menguncinya dengan menekankan: ⁶

"Perhambaan kepada Allah yang jadi tujuan hidup dan jadi tujuan didikan kita, bukanlah suatu perhambaan yang memberi keuntungan kepada yang disembah, tetapi perhambaan yang mendatangkan kebahagiaan kepada yang menyembah, perhambaan yang memberi kekuatan kepada yang memperhambakan dirinya itu".

"Akan menjadi orang yang memperhambakan segenap rohani dan jasmaninya kepada Allah SWT untuk kemenangan dirinya dengan arti yang seluas-luasnya yang dapat dicapai oleh manusia, itulah tujuan hidup manusia di atas dunia. Dan itulah tujuan didikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita kaum Muslimin".

Inilah "*Islamietish Paedagogisch Ideaal*" yang gemerlapan yang harus memberi suara kepada tiap-tiap penduduk Muslimin dalam mengemukakan perahu pendidikannya.

Dan karena beliau sebelumnya dalam uraiannya mengaitkannya dengan sistem pendidikan Barat yang biasa dipertentangkan orang dengan sistem pendidikan Timur, beliau lalu kunci lagi dengan mengatakan: "Apakah yang semacam itu didikan ke"barat"an atau ke"timur"an namanya, tidak menjadi soal.

Timur kepunyaan Allah, Baratpun kepunyaan Allah juga, sebagai makhluk yang bersifat "hadits" (baharu), kedua-duanya, Barat dan Timur, mempunyai hal yang kurang baik dan yang baik, mengandung beberapa kelebihan dan beberapa keburukan.

Seorang pendidik Islam tidak usah memperdalam-dalam dan memperbesar-besarkan antagonisme (pertentangan) antara Barat dan Timur itu. Islam hanya mengenal antagonisme antara hak dan bathil. Semua yang hak itu terima, biarpun datangnya dari "Barat", semua yang bathil akan ia singkirkan walaupun datangnya dari "Timur".

Dengan demikian, sekaligus, konsep pendidikan menurut Islam seperti yang dijelaskan oleh Natsir itu sama sekali tidaklah parokial,

tetapi adalah universal, tidak Timur dan tidak pula Barat (La Syarqiyah, wa la gharbiyah), sambil mengambil yang baik dari manapun datangnya, dan membuang yang jelek dari manapun pula datangnya.

"Buat seorang hamba Allah", kata Natsir, "jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, bukanlah dua barang yang bertentangan yang harus dipisahkan, melainkan dua serangkai yang harus lengkap melengkapi dan dilebur menjadi satu susunan yang harmonis dan seimbang.

Inilah yang dimaksud oleh Firman Allah:

*Dan demikianlah kami jadikan kamu suatu umat yang seimbang, adil dan hamonis supaya kamu jadi pengawas bagi manusia dan Rasul jadi pengawas atas kamu. (Al Baqarah: 143.)*⁸

Dengan demikian, sistem pendidikan Islam, menurut Natsir, sifatnya adalah integral, universal dan harmonis dalam mencapai kebahagiaan dalam menghambakan diri kepada Allah SWT dan dalam rangka membina hari esok yang lebih baik, di dunia ini dan di akhirat nanti.

Dalam tulisannya "*Tauhid sebagai Dasar Didikan*" (Pedoman Masyarakat, 1937),⁹ beliau membawakan cerita pilu dan tragis dari seorang profesor ilmu fisika kenamaan yang membunuh diri, setelah membunuh anak satu-satunya yang teramat disayangnya karena kehilangan tempat bergantung.

Semata ilmu pengetahuan yang betapa pun dipuja ternyata tidak dapat menyelamatkannya karena ketiadaan tempat bergantung yang bersifat spiritual itu. Oleh karena itu diperlukan keseimbangan antara yang intelektual dan yang spiritual, antara jasmani dan rohani. Itulah yang diberikan oleh Islam, dan itu pula landasan sistem pendidikan Islam, kata Natsir.

Beliau mengajak pembacanya menengok bagaimana Al-Qur'an mengajarkan Tauhid melalui kisah wasiat dari seorang bapak mengajarkan Tauhid kepada anaknya. "Perhatikanlah tatkala Lukman berkata kepada anaknya yang sedang ia beri didikan: *Hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Tuhan, sesungguhnya syirik itu ialah sebesar-besarnya kezaliman ... (Luqman: 13-14).*

Memberi didikan Tauhid kepada anak haruslah sedini mungkin, selagi masih muda dan mudah dibentuk, sebelum rebung menjadi betung, dan sebelum kedahuluan oleh faham dan ideologi lainnya.

Adalah tugas dari Bapak untuk memperkenalkan kepada anaknya "tali Allah" tempat ia bergantung, dan mengajarnya untuk bersyukur

kepada Allah dan kepada kedua orang Ibu-Bapak, di samping berbuat baik kepada sesama manusia.¹⁰

Ajaran Tauhid manifestasinya adalah pembentukan kepribadian dan sasaran serta tujuan dari pendidikan itu sendiri. Natsir lalu mengisahkan kehidupan Ismail yang merelakan nyawanya karena memenuhi kehendak Allah melalui mimpi yang diterima oleh ayahnya Ibrahim.

"Itulah buah pendidikan yang berdasarkan Tauhid",¹¹ kata Natsir. Pendidikan yang didasarkan kepada prinsip Tauhid dan dalam rangka pengemban diri hanya pada Allah, simpulnya terletak pada Syahadah. Dan Syahadah dari sisi pendidikan tidak lain adalah sebuah pernyataan "pembebasan" dari segala macam belenggu yang diciptakan oleh manusia sendiri.

Melalui kredo Tauhid ini, Islam menggalakkan penganutnya untuk menggunakan akalnyanya dengan sebaik-baiknya. Akal adalah pemberian Allah yang tertinggi yang diberikan hanya kepada manusia dan tidak kepada makhluk lainnya.

Bertebaran ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mendorong orang Islam untuk mempergunakan akalnyanya dan memperhatikan segala bentuk ciptaan-Nya. Menemukan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, serta hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang begitu teratur yang berlaku padanya. Dari obyek alam yang bersifat makro kosmos sampai ke yang mikro kosmos sekalipun.

Untuk itu bukan sia-sia kalau ayat yang diturunkan adalah: *"Iqra" Baca! Bacalah, dengan nama Tuhanmu Yang menjadikan! Yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah; Bacalah, dan Tuhan engkau itu Maha Mulia, yang telah mengajar manusia akan apa yang tidak mereka ketahui.* (Al Alaq 1-5).

Dengan demikian, Islam tidak hanya menghormati akal dan meletak-kannya pada tempat yang terhormat, Islam bahkan mewajibkan kepada setiap pemeluknya, laki-laki dan perempuan, untuk menuntut ilmu dan menghormati mereka yang mempunyai ilmu.

Konsep life long education yang dalam dunia modern baru dikenal sekarang, Islam telah mengajarkannya sejak 14 abad yang lalu. "Tuntutlah ilmu dari buaian sampai ke liang lahat". Dan "Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina sekali pun". (Hadits).

Islam sebaliknya melarang orang bertaklid buta. Islam menggem-birakan pemeluknya "supaya selalu berusaha mengadakan barang yang belum ada, merintis jalan yang belum ditempuh, membuat inisiatif dalam hak keduniaan yang memberi manfaat kepada masyarakat".

Agama Islam bahkan menggembirakan pemeluknya "pergi meninggalkan kampung dan halaman, berjalan ke negeri lain, memperhubungkan silaturahmi dengan bangsa dan golongan lain, saling bertukar pengetahuan, pandangan dan perasaan".¹²

Semua ini dikeinukakan oleh Natsir dalam menangkis tuduhan dari Dr. I.J. Brugmans dalam bukunya "*Geschiedenis van het Onderwijs in Ned. Indie*" (Sejarah Pendidikan di Hindia Belanda) yang mengatak-an bahwa Islam adalah agama penaklukan yang disebarkan dengan pedang. Bukan dengan suyu (pedang), tapi dengan kalam (pena). kata Natsir.¹³

Yang ingin ditekankan oleh Natsir dalam argumentasinya itu ada-lah bahwa Islam pada hakekatnya adalah agama "Tarbiyah", agama pendidikan, yang diajarkan oleh Tuhan kepada hamba-Nya. Salah satu dari sifat-Nya adalah juga Rabb (Maha Pendidik, Maha Pengatur) Mendidik dan Mengatur sekalian alam (Rabbul 'alamin).

Dengan kata tarbiyah ini, dia lalu mencakup semua aspek: yang duniawi dan yang ukhrawi, rohani dan jasmani, intelektual dan etika budi pekerti, formal dan non formal, yang ditujukan terhadap diri sendiri, maupun keluarga dan masyarakat seutuhnya, dan semua bersifat universal, integral dan harmonis itu.

Karena tarbiyah adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti selagi hayat dikandung badan, maka kewajiban menuntut ilmu dan mendidik serta mendapatkan pendidikan itu adalah kewajiban sepanjang umur: dari buaian sampai ke liang lahad.

Dengan demikian, kembali kepada argumentasi Pak Natsir semula, "didikan: (pendidikan) mempunyai satu tujuan asas yang sama dengan tujuan dan asas kehidupan itu sendiri, yaitu dalam kata-kata Pak Natsir sendiri seperti yang telah dikutip di muka: "penghambaan" yang mendatangkan kebahagiaan kepada yang menyembah; peng-hambaan yang memberi kekuatan kepada yang memperhambakan dirinya itu: memperhambakan segenap rohani dan jasmaninya kepada Allah SWT untuk kemenangan dirinya dengan arti yang seluas-luasnya.¹⁴

Konsep pendidikan yang bersifat integral, universal dan harmonis itu, seingat saya yang disampaikan kembali oleh Pak Natsir dalam ceramahnya di ISC Yogya sekitar tahun 1955 itu.

Kalau kita perhatikan tulisan-tulisan Pak Natsir yang berkaitan dengan pendidikan, sejak dari "Ideologi Didikan Islam" yang berupa pidatonya pada rapat Persatuan Islam di Bogor tahun 1934. Sampai kepada yang lain sudah sempat dibubuhkan dalam beberapa karangan tersiar,¹⁵ kita akan melihat benang merah pemikiran Pak Natsir yang sangat konsisten sejak semula.

Hal ini bisa dipahami karena Pak Natsir dalam menjabarkan konsep-konsep pendidikannya itu, seperti dengan konsep yang lain-lainnya juga, selalu merujuk kepada sumber rujukan utama, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Namun yang sangat menarik yang kita lihat sejak semula adalah bahwa Pak Natsir tak kurangnya harus bergelut dengan kenyataan-kenyataan aktual dan empirikal yang dihadapi yang tidak sejalan dengan konsep pendidikan yang oleh Natsir sendiri dikatakan sebagai "Islamietisch Paedagogisch Ideaal" itu.

Menyadari akan hal itu pula barangkali, maka Natsir muda di tahun 1929, mengambil keputusan yang boleh dikatakan "nekad", yaitu tidak melanjutkan sekolahnya ke tingkat perguruan tinggi, walau diberi kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke Rechtshogeschool di Betawi – seperti yang dia cita-citakan sendiri dan didukung oleh orang tuanya – atau ke Sekolah Tinggi di Negeri Belanda dengan beasiswa.

Dia memilih menjadi jurnalis di Pembela Islam, walau dengan honor yang lebih rendah dari yang dia terima, berupa beasiswa sewaktu belajar di AMS Afdeling A (Sastera Barat) Bandung.

Tiga tahun kemudian (1932), di samping tetap menulis dan berorganisasi, beliau membuka sekolah, dengan nama "Pendidikan Islam" (Pendis), yang dimulai dengan sangat bersahaja, dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tapi yang selalu berkembang dan berkemajuan.¹⁶

Pada waktu Jepang masuk dan sekolahnya juga ditutup tahun 1942, Pendis telah berkembang dan memiliki sekolah-sekolah dari Taman

Kanak-Kanak (Frobelschool), HIS, MULO dan Kweekschool, yang juga mempunyai cabang di beberapa kota lain.¹⁷

Natsir dengan keputusan nekadnya di tahun 1929 itu ternyata secara sadar dan dengan visionernya yang jauh ke depan telah menggunakan dua senjata ampuh yang tidak pernah lepas dari tangannya sampai ke akhir hayatnya, yaitu "dakwah" dan "Tarbiyah". Antara dakwah dan tarbiyah berjalan berkelindan, bagai pedang bermata dua. Walau beliau memasuki berbagai bidang kegiatan yang sangat beragam dalam masyarakat dan negara, namun motifnya, apapun yang beliau pegang, adalah dakwah dan tarbiyah dalam pengertian yang seluas-luasnya itu.

Dia langsung terjun ke masyarakat setelah lulus AMS – yang tak lebih dari SMA sekarang – karena suara halus yang tiap kali membisikkan ke telinganya, agar diapun termasuk golongan orang yang sedikit *yang menyeru manusia kepada kebaikan, menyeruh kepada yang makruf dan melarangnya daripada kejahatan, dan menyeru-penyeru ini adalah orang yang mendapat kemenangan dan keberuntungan* (Ali Imran 104).

Masalah pertama yang beliau hadapi sendiri dengan Pendis-nya adalah bagaimana menghadapi dikotomi pendidikan yang diakibatkan oleh penjajahan Belanda dan perkembangan kebudayaan yang diakibatkan oleh Renaissance di Barat yang menjalar ke seluruh dunia. Dikotomi yang sama karenanya juga dihadapi oleh hampir seluruh dunia Islam yang waktu itu rata-rata berada di bawah penjajahan Barat.

Tulisan-tulisan Pak Natsir di Panji Islam dan Pedoman Masyarakat sejak tahun 1938 seperti yang terekam dalam bab 2 dan 3 mengenai "Pendidikan" dan "Agama" dalam Capita Selecta jilid 1¹⁸ – memperlihatkan pergulatan yang diakibatkan oleh adanya dualisme dan dikotomi dari sistem pendidikan yang dihadapi oleh umat Islam di mana-mana, khususnya di Indonesia ini.

Ada dua jalur pendidikan agama yang bahkan berlanjut sampai ke zaman kita sekarang ini, telah menyebabkan terpecahnya pula masyarakat umat ke dalam dua jalur yang terpisah itu: kelompok umat yang dihasilkan oleh sistem pendidikan umum dan kelompok umat yang dihasilkan oleh sistem pendidikan agama. Jika saja kedua jalur ini diartikan dalam arti profesional, masyarakat ummat bagaimanapun memerlukan keduanya. Tetapi dikotomi sekaligus menggambarkan bukan saja perbedaan sistem, tetapi perbedaan orientasi dan bahkan filosofi dari pendidikan itu sendiri.

Resep-resep yang dikemukakan oleh Natsir dalam menjembatani dikotomi ini, seperti yang dilakukannya dengan Pendis-nya sendiri, adalah dengan mengisi kekurangan yang satu dengan kelebihan yang lain, dengan tetap mentolerir adanya dikotomi itu.

Natsir sendiri, sejauh yang saya amati, tidak pernah sampai kepada konsep pendidikan yang utuh dan menyeluruh dalam artian operasional-programatis dalam rangka merealisasikan konsep pendidikan yang *Islamietisch-paedagogisch* ideal itu.

Faktor pertimbangan praktis-pragmatis yang diakibatkan oleh kenyataan-kenyataan sosiologis-historis yang dihadapi oleh umat di mana-mana itu mungkin saja telah menyebabkan Natsir harus membaginya ke dalam dua sasaran yang berbeda, tetapi bertingkat, yaitu sasaran antara yang bersifat taktis-pragmatis dan sasaran ultimat dalam artian yang *peadagogis-ideal* itu. Yang beliau lakukan di Pendis dan yang beliau ungkapkan dalam tulisan-tulisan beliau dalam menanggulangi masalah pendidikan umat yang bersifat faktual itu, lebih bersifat sasaran antara.

Reaksi beliau terhadap rencana Dr. Satiman ingin membuka Sekolah Tinggi Islam di Solo bagi siswa-siswa lulusan sekolah umum untuk menjadi *muballigh*,¹⁹ jelas menggambarkan cara berfikir yang taktis-pragmatis ini. Pak Natsir lebih melihat justru anak-anak lulusan madrasah dan pesantrenlah yang seharusnya diterima di sebuah Sekolah Tinggi Islam yang tujuannya adalah untuk mencetak kader-kader *muballigh*, dan bukan anak-anak lulusan sekolah umum.

Bahkan keikutsertaan beliau dalam mempersiapkan Sekolah Tinggi Islam di zaman Jepang, yang kemudian menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta yang cukup terkenal, dan yang sekarang adalah yang terbesar di samping yang tertua itu. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Fadhullah Jamil dalam makalahnya: Muhammad Natsir: "Sumbangannya terhadap Bidang Pendidikan", ide pendidikan yang bersifat integral itu munculnya adalah di Malaysia dengan berdirinya sebuah Universitas Islam Antar Bangsa di Kuala Lumpur.²¹

Dalam kaitan inilah, sambil lalu saya ungkapkan di sini rencana pendirian sebuah Universitas Islam di Padang, yang insya Allah akan mengambil nama Allah-yarham: Mohammad Natsir, yang sekaligus diniatkan sebagai sebuah memorial university dalam mengenang jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan kepentingan umat dan syiar Islam di abad ke 20 ini. Universitas Muhammad Natsir yang sedang dipersiapkan di Padang bercerita-cita merealisasikan ide Pak Natsir dalam

artian ultimat. Untuk mengembangkan sistem pendidikan yang berjiwa Islam dan yang bersifat integral, universal dan harmonis itu.

Sistem pendidikan yang bersifat integral, universal dan harmonis tidak lagi mengenal dikotomi antara pendidikan umum dan agama. Semua dasarnya adalah agama, apa pun bidang dan disiplin ilmu yang dimasuki.

Masyarakat modern yang makin canggih dan kompleks dengan sendirinya memerlukan tenaga ahli dan terampil dalam berbagai disiplin ilmu, baik yang selama ini dikategorikan sebagai yang duniawi maupun ukhrowi.

Semua diislamkan pertama-tama memberi ruh Islam ke dalamnya, dan yang kemudian secara epistemologis-metodologis berangsur-angsur juga diserahkan kepada yang berorientasi Islami itu, yang ujungnya dalam artian aksiologi pemanfaatannya adalah dalam rangka penghambaan diri dalam arti yang sesempurna-sempurnanya.

Adalah tugas dari kita semua untuk bersama-sama merumuskan dan memantapkan dalam bentuk-bentuk yang lebih berstruktur dan terprogram dalam pengertiannya yang integral, universal dan harmonis itu. Sistem pendidikan umat dalam menjalani abad kebangkitan Islam abad ke 15 Hijriyah dan abad ke 21 Miladiyah mendatang. Kerjasama yang erat dan saling bahu-membahu antara pakar-pakar pendidikan Islam di negara masing-masing dan antar bangsa sangat diperlukan.

Kami mengkhayalkan bahwa Universitas Mohammad Natsir yang sedang kita persiapkan di Padang adalah juga hasil kerjasama dari pakar-pakar Islam dalam ruang lingkup nasional dan internasional tersebut. Universitas Mohammad Natsir hanya letaknya di Padang yang saya katakan sebagai "a geographical accident", tetapi wawasan dan pemikirannya adalah bersifat universal, integral dan harmonis itu.

Penjabaran dari sistem pendidikan yang Islami yang bersifat integral, universal dan harmonis dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat universitas itu, masih memerlukan upaya dan kerjasama dari semua kita. Pak Natsir sendiri belum sempat turut menggariskannya secara praktis-pragmatis, walau, kita akui beliau adalah dari kelompok pembaharu di dunia Islam yang telah turut menggariskan konsep pendidikan Islam secara integral, universal dan harmonis itu secara konsepsional-teritorial-ideal.

Dan ini adalah pekerjaan rumah yang sifatnya fardhu kifayah tetapi yang tidak seorangpun dari kita yang menganggap diri ikut bertanggung jawab ini, yang bisa melepaskan diri dari tanggung jawab itu.

Seminar ini seyogyanya membuahkan keputusan dan kesepakatan bersama untuk melahirkan komite-komite yang mengarah kepada upaya penjabaran konsep pendidikan yang integral, universal dan harmonis, secara konseptual dan programatis seperti yang dicita-citakan oleh Allahyarham Mohammad Natsir yang kita cintai itu.

Catatan kaki:

1. "Pidato di Parlemen tanggal 3 April 1950 tentang Pembentukan Negara Kesatuan", *Capita Selecta*, jilid 2; DP Sati Alimin, ed; Pustaka Pendis, Jakarta, 1957; PP 3-7.
2. *Capita Selecta*, jilid 1, DP Sati Alimin, ed. W. van Hoeve.
3. *Ibid*, jilid 1, pp 113-118.
4. *Ibid*, pp 119-132.
5. *Ibid*, pp 57-58.
6. *Ibid*, pp 59-61.
7. *Ibid*, p 60.
8. *Ibid*, p 61.
9. *Ibid*, pp 113-118.
10. *Ibid*, pp 116-117.
11. *Ibid*, pp 117-122.
12. *Ibid*, pp 121-122.
13. *Ibid*, p 121.
14. *Ibid*, pp 58-61.
15. Lihat a.l. *Capita Selecta*, jilid 2, *op.cit.*, Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah, Endang S. Anshari, ed. Girimukti Pasaka, Jakarta, 1988.
16. Ayip Rosidi, dalam "Pendahuluan", Kebudayaan Islam, *ibid* pp xii-xxxiii.
17. *Loc.Cit.*
18. *Capita Selecta*, jilid 1, *op.cit.*
19. "Sekolah Tinggi Jamil, "Muhammad Natsir: Sumbangannya terhadap Bidang Pendidikan", pada Seminar Pemikiran dan Perjuangan Bapak Muhammad Natsir, 18-19 Des.1993, Universiti Sains Malaysia.
21. Didirikan tahun 19.. atas prakarsa pemerintah Malaysia.

Topik Diskusi : **Konsepsi Pak Natsir Tentang Agama dan Pendidikan**

Pembicara : **Prof. Dr. Mochtar Naim dan Prof. Dr. Yusuf A. Feisal.**

Penanya Pertama:

Telah disinggung oleh Pak Mochtar Naim, bahwa Pak Natsir terlibat dalam pendirian Sekolah Tinggi Islam di Indonesia dan dicatat dalam sejarah. Tetapi, yang belum pernah kita ketahui adalah tentang bentuk perguruan tinggi Islam. Pada label ataukah pada Islam hal itu dijabarkan dalam menghadapi masa depan?

Profesor Mochtar Yahya di Yogya kaget, tentang Madrasah di Indonesia. Yang sekolah musti bukan agama, sekolah ya sekolah. Bagaimana hal ini menurut pak Mochtar, sehingga masyarakat tetap terpola antara Madrasah dan Sekolah?

Kepada Pak Yusuf. Schubungan dengan pemikiran Pak Natsir dalam bidang pendidikan, apakah kira-kira yang diperlukan bangsa Indonesia pada masa yang akan datang? Apakah seperti Natsir yang mengerti agama dan tahu hukum, ataukah seperti Habibie yang menguasai teknologi tapi tidak mengerti agama?

Apa lagi misalnya, seperti kata Pak Mochtar, di Padang akan didirikan Universitas "Mohammad Natsir". Pengalaman kita dengan nama almarhum Adam Malik di Sumatera Utara terperangkap ke belakang. Artinya, sekolah itu tidak memberikan apa-apa, kecuali memproduksi orang yang tidak ada gunanya. Karena memberi nama tokoh tapi tidak tahu pengaruhnya bagi masyarakat.

Problema pada sekolah-sekolah pendidikan agama adalah tidak adanya prakarsa baru dan saya tidak tahu bagaimana menumbuhkan ini. Sekolah-sekolah Islam sekarang ini mati kreatifitas. Kita beri muatan apa supaya timbul kreatifitas baru dalam menghadapi abad ke 21. Dan sekolah agama menjadi pilihan utama.

Penelitian saya dari 54 ulama di Indonesia hanya 2 Ulama yang menyekolahkan anaknya sekolah agama, yang lainnya memilih sekolah umum. Ketika saya tanya kenapa memilih sekolah umum? Jawabnya, sekolah negeri adalah sekolah kota, sedangkan sekolah agama adalah sekolah kampung. Untuk apa masuk kampung.

Penanya Kedua:

Kepada Bapak Yusuf Faisal, pemikiran Pak Natsir sepertinya tidak *nyambung* ke generasi sekarang. Sehingga generasi muda sekarang merasa asing. Saya baru berpikir, apakah *nyangkut*-nya karena Pak Daud Jusuf jadi Menteri?

Sesudah konsep tentang mesjid kampus yang dikembangkan oleh Pak Natsir dan kawan-kawan, Pak Natsir kemudian melangkah lebih jauh dengan konsep mempersaudarakan kampus dengan pesantren. Kampus di sini maksudnya adalah perguruan tinggi dan pertama kali direalisasikan mahasiswa ITB di pesantren At-Taqwa Bekasi.

Bahkan Pak Natsir sendiri menulis surat kepada almarhum K.H. Nur Ali agar menerima santri-santri ITB. Mahasiswa ITB menjadi santri At-Taqwa selama dua bulan sekaligus, selain sebagai mahasiswa, mereka juga mengajar Matematika dan sebagainya untuk santri-santri At-Taqwa.

Pak Yusuf adalah orang yang diminta Pak Natsir turut mempersiapkan program pesantren mahasiswa ini. Beberapa kali Pak Yusuf bertemu dengan Pak Natsir untuk ini. Saya minta pendapat Pak Yusuf tentang konsep mempersaudarakan kampus dengan pesantren ini, dalam relevansinya dengan konsep global Pak Natsir mengenai pendidikan.

Penanya Ketiga:

Melihat biografi Pak Natsir bisa saya bagi dua, yakni sebelum 1940, beliau lebih menitik beratkan sebagai seorang pendidik. Dan setelah 1940, beliau seorang Pemikir dan Pendidik. Pertanyaan Pertama, apa perbedaan pandangan antara seorang Pendidik yang memikirkan Pendidikan dan seorang Pemikir yang memikirkan Pendidikan?

Kedua, Pak Natsir adalah seorang pembaharu, khususnya di bidang pendidikan. Masalahnya, kalau pendidikan diartikan sempit, dalam arti lembaga apakah bisa dikatakan seorang Pak Natsir itu seorang pembaharu? Bila dikaitkan dengan makalah Pak Mochtar Naim yang mensinyalir bahwa Pak Natsir tidak pernah sampai pada konsep pendidikan yang utuh dan menyeluruh. Dalam artian operasional programatis. Jadi di mana letak kemoderenan Pendidikan pada waktu itu apakah dari segi isi, sistem, atau kurikulum.

Jawaban Prof. Dr. Yusuf A. Feisal:

Pemimpin yang akan datang, apakah tipe Habibie atau Pak Natsir. Ini pertanyaan menggelitik sebetulnya. Karena sekarang memang Habibie lagi ramai dibicarakan. Sedangkan Pak Natsir kurun waktunya masa lalu dan menjadi cermin masa yang akan datang. Kalau menurut saya, bukan masalah tipe yang spesifik, tapi pemimpin di masa yang akan datang tantangannya juga tidak sama dengan yang lalu.

Jadi kualitasnya, mungkin yang dibutuhkan pada dasarnya penyatuan kemampuan penghayatan antara Ilmu Agama yang digabung dengan penguasaan ilmu-ilmu dan teknologi modern. Orang Barat tidak mau modern, tapi dikatakan *secular sciences*, saya tidak setuju itu. Karena dari Barat memang sekuler sifatnya, jadi kita Islamkan. Pemimpin yang akan datang adalah pemimpin yang menguasai agama dan ilmu-ilmu yang Islami.

Jadi apakah terletak pada kedua orang itu atau di antara kedua orang itu atau dua orang itu plus, saya tidak tahu pasnya. Tapi dari segi bagaimana seorang pemimpin itu menyampaikan pendapatnya dengan jelas dan menghargai pendapat orang lain. Bahkan dia mengutamakan kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Saya pikir ada persamaan antara tipe Natsir dengan tipe Habibie, cuma bedanya Natsir tidak agresif, itu saja.

Kedua, keadaan sekolah-sekolah Islam tidak ada gagasan baru, contohnya dari 52 hanya 2 ulama yang menyekolahkan ke sekolah Islam. Saya tidak bisa memberikan pendapat. Bukan karena saya dan Pak Mochkar Naim suka sedikit-sedikit ikut aktif. Tapi secara kategori kreativitas umat Islam luar biasa. Hanya sifat umat Islam sangat praktis di Indonesia, berbeda dengan karakteristik mentalitas orang Timur Tengah.

Orang Indonesia itu dalam budayanya, begitu juga orang Islamnya, tidak berani mengatakan "salah". Tapi caranya dengan mengatakan "kurang betul". Jelas sekali itu tergantung siapa yang menerimanya. Kata "kurang betul" dan kata "betul", saya kira bedanya jelas sekali. Terutama kalau dalam tingkat pemikiran yang lebih jauh. Tidak henti-hentinya kegiatan-kegiatan umat Islam, apakah pendidikan sekolah atau dia memikirkan konsep, dia juga menghadiri konferensi-konferensi umat Islam yang memulai trend baru terutama di dalam Islamisasi ilmu. Islamisasi bukan politik, tapi ilmu. Jadi Islamisasi artinya bagaimana memasukkan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari epistemologi.

Pak Daud Yusuf mengatakan tentang konsep sistem pendidikan nasional yang di dalamnya terdapat beberapa butir yang tidak sesuai, antara lain, umpamanya, bahwa landasan pendidikan adalah kebudayaan. Buat kita tidak bisa. Karena sebagai muslim, landasan kita adalah tauhid. Landasan kita sama dengan hidup kita, untuk menyembah Allah. Kita mengeluarkan kontra konsep pada saat itu.

Dengan teman-teman, kita berkumpul di ruang rektor UI atas kebaikan saudara Daud Ali. Bukan rapat gelap tapi rapat tersembunyi. Kita bikin konsep. Waktu itu saya mengemukakan konsep yang belum tertulis. Pak Rasyidi "apa omongan saudara bisa dituliskan?" Saya bilang insya Allah. Kemudian saya susun konsep itu lalu kalimatnya disunting Pak Daud Ali, karena kalimat saya biasanya panjang-panjang. Jadi setelah disunting kemudian disebarkan ke BKS PTS seluruh Indonesia.

Itulah yang menyulut keadaan, menentang pendapatnya Daud Yusuf waktu itu. Sehingga akhirnya ia membentuk komisi menyusun kembali konsepnya, yaitu, yang kita dengar setelah dimajukan ke lembaga-lembaga resmi, ke luar yang lebih tebal dari yang pertama. Warnanya masih tetap biru, cuma yang pertama biru pekat yang kedua biru sudah kurang pekat. Ketika masa Pak Fuad Hassan, mereka sudah mengatakan di dalam workshop-workshop terbatas dan keluarlah Undang-undang nomor 89 itu.

Keterkaitan konsep Pak Natsir dengan sekarang, agaknya mentok pada zaman Daud Yusuf. Barangkali ada kaitannya dengan yang tadi. Tapi begini, memang saya katakan tadi orang Islam Indonesia sangat praktis merumuskan dalam kalimat. Jelas ini bedanya dengan zaman Pak Natsir. Pak Natsir lebih jelas, karena waktu itu seolah adalah

jaminan hukum yang kuat.

Kemudian ada masa di mana seolah-olah jaminan hukum itu, entah bagaimana, bisa diinterpretasikan menurut si pemegang hukum. Jadi dari satu sisi kita ini budaya kultural keturunan *ngono yo ngono tapi kan ojo ngono*. Zaman perkembangan modern kita ada keterbatasan-keterbatasan kepastian hukum. Terus terang saja atau barang kali masih ada hukum yang membingungkan untuk bisa diinterpretasi. Karena ada Undang-undang yang dibuat zaman Republik dan ada yang sebelum Republik. Seperti hak saja repot kita dibuatnya, umpamanya, membuat kita mencari penyesuaian-penyesuaian tapi kreatifitas jangan hilang.

Di sini barangkali bedanya dengan Pak Natsir. Pak Natsir bisa lebih *clear*, jernih. Kalau istilah Amien Rais yang diambil dari bahasa asing yaitu *cristal clear*, jelas sekali seperti kaca *Nurun Faqunurin*, istilahnya dalam. Tapi sekarang ini *clear* tapi tidak seperti kaca. Istilahnya yang dipakai *in capsule*, ide yang dikemas dalam kapsul. Idenya tetap hidup dan karena kapsulnya ditelan, bisa jadi obat insya Allah. Tetapi tidak semua orang mau menelan kapsul sembarang kapsul. Jadi kadang-kadang tidak begitu lancar.

Masalah masjid kampus, masya Allah, saya agak malu ditanya oleh teman saya ini. Memang saya terlibat di dalamnya dan beberapa kali diminta Pak Natsir dan semampu saya, saya akan mengemukakan kurikulumnya untuk teman-teman yang terus berkembang. Umpamanya kasus ITB. Dalam bidang ilmu pengetahuan ITB sebut saja lebih tinggi, yang diperlukan adalah landasan-landasan Islam atau nilai-nilai Islam dengan melihat pengetahuan itu, benar tinggi apa tidak? Tidak selamanya yang tinggi itu benar walaupun benar pasti tinggi.

Kedua, bagaimana agar mereka ini menjadi muslim. Makanya diadakan di pesantren-pesantren selama dua bulan penuh, di pesantren di Bekasi dan Tangerang. Ini terus berkembang, memang nanti universitas lain mengadakan lain, karena memang karakteristiknya berbeda. Kita belum bisa membuat pola yang nasional, memang ideal sekali usul Pak Mochtar tadi kita mengadakan Standing Committee untuk masalah-masalah seperti ini. Beliau tadi mengemukakan masalah integralisasi atau pendekatan integralistik mengenai pendidikan Islam. Jadi saya pikir perlu pengalaman.

Mohon maaf kepada semuanya, dan bukan berarti mengecilkan.

Sejak 1977 ada Konferensi Pendidikan Dunia yang pertama di Makkah. Sering saya perhatikan masuk pembicaraan tentang sistem pendidikan mulai lagi dari yang itu juga, padahal konferensi Dunia Pendidikan Islam sebetulnya sudah sampai kepada bagaimana konsep ilmu Islam.

Bahkan sejak 1977 ide Islam untuk disiplin ilmu. Dimulai dengan teman-teman di Bandung, dan kemudian ibu Zakiah Darajat diminta untuk presentasi di Departemen Agama. Alhamdulillah, saya pada waktu itu diberi kesempatan untuk presentasi, dan semuanya setuju. Akhirnya dibikin proyek dengan biaya murah.

Karena itu, kita akan kembangkan terus dan biarkan berkembang. Menurut saya, cuma prinsip-prinsip pokok yang penting. Saya melihat kalau dia sebut tiga kelompok umat Islam di Indonesia dalam *The Religion of Java*, yaitu, kelompok santri, abangan, dan priyayi. Sebenarnya ada kelompok yang keempat harus diwaspadai dalam arti kata, bukan dicurigai, tapi kita isi dan kerjasama yaitu kelompok "universitas".

Kelompok universitas ini, melihat kebenaran sesuai dengan kependidikannya, secara rasional empirik. Padahal kebenaran sekarang tidak hanya dilihat secara rasional empirik saja, tapi harus memasukkan unsur-unsur lain. Kalau melihat Islam begitu, nantinya akan datang pedoman baru, yaitu, setelah Al-Qur'an, adalah intelek!! Jadi kebenaran Islam itu hanya ditetapkan oleh inteleknya, bukan oleh wahyu. Ini masalah, bukan kesalahan tapi proses perkembangan. Jadi ulama kerjasama dengan scientis yang muslim dan nanti reintegrasi scientis yang ulama, ulama yang scientis. Insya Allah pada masa yang akan datang.

Lalu apa yang harus dipelajari oleh seorang muslim? Kalau sekarang dia harus mempelajari dulu ilmu untuk hidupnya, setelah itu baru mengetahui Islam. Saya khawatir dia tahu ilmu dulu, baru nilai Islam belakangan, maka nilai Islam jadi rasional saja. Tidak menjadi keyakinan dan iman. Tetapi kalau dia mempunyai nilai-nilai agama lebih dulu sebagai iman dan keyakinan, kemudian mempelajari ilmu, dia mencoba melihat ilmu itu dari segi ini. Nilai dan penjabaran dari iman yang doktriner sifatnya kemudian dikembangkan dalam interpretasi pemikiran dalam artian, bagaimana membuat Islam yang *Ya'lu wala ju'la alaih*. Bukan di dalam pengertian bagaimana *rest thinking of Islam* dalam pengertian rasionalisasi Islam, tidak bisa.

Jadi dia harus menyatu. Mana yang terbaik? Kalau belajar Islam

dulu, baru cari ilmu dan teknologi, artinya pemikiran. Saya, kepada anak saya saja, tidak bisa begitu, itu susahnyanya. Lebih baik terus terang dari pada dikritik kemudian.

Politik dan pendidikan. Kelihatannya Pak Natsir memulai pemikiran politik dahulu, kemudian barulah pemikiran-pemikiran pendidikan. Tapi saya melihat, justru sebaliknya, beliau bergerak di bidang pendidikan kemudian berpikir di bidang politik. Ini yang tampil, tapi sebagaimana saya katakan antara pendidikan dan politik, paradigma harus dibuat satu.

Pembinaan manusia tentu melalui pendidikan untuk menjadi manusia yang unggul. Itu demi peranan politiknya supaya mendapatkan tempat yang mulia di Indonesia. Itu tidak bisa diabaikan tapi sebaliknya kalau politik ini sudah bisa dicapai. Antara pendidikan politik dan politik yang dihasilkan pendidikan adalah satu hal yang memang paradigmanya saya kemukakan tadi bisa dibuat dua. Kalau menurut saya, pembinaan umat lalu pendidikan di antaranya bukan? Itu merupakan politik keumatan. Ini tidak ada batas waktu, bahkan kemenangan ini merupakan konsekuensi dari peningkatan kualitas.

Pak Natsir belum memiliki konsep yang tuntas, kecuali pemikir-pemikir pendidikan modern dengan membuat buku tentang konsep pendidikan. Harus diperhatikan, tidak ada susunan atau struktur atau mekanisme pendidikan yang utuh, yang bisa diambil dari buku manapun di dunia ini. Kedua, Pak Natsir lebih mendekati sebagai Leader ketimbang Manager. Leader, ketika dia mengutarakan aspirasi hati nurani umat. Sedangkan Manager, bila berpikir tentang kelayakan, apakah ini bisa dijalankan atautkah tidak. Apakah ada uangnya apa tidak. Itu Manager.

Oleh karena itu, tidak mungkin seorang manager mengemukakan satu konsep yang utuh. Tapi kita mengikutinya dan harus berani menginterpretasikan sesuai pikiran-pikiran yang lainnya. Seperti kita menginterpretasikan Al-Qur'an satu ayat dengan ayat yang lain dalam satu surah, satu ayat dengan ayat yang lain dengan surah yang lain, baru kita melihat keutuhan.

Karena *nawaitu* kita melihat Islam bukan interpretasi yang akhirnya berhenti pada *ta'wil waya' ta'wilullah warasulih*. Tidak ada yang tahu *ta'wilnya* kecuali Allah dan rasulnya. Jadi kita bukan sampai kepada *ta'wil* sebetulnya, tapi sebagaimana kita berkreasi memikirkan segala sesuatu dalam hal-hal yang bisa dipikirkan.

Ada 73 ayat dalam Al-Qur'an yang diakhiri dengan kata-kata *afala ta'qilun*, *afalan tatadabbarun*, *afala tasy'kurun*, semua ini sesungguhnya menunjukkan pemikiran. Sampai kepada pemikiran yang halus, namanya rasa *su'ur* itu. Sementara itu kita tidak bisa menafsirkan, karena tidak semuanya bisa ditafsirkan, hingga sampai pada yang tidak boleh ditafsirkan.

Dalam konsep Tauhid *laisa kamislihi syai'un* berarti tidak sama dengan yang lain. Meski penjabarannya seolah-olah sama, hal ini butuh interpretasi. Apalagi pikiran-pikiran yang ada dalam waktu yang singkat sebagaimana pemikiran-pemikiran seorang Leader. Saya kira memang tidak mungkin leader menyusun satu konsep yang utuh, yang khusus mempelajari sekolah dan kemudian menjadi filosof dan pemikir sekaligus.

Insha Allah saya bisa menjamin kepada teman-teman, buku apapun mengenai pendidikan yang ditulis oleh siapapun di dunia sekarang ini, masih bisa dikritik. Yang jelas kita bisa mengkritiknya dari segi Tauhid dan tujuan ibadah. Oleh karena itu yang penting menurut saya, ialah bagaimana kita mengambil sense ini untuk proyeksi ke depan dan mencoba menyusun di dalam konsep yang relatif bisa dilaksanakan. Mungkin tidak sempurna, tapi bisa dilaksanakan di dalam perjalanan nanti di mana akan terjadi proses perbaikan dan penyempurnaan karena tidak ada perbuatan yang sempurna.

Jawaban Bapak Dr. Mochtar Naim:

Problem memilih nama, apakah Sekolah Islam Tinggi seperti yang dirancang semula, atau Sekolah Tinggi Islam, ini menarik sekaligus menjawab pertanyaan Anda, yang dipilih adalah Sekolah Tinggi Islam.

Konotasinya tentu berbeda kalau memakai nama Sekolah Islam Tinggi. Dan sekaligus menjawab ke mana arah Universitas Islam Indonesia. Yang diinginkan oleh Pak Hatta, Pak Natsir dan committeanya itu adalah sebuah sekolah yang sifatnya integral, memberi semua disiplin ilmu, termasuk ilmu agama itu sendiri. Tapi masing-masing diperlakukan sebagai fakultas-fakultas.

Sebagaimana fakultas, melambangkan adanya pembagian kerja. Bagaimana pun tidak mungkin ada orang yang tahu semua di zaman yang sudah modern dan kompleks ini. Perlu ada spesialisasi. Dan hal-

hal yang selama ini dipelajari di Pesantren, sekolah agama dan Madrasah, menjadi fakultas-fakultas agama. Ada fakultas Syariah, Tarbiyah, Da'wah dan lain-lain. Di sini agama diperlakukan sebagai disiplin ilmu, dalam pengertian yang sempit, bukan agama dalam pengertian yang menyeluruh.

Namun, walau struktur arbitrase kurikulumnya terkotak-kotak seperti semula, juga ke dalam berbagai disiplin ilmu, yang penting adalah ruhinya, spiritnya. Ruhul Islam yang ada pada setiap Fakultas itu. Jadi tidak hanya pada Fakultas Agama tapi juga pada Fakultas Kedokteran, Ekonomi, Teknik, Sosiologi, Pendidikan dan lain-lain.

Di mana pun ada ruh Islam, ibaratnya seolah-olah seperti air bagi ikan yang berenang di dalamnya, tidak mungkin ikan hidup di luar air. Air itulah yang dimaksudkan dengan Islam, jadi kalau ada fakultas ekonomi, di samping mempelajari bagaimana teori-teori ekonomi menurut pakar-pakar macam-macam itu, termasuk historis materialismenya Marx dan segala macam.

Ada pula perhatian yang ditujukan untuk mendalami dan mempelajari konsep-konsep ekonomi yang diajarkan oleh Islam dari Qur'an dari Hadits, dari pemikiran-pemikiran para ahli Islam lainnya. Nanti juga dibanding-bandingkan dengan konsep-konsep dari para pemikir sekuler Barat dan lain-lainnya itu. Akan muncul melalui pemikiran-pemikiran akademik seperti ini, konsep-konsep baru tentang ekonomi Islam.

Seperti yang kita lihat sekarang, tidak pernah orang memimpikan bahwa sebuah Bank Muamalat bisa berdiri di Indonesia. Bank tanpa riba yang dahulu dianggap sebagai utopia, tidak mungkin, di zaman Pak Syafruddin (Menteri Keuangan 1950-1951) masih dianggap sebagai nonsense. Sekarang menjadi realita.

Begitu pula pada bidang-bidang yang lain. Sementara itu di dunia Islam sebenarnya sudah sejak dua dekade atau 70-an, para pakar Islam menyusun konsep-konsep pendidikan Islam. Hanya saja kita tidak memiliki akses, tidak acceptable. Padahal pemikiran-pemikiran seperti Al-Faruqi dan Najib Alatas menuju kearah konsep pendidikan yang universal, global, integral, dan harmonis.

Tapi sebenarnya, dasar-dasar itu sudah ada sebagaimana dasar-dasarnya juga sudah dirindukan oleh Pak Natsir sendiri. Hanya saya katakan seperti dalam makalah saya, konsep penjabaran yang bersifat programatis kurikuler yang masih kurang, masih belum terjabar.

Untuk itu, kita memerlukan eksperimen-eksperimen. Bagaimanapun saya kira Universitas Islam di Yogya sudah bisa kita katakan sebagai sebuah eksperimen.

Begitu Unisba Bandung, Muhammadiyah, di mana-mana lebih 60 Universitas Muhammadiyah di Indonesia dan Universitas-universitas Islam, mereka bukan tidak berupaya. Hanya kendala-kendala yang dihadapi secara faktual terlalu besar. Kadang-kadang sulit bisa menyeruak langsung, konsep-konsep Islamistis paedagogis ideal yang diinginkan oleh Pak Natsir itu, tapi kita telah bergerak ke arah itu.

Dan saya dengar juga dari YARSI dengan kawan-kawan Pak Dr. Jurnalis juga Pak Yusuf Faisal sendiri, telah mengadakan langkah-langkah ke arah itu. Yang diperlukan sekarang ini adalah semacam upaya-upaya yang terintegrasi. Jadi tidak hanya dipikirkan oleh sekelompok kecil saja. Kalau perlu dimasyarakatkan dan dikerahkan ke arah ini.

Mengenai kecenderungan sekolah-sekolah Islam yang mati kreatifitas. Ini memang menarik dan memang tidak bisa dipungkiri ada kecenderungan kuat seperti itu. Tapi kita jangan lupa, tidak semua begitu, memang lebih banyak yang begitu, tapi ada beberapa yang tidak begitu. Ambil contoh, sekolah-sekolah Thawalib di Sumatra Barat, mungkin juga Dinniyah dan sekolah Harapan Medan misalnya, yang modern. Hal sama juga di Al-Azhar Jakarta, di sini barangkali tidak termasuk dalam katagori yang mati kreatifitas itu.

Tapi jelas memang tidak bisa bergerak secara leluasa untuk merealisasikan ide pendidikan yang Islamitis ideal itu. Kendala utama kita persis seperti diutarakan oleh Pak Yusuf tadi, suasana lingkungan, sistem yang menglingkari kita yang tidak ada, persis seperti yang dikatakan oleh Pak Natsir ialah yang dinamakan kemerdekaan berpikir. Itu yang tidak ada, dan itu yang tidak kita temukan dalam sekolah-sekolah Islam itu sendiri, mati kreatifitas adalah akibat karena tidak adanya kreatifitas itu, tidak adanya kreatifitas karena tidak ada kemerdekaan untuk berkreatifitas.

Jadi bagaimana pun kembali juga ke pangkal kaji. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Pak Natsir sendiri di tahun 30-an. Justru kita mendambakan kemerdekaan berpikir, dan berinisiatif. Mudah-mudahan akan terjadi perubahan-perubahan yang berarti untuk masa-masa depan. Dan perobahan itu adalah hasil dari kerja keras kita.

Da'wah dan Sumber Manusia

Oleh: Dr. Ir. M. Imaduddin Abdulrahim.

1. Pendahuluan

Da'wah dapat didefinisikan berdasarkan kenyataan sejarah Rasul-Allah SAW, yang telah mempergunakan seluruh hidup beliau demi mengangkat harkat dan derajat umat manusia dari lembah kehinaan sebagai manusia jahiliyah, menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia serta kemanusiaan seluruhnya. Misi Rasul-Allah ini pun telah ditegaskan kecuali sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Tiada Kami utus engkau kecuali sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. (QS. 21 : 207).

Jika kita akui kenyataan sejarah ini, maka dapatlah kita definisikan da'wah itu sebagai berikut:

Da'wah ialah setiap aktifitas yang dilakukan oleh seorang Muslim demi mengubah suatu kondisi atau situasi yang kurang atau tidak baik menjadi kondisi atau situasi yang lebih baik sesuai dengan ketentuan sunnah Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya.

Berdasarkan definisi ini, maka aktifitas da'wah serta tugas setiap da'i itu sangatlah luasnya, seluas hidup dan kehidupan ini. Mencakup seluruh aspek kehidupan kemanusiaan, dari mendirikan rumah tangga, membina hubungan bertetangga, sampai membangun masyarakat sejahtera. Bahkan, berjuang membela negara dan bangsa, serta menegakkan dan menjalankan politik bernegara.

Oleh karena itu pula, maka seorang penda'wah atau da'i mestilah melengkapi dirinya dengan segala kemampuan dan kemahiran serta ilmu yang luas dan tinggi. Di samping itu, seorang da'i wajib mempunyai akhlaq-alkarimah yang tahan uji, karena dia bukan saja berlaku sebagai penyuluh masyarakat sekelilingnya, namun ia juga

mesti menjadi panutan masyarakat yang dibinanya.

Hal ini pula disadari oleh setiap da'i mengingat tugasnya dalam hidup ini tiada lain ialah menjadikan Rasul-Allah sebagai panutan dan teladan utama.

Sesungguhnya pada perilaku Rasul-Allah itu dalah contoh teladan terbaik bagi mereka yang mengharap akan berjumpa kembali dengan Tuhan mereka dan hari akhirat, serta suka mengenang Allah. (QS. 33 : 21)

Berdasarkan ayat ini, maka setiap da'i, yang berfungsi sebagai penyambung lidah Rasul-Allah, wajib menghayati perilaku beliau sampai ke setiap kehidupan mereka. Oleh karena aktifitas da'i ini akan menghasilkan manusia-manusia yang bertaqwa, maka sangat aneh jika sekiranya yang bersangkutan tidak ikut meningkat ketaqwaannya dalam menjalankan tugasnya, karena ia akan termakan murka Allah yang sangat terhadap mereka yang berbicara tanpa melaksanakan apa yang dikatakannya.

Sangat besar murka Allah bagi orang yang berbicara tanpa mengamalkan apa yang dikatakannya. (QS. 61 : 3)

Oleh karena itu perlulah disadari oleh setiap da'i, bahwa dalam usaha mereka mengubah sesuatu yang kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik, jangan sampai ia melupakan diri mereka sendiri. Masalah ini sering penulis kemukakan dahulu ketika sedang bertugas memimpin masjid Salman ITB.

Penulis mengatakan kepada para mahasiswa ITB yang berminat aktif dalam kegiatan masjid, bahwa mengelola masjid ini kira-kira sama dengan mengelola pabrik, jika dilihat hanya dari unsur-unsurnya, yaitu ada input, yang kemudian diproses untuk menghasilkan outputnya. Adapun output dari sebuah masjid ialah manusia-manusia yang kualitas iman dan taqwanya lebih baik dari ketika ia baru mulai masuk ke masjid sebagai input.

Jadi aktifitas pengurus masjid Salman ini ialah memproses (menda'wahi) para mahasiswa yang masih remaja dan haus akan pendidikan Islam, menjadi manusia sarjana ITB yang selain tinggi kualitas ilmu teknologinya juga tangguh iman dan ketaqwaan, sesuai dengan kualitas manusia yang digambarkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain:

Manusia yang usaha ekonomi dan bisnis mereka tidak sampai melengahkan mereka dari mengingat Allah SWT, dan menegakkan sholat, serta membayar zakat, karena kesadaran mereka akan pasti datangnya hari pertemuan yang akan menggetarkan hati dan membelalakkan mata. (QS. 24 : 37)

Perbedaan yang paling penting antara mengelola pabrik dengan mengelola masjid, yang merupakan intinya da'wah itu ialah, bahwa jika seorang Manajer pabrik mobil yang akan menghasilkan output yang berupa mobil-mobil yang berkualitas, maka sang Manajer tidak akan pernah berubah menjadi mobil itu sendiri. Para Manajer mobil tetap saja merupakan manusia biasa dan normal seperti sebelumnya, kecuali barangkali akan lebih tua setiap hari.

Adapun para Manajer sebuah masjid yang menghasilkan sebuah output manusia yang lebih tinggi kualitas iman dan taqwa mereka, maka bersamaan dengan itu mereka sendiri pun wajib pula bersama manusia yang mereka proses itu akan menjadi manusia yang lebih baik dan lebih tinggi kualitas keimanan dan ketaqwaan mereka. Jika tidak, maka mereka akan segera mendapat kutukan murka Allah yang telah ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an tersebut di atas.

Oleh karena itu dapatlah disimpulkan, bahwa beban serta tanggung jawab seorang da'i itu sangatlah beratnya, karena penilaian terakhir dari kualitasnya dilakukan oleh Allah SWT sendiri sebagai Maha Hakim Agung. Di samping itu, keuntungan berda'wah itu justru terletak di sini, yaitu para da'i akan terpaksa atau dipaksa oleh dirinya sendiri atau self motivated, kata orang sekarang, dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan mereka.

Kenyataan inilah yang telah diajarkan kepada penulis baik oleh almarhum orang tua penulis, maupun yang penulis terima sendiri dari almarhum Bapak Mohammad Natsir, selama penulis merasa dekat dengan beliau, sejak beliau dibebaskan dari tahanan dalam tahun 1966, ketika beliau akan mulai kembali aktif di tengah-tengah masyarakat dengan mendirikan Dewan Da'wah Ilamiyah Indonesia.

Ketika almarhum Bapak Moh. Natsir bertanya kepada penulis: *"Apakah target atau sasaran yang ingin Imam capai dalam membina para mahasiswa di masjid Salman itu?"*

Penulis dengan tegas mengatakan: *"Saya ingin membina manusia yang karakternya dijelaskan Allah dalam Surah Al-Nur : 37.*

Beliau tersenyum menyatakan persetujuannya sambil mendo'akan semoga penulis berhasil. Lantas beliau membekali penulis dengan beberapa banyak buku yang beliau pilihkan dari perbendaharaan buku beliau yang banyak itu.

2. *Da'i sebagai Sumber Manusia*

Allah telah meletakkan kedudukan seorang da'i pada posisi yang tertinggi dimata-Nya dengan firman-Nya yang sangat tegas tentang itu.

Adakah orang yang lebih baik dari orang yang menghibau manusia ke jalan Allah, sedangkan ia beramal shaleh dan berkata: 'Saya termasuk golongan yang pasrah kepada Allah'. (QS. 41 : 33)

Sesuai sifat semua sunnah Allah, maka biasanya setiap kedudukan yang tinggi atau barang yang mahal itu senantiasa sangat sukar pula mencapainya, sehingga orang yang masih enggan berkorban dan berjihad tidak akan menemukannya. Oleh karena itulah, Allah memperingatkan setiap da'i, bahwa sangat jelas pula perbedaan antara cara berda'wah yang baik dengan da'wah yang serampangan.

Tidaklah sama (da'wah) yang baik dengan yang buruk; tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan sedemikian rupa, sehingga kebencian akan berubah menjadi hubungan persahabatan yang mesra. (QS. 41 : 34)

Da'wah yang dicontohkan Rasul-Allah SAW sangat jelas mengajarkan kepada kita bagaimana menolak kebencian dengan kebaikan. Salah satu contoh perilaku Rasul-Allah yang sangat terkenal ialah bagaimana beliau memperlakukan Khalid bin Walid, yang sampai dalam peristiwa Hudaibiyah yang terkenal itu, masih mencoba memengaruhi Rasul.

Beliau berkirim salam kepada Khalid melalui adiknya serta menyatakan perhatian beliau yang sangat mengharukan hati Khalid, sehingga ia ikut dengan adiknya itu ke Madinah untuk menemui Rasul serta menyatakan dirinya sebagai Muslim. Maka Rasul serta merta mengangkat Khalid menjadi Panglima angkatan bersenjata dengan kepercayaan penuh.

Kita sekarang mengenal Khalid sebagai panglima yang paling berjasa mengembangkan daerah Islam ke segala pelosok, pertama dengan menaklukkan Parsi dalam masa sebelas bulan, dan Syam dan

Jerusalem dalam waktu yang sangat singkat pula sesudah wafatnya Rasul-Allah SAW.

Allah menegaskan kembali, bahwa kualitas da'i yang sanggup melawan kebencian dengan kebaikan itu tidak akan dipunyai seseorang, kecuali mereka yang benar-benar sabar. Namun alangkah beratnya sabar itu bagi mereka yang tidak terlatih atau melatih diri untuk mencapainya.

Tiada yang mampu berbuat yang sebaik itu kecuali mereka yang shabar, dan tiada yang mendapat shabar itu kecuali mereka yang telah mendapat anugerah tertinggi. (QS. 41 : 35)

Dari ayat ini jelas, bahwa kualitas sabar merupakan kualitas yang mungkin diperoleh seseorang hanya dengan berusaha keras (berjihad) melatih diri untuk itu, di samping menggantungkan harapannya kepada anugerah Allah SWT. Pertemuan antara usaha dan anugerah Allah semata, yang menyebabkan seseorang dapat menjadi da'i yang sesungguhnya.

Iniilah kualitas sumber manusia yang paling tinggi yang sangat dibutuhkan bangsa kita sekarang ini dalam meneruskan pembangunan bangsa dan meningkatkan peranan umat dalam bernegara.

Jika hal ini telah tercapai, maka Allah pun tiada pula memberikan peringatan kepada mereka yang telah berhasil mengangkat dirinya ketaraf da'i seperti itu, agar tetap berhati-hati terhadap kelicikan syaithan yang senantiasa ingin menjatuhkan manusia yang telah diangkat Allah ketingkat yang sangat mulia itu.

Syaithan sebagai seniman penggoda tidak akan menjatuhkan para da'i dengan merayunya melalui harta atau kedudukan serta wanita, karena ia tahu, hal itu terlalu jelas bagi setiap da'i, dan pasti akan ditolaknya. Syaithan datang kepada setiap da'i dengan bisikan halus, justru pada saat da'i sedang menjalankan tugasnya berda'wah di hadapan para pengikut yang mulai mengaguminya.

Syaithan datang dengan bisikan halus yang berupa pujian, yang jika disambut oleh da'i yang kurang waspada akan menumbuhkan sifat ujub dihati kecil si da'i. Ketahuilah dan sadarilah, bahwa ujub ini adalah bunga, yang jika mekar akan berubah menjadi punik yang bernama riya', yang jika terus berkembang akan menjadi buah yang bernama kibir.

Kibir adalah penyakit iblis yang paling berbahaya, sehingga Rasul Allah pernah bersabda, bahwa telah diharamkan Allah surga itu bagi seseorang yang dalam hatinya ada penyakit kibir, walaupun sebesar zarrah. Oleh karena itu tepat sekali jika Allah menegaskan peringatan itu sebagai berikut:

Jika syaithan berbisik kepadamu dengan bisikan halusny, maka segeralah berlindung kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. (QS. 41 : 36)

Dengan demikian kedudukan, syarat-syarat, serta tantangan serta tameng seorang da'i telah jelas diuraikan Allah SWT, karena kelangsungan hidup suatu umat yang ingin maju dan berjaya di dunia Allah ini.

Inilah antara lain pelajaran dan didikan yang telah penulis terima dari almarhum Bapak Moh. Natsir yang sangat kita cintai. Semoga dengan penuturan ini generasi muda yang bercita-cita akan meneruskan perjuangan dan cita-cita beliau, akan sudi meresapkan ajaran beliau serta menghayatinya dalam membina kejayaan umat Islam dalam menyongsong kebangkitan umat di abad ke-15 Hijriyah ini.

Allahu a'lam bishawab!!!

**Topik Diskusi: Konsepsi M. Natsir tentang Agama,
Dak'wah dan Sumber Daya Manusia**
Pembicara: Dr. Ir. M. Imaduddin Abdulrahim

Bapak Datuk:

Dalam bulan-bulan terakhir ini saya sering mengikuti 'Hikmah Fajar' (Acara RCTI, pen). Penampilan Imaduddin mengingatkan saya pada Mohammad Natsir. Jadi tepatlah bila dikatakan bahwa Imaduddin adalah produk Pak Natsir. Sebagai pemikir dan pejuang sudah berhasil dan itulah hasilnya.

Dr. Imaduddin:

Ya, barangkali. Saya tidak membantah hal itu sebab saya banyak didik oleh Pak Natsir. Oleh karena itu tidak heran ketika sedang menunggu jenazah dari rumah ke masjid Al-Fur'qon, saat itu saya menunggu di bawah masjid, untuk sembahyang. Di sana sudah ada Pak Rusyad, bekas guru saya dan bekas muridnya Pak Natsir. Pak Rusyad mengatakan kepada saya, supaya saya siap-siap menggantikan Bapak, memimpin Dewan Da'wah. Saya langsung spontan. "zalim," kata saya.

"Kenapa zalim?" tanya beliau. "Saudara 'kan muridnya Pak Natsir."

"Dengan menempatkan saya sebagai pengganti beliau," kata saya, "itu sama halnya memaksa tomat berbuah durian."

Irfan Muhammad:

Saya generasi yang jauh lebih muda dari Bang Imad, apalagi Pak Natsir. Yusril atau pun Cak Nur cenderung mengidentikkan Natsir tipe modernis bukan fundamentalis. Dalam dakwah juga begitu tampaknya. Kesimpulannya Pak Natsir lebih cenderung kepada

modernis tidak fundamentalis, jadi lebih kepada sikap-sikap moderat dan tidak militan. Bagaimana pandangan Bang Imaduddin?

Bang Imaduddin dididik Pak Natsir, apakah Bang Imad mewarisi moderatnya atau militansinya? Apa kita harus fundamentalis atau modernis, atau gabungan antara keduanya. Dan bagaimana meletakkan Pak Natsir di tengah itu?

Dr. Ir. Imaduddin Abdulrahim:

Istilah fundamentalis saya kurang setuju dipakai untuk Islam. Sama dengan istilah ortodox dipakai untuk Islam. Kalau tadinya istilah ortodox, fundamentalis itu dipakai orang Kristen, itu memang akibatnya sebagaimana yang mereka lihat, agak jelek. Ortodox artinya berpegang teguh kepada kitab.

Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an, sebetulnya kita modern sekali dan itu yang saya anut dari Pak Natsir. Beliau mengatakan orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an sangat modern. Kalau fundamentalis dalam arti berpegang teguh kepada Al-Qur'an, sebetulnya tidak akan saudara katakan tadi militan dalam arti kata negatif.

Militan dalam arti tidak menyerah, dalam pengertian sabar, maka Pak Natsir mengutip Al-Qur'an: *wamaa yulaqqaoha illalladziina shobaruu wa man yulaqqoo haa illaa dzunuu hadhdhin 'adhiim*. Artinya, Tidak ada yang mampu menjalankan semua itu kecuali mereka yang sabar.

Kalau militan, kita wajib sabar. Sabar dalam arti kata tidak kenal gagal, kalah bisa. Tapi gagal tidak bisa. Itu sebabnya kemarin saya langsung bangkit, ketika dikatakan kegagalan Pak Natsir. Pak Natsir tidak pernah gagal, beliau pernah kalah, itu betul, tapi tidak pernah gagal. Karena hukum Tuhan tidak pernah gagal, selama kita berjalan di atas hukum Tuhan.

CAPITA SELECTA

Oleh: **Dr. Ir. Ahmad Muflih Saefuddin**

M. Natsir tentang Agama dan Kebangsaan

Islam Mengakui Kebangsaan dan Ke-Indonesiaan

Pandangan kita kepada sesama manusia amatlah luasnya. Seluruh manusia baik warna kulit, bangsa dan keturunan apa pun, semuanya adalah dari satu keturunan belaka. Seluruh bangsa di Timur dan di Barat, di semua benua dan daerah, adalah umat yang satu. Dan hidayat ke-Islaman pun bukanlah monopoli suatu golongan. Seorang manusia, atau suatu golongan, tidaklah berlebih daripada saudaranya, kecuali karena taqwanya kepada Allah SWT.

Seringkali orang menyangka, bahwa Islam bertentangan dengan adanya bangsa-bangsa. Tegasnya, katanya, Islam memungkiri adanya bangsa, seolah-olah orang yang memeluk Islam itu tidak ada bangsanya lagi. Yang demikian adalah tidak betul! Kita dapat jadi seorang Muslim yang taat, dan pada saat yang sama dengan riang-gembira pula menyanyikan 'Indonesia Tanah Airku'!

Bagaimana kita akan menghilangkan ke-Indonesiaan kita, karena Allah-lah yang menjadikan kita berbangsa-bangsa seperti yang tampak di muka bumi sekarang ini. Kita harus dapat berbahagia dan bergembira memperlihatkan kepada dunia luar, inilah kami bangsa Indonesia, bahasa kami demikian, kebudayaan kami demikian, tulisan batik-batik kami demikian, ukiran kami demikian, musik kami demikian, dan sebagainya.

Tidak ada perlunya, seorang Muslim harus menanggalkan kebangsaan dan kebudayaannya. Dalam ajaran Islam disebutkan, bahwa manusia ini dijadikan dalam golongan, bangsa-bangsa dan suku-

suku bangsa yang berbeda-beda. Bahasa pun bermacam-macam. Ini adalah fitu'ah, atau 'natuuu', kata orang sekarang. Dikatakan di ujung ayat itu, *lita'arofu*, supaya kamu kenal mengenal satu dengan yang lain (QS. Al-Hujarat : 13).

Alangkah bosannya andai kata kita hanya melihat semua orang di dunia ini satu saja warnanya. Kalau putih, ya putih semuanya, kalau hitam ya hitam semuanya! Barangkali untuk mencari *afwisseling* mau rasanya kita lari ke bulan atau ke bintang untuk mencari manusia yang lain, kalau demikian!

Islam: Anti Ashobiyah Jahiliyah

Oleh karena itu, keragaman yang natuur itu, atau undang-undang Tuhan yang telah berlaku dalam alam kemanusiaan itu, tetaplah tinggal demikian. Tapi janganlah, mentang-mentang kita berkulit putih, lantas merasa lebih tinggi daripada bangsa yang berkulit sawo, sehingga mendapatkan hak asasi untuk menjajah mereka. Atau kalau kebetulan kita berkulit sawo, janganlah merasakan diri lebih tinggi daripada orang yang berkulit hitam.

Yang demikian bukan kebangsaan yang sehat. Itu sudah sampai pada kecongkakan bangsa, kesombongan bangsa, kefanatikan bangsa. Paham kebangsaan yang begini, memang dilarang oleh Islam. Islam adalah satu sistem yang memberantas kefanatikan bangsa, *chauvinisme* yang sempit, rasialisme kata orang Barat sekarang. Cari ilmunya dari faqih-faqih kita, yang dilarang oleh Islam itu, ialah '*Ashobiyah Jahiliyah*'.

Saya hendak mengatakan sekali lagi, bahwa jauh daripada hendak menghapuskan bangsa dan kebangsaan, Islam adalah meletakkan dasar-dasar untuk subur hidupnya bangsa dan suku-suku bangsa, atas dasar harga-menghargai, kenal-mengenal, memberi dan menerima.

Kalau kita bangsa Indonesia, silahkan merasa bangga menjadi bangsa Indonesia, tapi awas, jangan merosot sampai menjadi *chauvinisme* yang sempit, yang akan menuju kepada *fascisme* dan *totaliterisme* itu. Saudara jangan tidak khawatir, bahwa di negara kita tidak akan bisa tumbuh *fascisme*, *totaliterisme* dan sebagainya itu.

Bisa saja ia tumbuh! *Fascisme* dan sebagainya itu adalah suatu alam pikiran yang tidak tergantung apa kulitnya putih, hitam, atau sawo-matang, dan lain-lain. Kita harus hati-hati, agar *fascisme* dan sebagainya itu jangan tumbuh di negara demokrasi kita, yang berke-Tuhanan

Yang Maha Esa. Ini adalah kewajiban tiap Muslim!

Rasialisme, diakui, adalah salah satu dari sumber penyakit dunia yang menimbulkan peperangan demi peperangan. Chauvinisme menimbulkan bentuk-bentuk kebangsaan yang lebih berbahaya untuk masyarakat, seperti timbulnya paham fascisme, totaliterisme dan lain-lain yang serupa itu. Hitler berkata bahwa 'Herrenfolk' itu ialah bangsa yang dipertuan, selainnya adalah bangsa campuran yang tidak bisa hidup sendiri, akan tetapi harus dijajah oleh Herrenfolk. Semua itu adalah gradasi dari apa yang dinamakan '*Ashobiyah Jahiliyah*'.

Islam jauh dari ingin menghapuskan atau membatalkan pengertian bangsa dan kebangsaan, tapi meletakkan dasar-dasar yang sehat untuk hidup suburnya suatu bangsa di dalam pergaulan kekeluargaan bangsa-bangsa. Kita mengetahui bagaimana akibatnya apabila kecongkakan tentang bangsa dan warga sudah merajalela.

Islam Menghormati Multi-Ras

Kita lihat bagaimana warna kulit di Afrika Selatan, di Amerika Selatan telah menimbulkan masalah, yang rupanya tidak dapat diatasi dalam zaman demokrasi modern sekarang ini. Kita mengetahui bagaimana celaknya kehidupan suatu bangsa apabila sudah memuncak menjadi rasialisme, sebagaimana dalam filsafah hidup kaum Nazi. Dan sejarah juga menunjukkan kepada kita, bagaimana celaknya apabila cinta kepada bangsa dan tanah air, merosot menjadi kecongkakan bangsa yang merupakan xenophobie atau kebencian terhadap semua orang yang berbangsa asing.

Bagi golongan-golongan yang lebih senang mendengarkan, atau lebih lekas menerima jikalau hal yang kita kemukakan ini tertulis dalam buku bahasa asing, bangsa Inggris umpamanya, maka saya ingin memperkenalkan kepadanya seorang profesor yang bernama Toynbee, seorang historikus bangsa Inggris yang terulang di zaman ini. Ia berkata dalam bukunya, *Civilization on Trial*, "Ancaman terhadap Kebudayaan", sebagai berikut:

"Dunia sekarang mempunyai dua penyakit, yang belum dapat orang mencarikan obatnya. Penyakit itu ialah rasialisme dan alkohol". Dengan kupasan yang terang-benderang, Toynbee menyatakan, bahwa rasialisme dan alkohol adalah sumber-sumber kegoncangan dunia. Seterusnya Toynbee berkata: "Kalau ada satu sistem yang menghancurkan

kan rasialisme dan alkohol itu sistem itu hanyalah Islam."

Toynbee bukan seorang Muslim, ia seorang Kristen. Sebagai seorang ahli pengetahuan, seorang *scientist*, ia hanya melihat facts demi facts, menganalisa keadaan demi keadaan. Toynbee dengan terus terang berkata seperti itu.

Kesimpulan

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak M. Natsir, dengan merujuk firman Allah SWT: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal."*

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui" (QS. Al-Hujurat : 13), dapat disimpulkan bahwa Islam mengakui dan menyuburkan kehidupan kebangsaan (ke-Indonesia-an) sekaligus anti chauvinisme, xenophobia dan rasialisme.

Bahkan ahli sejarah, Prof. Arnold Toynbee meyakini hanya Islam yang dapat menghancurkan rasialisme dan alkohol yang merupakan dua penyakit di dunia.

M. Natsir Tentang Agama dan Demokrasi

Jasa Baik Tak Kenal Mati dan Hapus

Kehidupan, bukanlah perebutan rezeki dan pengaruh. Bukan penindasan yang kuat kepada yang lemah. Bukan pertentangan yang kaya dengan yang miskin. Tapi hidup ialah perlombaan di dalam menegakkan sebanyak-banyaknya kebajikan, untuk manusia (*fastabiqul khairat*). Hidup ialah iman dan amal shaleh. Hidup ialah jasa baik yang tidak mengenal mati dan hapus. Itulah dua tali, yakni iman dan amal shaleh, tali Allah dan tali manusia, yang harus kita pegang teguh, yang satu sama kuatnya dengan yang lain.

Dalam perjalanan kemajuan dunia kebendaan, yang berlaku pesat di dunia Barat di abad ke 19, memang telah dilupakan orang keruhanian. Bangga dengan kejayaan atas kebendaan itu, dengan tak sadar

menjadikan manusia hamba kebendaan, yang memuja-muja hasil perbuatan tangannya sendiri. Maka berkobarlah hawa-nafsu loba, tamak dan gila harta. Kemewahan diburu dan selalu hendak lebih dari yang sudah dicapai. Dan apabila berhasil kemewahan harta, dihidupkannya nafsu kekuasaan.

Itulah mungkar dan fasad yang merusak dan menyesatkan. Mungkar yang harus ditentang, dicegah merajalela. Tapi, jalan menentangnya tidaklah dengan mengobarkan nafsu loba, tamak berebut harta dan kekuasaan itu pula dalam hidup. Bukanlah ajaran agama Allah menentang kejahatan dengan kejahatan, suatu hal yang tak mungkin menghasilkan kebajikan. Firman Allah: *"Sekali-kali tidaklah dapat disamakan dengan kejahatan. Maka hendaklah engkau menentang kejahatan dengan yang lebih baik"*. (QS. As-Sajdah : 34).

Damai dan Adil

Untuk memelihara langkah di jalan kebenaran, kita harus menjauhi perasaan memihak kepada yang satu dan menentang pihak yang lain. Dengan ikhlas, kita harus memelihara damai dan mempertahankan damai dengan berpedoman keadilan belaka, tidak tergoda oleh perasaan benci atau cinta, seperti maksud firman Allah SWT.:

Hai orang yang beriman, hendaklah kamu tegakkan kebenaran yang dari Allah itu dan hendaklah jadi saksi atas perbuatan yang adil. Janganlah sekali-kali rasa benci akan sesuatu, menjerumuskan kamu kepada perbuatan tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu dekat kepada taqwa. Maka ingat dan jaga dirilah kamu terhadap Allah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa perbuatanmu! (QS. Al-Maidah : 8).

Khairu Ummah: Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Kita diberi titel oleh Tuhan 'Khairu Ummah'. Kamu yang sebaik-baik umat untuk manusia, sebab kamu menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah berbuat yang munkar, dan kamu percaya kepada Allah. Kepercayaan kepada Allah itulah, yang menimbulkan keberanian kita menyuruh berbuat ma'ruf. Keberanian menyuruh berbuat baik, adalah lebih besar daripada kemerdekaan menyatakan pikiran. Keberanian menegur mana yang salah, adalah lebih besar puncak dari semua kemerdekaan. Itulah kemerdekaan jiwa, sebab tidak ada tempat takut selain Allah.

Maka tidak usahlah kita kiranya mencari-cari jalan, yang barangkali di negeri-negeri lain dapat berjalan atau tidak dapat berjalan dengan baik. Tidak usahlah kita mentransformasikan segala sistem dan metode-metode yang lain itu dengan begitu saja. Kita dapat mencari metode dan sistem sendiri, sesuai dengan bakat dan bahan kita, sesuai dengan jiwa sebahagian besar daripada rakyat kita.

Anti Eksploitasi dan Kemiskinan

Nabi Muhammad SAW, adalah seorang pemimpin revolusi. Salah satu dari anasir revolusi beliau ialah memberantas tiap-tiap eksploitasi manusia oleh manusia, memberantas 'exploitation of man by man' dan memberantas kemelaratan dan kemiskinan 'elimination of poverty', kata orang sekarang. Ajaran Islam berisi dan ditujukan kepada memberantas eksploitasi manusia oleh manusia, dan memberantas kemelaratan dan kemiskinan itu.

Beliau berkata: "Kemiskinan dan kemelaratan itu adalah dekat sekali kepada kekufuran", "Kadal faqru an-yakuna kufran", dalam bahasa Arabnya. Jadi janganlah dibiarkan kemiskinan dan kemelaratan merajalela di sekeliling kita, sebab kemiskinan dan kemelaratan itu membawa manusia kepada kemungkaran. Manusia yang baik bisa menjadi ingkar, disebabkan kemelaratan dan kemiskinan yang merajalela. Jikalau ingin akhlaq jangan merosot, demoralisasi jangan merajalela, maka salah satu obatnya 'berantaslah kemiskinan dan kemelaratan' itu.

Produktifkan Harta Untuk Masyarakat

Menurut ajaran Islam, kapital atau kekayaan itu janganlah ditumpuk-tumpuk dengan tidak mengadakan penambahan produksi. Jangan ditumpuk-tumpuk mas dan perak untuk dilihat dan dihitung-hitung saja saban waktu, tapi masukkanlah dalam roda produksi, dalam produksi stelsel bagi menambah kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.

Diancam Tuhan orang yang menumpuk-numpuk harta yang unproduktif itu, yaitu orang yang dinamakan yaknizu-nazzhab, yaitu orang yang menyimpan mas dan perak dengan tidak produktif, tanpa menghasilkan apa-apa (QS. At-Taubah : 34). Harta-harta itu mesti digerak dan diputar, agar orang yang tidak bekerja dapat pekerjaan

dan agar besarnya produksi dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Atau dengan lain perkataan modal harus dijadikan produktif, hendaklah pula para pemilik modal atau majikan jangan dipimpin semata-mata motif mencari untung saja, tapi harus mementingkan perkembangan dan keperluan masyarakat.

Kesimpulan

Tiap kebajikan adalah kebaikan, yang sangat dimuliakan dalam Islam. Menurut Bapak M. Natsir kebajikan kebaikan itu adalah jasa baik, berkecenderungan kepada damai/perdamaian, adil/keadilan, anti eksploitasi sesama manusia/bangsa dan nanti kemiskinan/kemelaratan. Kita hendaknya bijak dalam beramar ma'ruf nahi munkar, menentang kejahatan dengan kebaikan, dan memproduksi harta kekayaan agar berfungsi sosial. Yang demikian itulah khaira ummah, yakni ummat yang terbaik dan bijak.

M. Natsir Tentang Agama dan Pendidikan

Pendidikan: Memampukan dan Memuliakan Manusia

Kemunduran dan kemajuan itu tidak bergantung kepada ketimuran dan kebaratan, tidak bergantung kepada putih, kuning, atau hitam warna kulit, tetapi bergantung kepada ada atau tidaknya sifat-sifat dan bibit-bibit kesanggupan dalam suatu umat, yang menjadikan mereka layak atau tidaknya menduduki tempat yang mulia di atas dunia ini. Dan ada atau tidaknya sifat-sifat dan kesanggupan (kapasitas) ini bergantung kepada pendidikan ruhani dan jasmani, yang mereka terima.

Tujuan Pendidikan Islam: Perhambaan kepada Allah

Apakah kiranya yang menjadi tujuan pendidikan dalam Islam itu? Yang dinamakan pendidikan, ialah satu pimpinan jasmani dan ruhani yang menuju kepada kesempurnaan dan lengkapnya sifat-sifat kemanusiaan dengan arti yang sesungguhnya. Pimpinan semacam ini sekurangnya perlu kepada dua perkara:

- a. Satu tujuan yang tertentu tempat mengarahkan pendidikan itu.
- b. Satu asas tempat mendasarkannya (yakni Tauhid).

Akan sia-sialah tiap-tiap pimpinan itu apabila ketinggalan salah satu dari yang dua ini. Pertanyakan: "Apakah yang akan dituju oleh pendidikan kita?" sebenarnya tidak pula dapat dijawab sebelum menjawab pertanyaan yang lebih tinggi lagi yaitu "Apakah tujuan hidup kita di dunia ini?" Kedua pertanyaan ini tidak dapat dipisahkan, keduanya sama (identik). Tujuan pendidikan ialah tujuan hidup itu sendiri!

Al-Qur'an menjawab pertanyaan itu:

Dan Aku (Allah) tidak menjadikan jin dan manusia, melainkan untuk menyembahKu! (QS. Adz-Dzariyat : 56).

Akan memperhambakan diri kepada Allah, akan menjadi hamba Allah, inilah tujuan hidup kita di atas dunia ini. Dan inilah pula tujuan pendidikan yang wajib kita berikan kepada anak-anak kita, yang sedang menghadapi kehidupan.

Penghambaan kepada Allah yang menjadi tujuan hidup dan menjadi tujuan pendidikan kita, bukanlah suatu penghambaan yang memberi keuntungan kepada yang disembah, tetapi penghambaan yang mendatangkan kebahagiaan kepada yang menyembah: penghambaan yang memberi kekuatan kepada yang memperhambakan dirinya itu.

Dan barangsiapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan Maha Mulia! (QS. An-Naml : 40).

Akan menjadi orang yang memperhambakan segenap ruhani dan jasmaninya kepada Allah SWT untuk kemenangan dirinya dengan arti yang seluas-luasnya yang dapat dicapai oleh manusia, itulah tujuan hidup manusia di atas dunia. Dan itulah tujuan pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita kaum Muslimin. Inilah 'Islamietish Paedagogisch Ideal' yang gemerlapan yang harus memberi suara kepada tiap pendidik Muslimin dalam mengemudikan perahu pendidikannya.

Seorang pendidik Islam tidak usah memperdalam dan memperbesar antagonisme (pertentangan) antara Barat dengan Timur. Islam hanya mengenal antagonisme antara haq dan bathil. Semua yang haq akan kita terima, biar pun datangnya dari Barat, semua yang bathil akan kita singkirkan walaupun datangnya dari Timur.

Mengenal Allah, men-tauhidkan Allah, mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah, tak dapat tidak harus menjadi dasar bagi tiap pendidikan yang hendak diberikan kepada generasi yang kita latih, jikalau kita sebagai guru atau pun sebagai ibu-bapak, betul-betul cinta kepada anak-anak yang telah dipertaruhkan Allah kepada kita itu.

Meninggalkan dasar ini berarti melakukan satu kelalaian yang amat besar, yang tidak kurang besar bahayanya daripada berkhianat terhadap anak-anak yang kita didik, walaupun sudah kita sempurnakan makan dan minumannya dan telah kita cukupkan pakaian dan perhiasannya, serta sudah kita lengkapi pula ilmu pengetahuan untuk bekal hidupnya. Semua ini tak ada artinya apabila ketinggalan memberikan dasar Ketuhanan seperti diterangkan di atas itu.

Marilah sama-sama kita dengarkan wasiat seorang Bapak kepada anaknya yang sedang ia didik:

Perhatikanlah tatkala Lukman berkata kepada anaknya yang sedang ia beri didikan: "Hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Tuhan, sesungguhnya syirik itu ialah sebesar-besarnya kezaliman.

Dan Kami wasiatkan kepada manusia, yang dikandung oleh ibunya dengan menderita kepayahan yang sangat, sambil memelihara serta melatihnya dalam masa dua tahun, berhubung dengan kewajibannya terhadap ibu bapaknya itu. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada ibu bapakmu! (QS. Lukman : 13-14).

Demikian Lukman memberi contoh. Demikian Qur'an memberi isyarat kepada tiap bapak yang mempunyai anak, memberi tahu apakah yang paling dahulu harus ditanam dalam sanubari anak yang masih muda dan mudah dibentuk itu, yakni perhubungan si anak dengan Tuhannya, supaya ada 'tali Allah' tempat ia bergantung. Perhubungan dengan manusia dan sesama makhluk dapat diadakan kapan saja waktunya. Akan tetapi perhubungan dengan Ilahi tidaklah boleh dinanti-nantikan setelahnya besar atau berumur lanjut.

Pendidikan: Ibadah dan Muamalah

Maka berbahagialah seorang anak apabila ia mempunyai seorang bapak yang tahu menanamkan tauhid dalam sanubarinya sedari kecilnya. Akan terpeliharalah ia dari malapetaka, karena senantiasa ada perhubungan dengan Khalik yang menjadikannya serta mengutamakan mu'amalah dengan sesama makhluk. Itulah dua syarat yang tak dapat tidak, harus dipakai supaya mendapat keselamatan dan kebahagiaan hidup, lahir dan bathin.

Malapetaka dan kehinaanlah yang akan menimpa mereka, dimana saja mereka berada, kecuali apabila mereka mempunyai perhubungan dengan Allah dan pertalian sesama manusia. (QS. Ali Imran : 112).

Marilah kita dengarkan pula percakapan seorang bapak dengan seorang anaknya yang masih muda remaja, tapi mempunyai watak yang teguh dan luhur:

Dan tatkala umurnya sudah lanjut, berkatalah ia: "Hai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau; bagaimana pendapatmu dalam hal ini?"

Anaknya menjawab: "Ya bapakku, kerjakanlah apa yang telah disuruh itu; sungguh-sungguh akan bapak ketahui bahwa aku ini termasuk dalam golongan orang-orang yang teguh dan sabar. (QS. Ash-Shaffat : 102).

Begitulah jawaban yang diucapkan oleh seorang muda remaja, Ismail terhadap bapaknya Ibrahim, tatkala mendengar bahwa bapaknya mendapat perintah dari Allah supaya menyembelih dia untuk dikurbankan. Sedikit pun hatinya tak terguncang menghadapi akan berpisah badan dengan nyawa, bilamana memang sudah begitu kehendak dari Allah. Itulah buah pendidikan yang berdasarkan tauhid.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, menurut Bapak M. Natsir pendidikan hendaknya berdasarkan tauhid dan menjadikan manusia memperhambakan dirinya kepada Allah dan berkemampuan untuk beribadah dan muamalah sehingga layak menduduki posisi mulia ruhani jasmani, di dunia dan akhirat.

M. Natsir Tentang Agama dan Politik

Islam: Ibadah dan Politik

Seringkali orang bertanya, kenapakah agama dibawa-bawa ke dalam politik. Atau sebaliknya, kenapakah politik dibawa-bawa ke dalam agama? Pertanyaan ini timbul karena seringkali orang mengartikan bahwa yang dinamakan agama itu, hanyalah semata-mata satu sistem peribadatan antara makhluk dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Definisi ini mungkin tepat bagi bermacam-macam agama. Akan tetapi tidak tepat bagi agama yang bernama Islam itu, yang hakikatnya nyata adalah lebih dari itu.

Kalau kita meminjam perkataan seorang orientalis, H.A.R. Gibb, maka kita dapat simpulkan dalam satu kalimat: "Islam is much more than a religious system. It is a complete civilization." Islam itu adalah lebih dari sistem peribadatan. Ia itu adalah satu kebudayaan/peradaban yang lengkap dan sempurna.

Yang dituju oleh Islam ialah agar agama hidup dalam kehidupan tiap-tiap orang, hingga meresap dalam kehidupan masyarakat, ketatanegaraan, pemerintah dan perundang-undangan. Tapi adalah ajaran Islam juga, bahwa dalam soal-soal keduniawian, orang diberi kemerdekaan mengemukakan pendirian dan suaranya dengan musyawarah bersama, seperti dinyatakan oleh firman Allah SWT.: "*Dan hendaklah urusan mereka diputuskan dengan musyawarah!*" (QS. Asy-Syura : 38).

Hak Asasi Manusia & Demokrasi

Di dalam mencari hidup bahagia dan mengatur masyarakat, ahli pikir dan ahli sosiologi serta pejuang-pejuang kemerdekaan di seluruh dunia, sudah sepakat menyusun suatu daftar yang dinamai hak-hak asasi manusia. PBB mempunyai satu seksi tersendiri, untuk menyusun apa yang dinamakan hak-hak asasi bagi manusia itu. Hampir seluruh negara-negara yang merdeka di dunia sudah mengakui hak-hak asasi tersebut sebagai dasar-dasar pikiran untuk dijadikan dasar pembangunan negara dan peri kemanusiaan.

Antara lain, hak-hak asasi itu ialah hak merdeka berbicara dan mengutarakan pendapat, hak kemerdekaan beragama, hak mendapat kehidupan yang layak, hak untuk mogok bila perlu, ya, macam-macam hak. Daftar hak-hak asasi itu sudah diatur, untuk diperingatkan kepada

orang, agar jangan ada manusia yang dieksploiter oleh manusia lain. Ia mengingatkan kepada manusia agar jangan mau dieksploiter oleh orang lain. Yang demikian tentu adalah suatu langkah yang baik.

Tetapi yang belum terlihat ialah hasilnya hak-hak asasi manusia yang diakui itu. Belum mesra rupanya dalam pikiran tiap individu mana yang haknya, mana yang bukan haknya, sehingga hak-hak asasi itu belum terlaksana dengan baik dalam masyarakat umat manusia.

Yang Pegang Hak vs Yang Punya Hak

Kepada manusia diajarkan supaya memperjuangkan haknya itu. Dia harus berjuang untuk mendapatkan haknya tersebut. Orang yang memegang hak itu takkan suka dengan begitu saja, hak itu diambil oleh orang yang punya hak, tapi ia mempertahankan yang disangkanya punyanya itu. Sebagai akibat dari menginsyafi hak dan tak memberikan hak itu, terjadilah bentrokan antara yang memegang hak dan yang punya hak.

Pihak kaum buruh mengatakan: "Kami berhak, kalau tidak mau memberikan hak itu, kami pakai senjata mogok". Kaum majikan mengatakan: "Tidak! Kita mau lihat sampai ke mana kekuatanmu. Kita tidak akan memberikan sedikit juga hak itu jikalau belum bertempur!"

Maka terjadilah pertempuran dalam memperebutkan hak dan hak itu dan timbullah dari perebutan hak itu semacam sistem yang lazim disebut orang sekarang, 'struggle for life', perebutan hidup yang didasarkan kepada penuntutan dan penuntutan, yang berakibat siapa kuat siapa di atas, siapa lemah siapa mati!

Di negara-negara Barat, yang berkobar-kobar sekarang ini adalah falsafah 'struggle for life' itu, mencari hidup, walaupun orang lain akan hancur lantarannya!

Islam: Kewajiban baru hak

Tapi kita bertanya apakah memang, itulah satu-satunya jalan untuk mencapai kehidupan dan kesejahteraan sosial? Ajaran Islam dalam menghadapi soal sulit-rumit ini, mempunyai pendapat yang berbeda. Dengan tidak mengurangi bahwa tiap orang harus mengetahui apa haknya, Islam pertama-tama mengajarkan bukanlah 'apa hak saya',

tapi yang diajarkannya pada seorang Muslim, ialah 'apa kewajiban yang aku harus penuhi'.

M. Natsir Tentang Dakwah dan Sumber Daya Manusia

Hamba Allah: Hamba Merdeka

Dalam pandangan Allah, manusia hanya terbagi kepada dua macam: hamba Allah atau hamba bukan-Allah. Maka barangsiapa yang percaya kepada Allah lalu melengkapi dirinya dengan sifat-sifat ubudiyah kepada Allah, patuh dan taat menurut perintahNya dan meninggalkan larangan Allah dan yakin berpegang kepada agama Allah, mereka itulah yang berhak mendapat gelar kehormatan sebagai hamba Allah. Dan barangsiapa yang benar-benar telah memperhambakan diri kepada Allah semata, akan direndahkan Allah di bawah telapak kakinya alam semesta, dan akan direndahkan Allah guna kepentingannya, langit dan bumi serta segala yang terletak di antara keduanya.

Tetapi sebaliknya, barangsiapa yang tiada mau memperhambakan diri kepada Allah, akan direndahkan Allah ia di bawah kekuasaan alam dan benda. Nasibnya akan menderita kepayahan dan kesukaran di bawah pengaruh dan perhambaan alam yang rendah, seperti uang, pangkat, ilmu dan tipuan kehidupan dunia. Ketahuilah, bahwa perhambaan diri kepada Allah semata, adalah jalan kepada kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan dari penjajahan benda dan maddah.

Berbuat Baik, Tinggalkan Kejahatan

Apabila kita benar-benar menginginkan kemenangan yang hakiki, maka janganlah dipekakkan telinga dari pada mendengarkan seruan Allah yang khusus faedahnya bagi memudahkan mencapai kemenangan itu. Firman Allah SWT: "Kerjakanlah al-khair, kerjakanlah amal kebaikan, kerjakanlah segala amal perbuatan yang bernilai baik! Moga-moga dengan demikian kamu akan menjadi umat yang menang!" Ini janji Allah dan inilah petunjuk Allah itulah yang sebenar-benarnya petunjuk!

Apabila kaum Muslimin inginkan kemenangan dunia dan akhirat, maka dahulukanlah diri mengerjakan apa yang baik dan dahulu-

mendahuluilah mengerjakan kebaikan, *fastabiqul khairat!* Dengan demikian Allah akan mengkaruniakan kemenangan kepada kita.

Ibda' bi Nafsik

Ketahuilah, bahwa permulaan apa yang dinamakan baik itu ialah meninggalkan kejahatan, sebab itu jauhilah lebih dahulu segala yang jahat dan tidak baik, sebab dasar asasi dari kebaikan itu ialah menjauhi segala yang tidak baik. Marilah mulai membuang segala yang tidak baik itu pada diri pribadi masing-masing, maupun berupa akhlaq dan tabiat yang keji-keji, demikian pula segala noda dan cacat yang merendahkan kemanusiaan dan martabat keislaman masing-masing. Kemudian tegakkanlah segala yang bernama kebaikan itu di dalam diri pribadi lahir dan bathin, sehingga dapatlah hendaknya kita menanamkan diri kita seorang insan yang muslim dan mu'min.

Sekiranya usaha menegakkan kebaikan pada diri pribadi kita sudah selesai, maka lanjutkanlah memperluas ruangan kebajikan itu dalam lingkungan keluarga: anak-istri serta keluarga famili. Sabda Nabi Muhammad SAW: "Mulaikanlah dahulu mendirikan agama itu pada dirimu sendiri, kemudian di dalam lingkungan keluarga familimu!"

Nabi Muhammad SAW memulai usaha membina kemenangan dunia dan akhirat, ialah dengan menegakkan agama itu lebih dahulu pada diri pribadinya, diiringi oleh diri pribadi sahabatnya, lalu bersama-sama mereka melengkapkan berdirinya Islam di dalam lingkungan istri dan anak yang menjadi keluarga dan familinya masing-masing. Dengan demikian, di dalam jangka waktu yang pendek beliau mampu mengislamkan bangsa dan negara yang menjadi keluarga besar baginya.

Kini telah datanglah waktunya bagi umat Islam menyingsingkan lengan bajunya bekerja sungguh-sungguh, merampungkan sekian banyak bengkalai yang belum jadi. Permulaan jihad ialah meninggalkan enggan dan lalai, menjalankan giat dan sabar memikul tugas kewajiban.

Ada semacam penyakit yang merajalela dalam kehidupan beragama kita dewasa ini. Yaitu penyakit merasa sukar dan payah menjalankan tugas dan kewajiban agama. Dikiranya agama itu berat dan sukar, hidup beragama itu hidup yang sempit dan tak ada kelapangan, tak ada kebebasan. Pendapat yang semacam ini nyata salahnya. Agama itu

ialah pembebasan dari segala kesempitan dan kepayahan dan syariat Islam terkenal sebagai syariat yang samahah, lapang, yang mendasarkan tiap tugas dan kewajiban itu atas kesanggupan dan tenaga yang ada pada diri manusia itu masing-masing. Allah tidak membebankan taklif kepada manusia, lebih dari kemampuan tenaganya berbuat, sebab itu tak ada perkara yang sempit dan sukar di dalam titah perintah Agama.

Da'wah: Memanggil ke Jalan Allah

Keimanan adalah karunia Ilahi, yang hanya dapat diperoleh dengan pengajaran dan pendidikan yang baik, dengan dakwah dan panggilan (seruan) yang bijaksana serta diskusi (mujaadalah) yang sopan dan terarah.

Umat Islam berpegang kepada khittah memanggil/menyeru manusia ke jalan Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

Panggillah ke jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan pendidikan yang baik dan bertukar pikiranlah dengan cara yang lebih baik.
(QS. An-Nahl : 125).

Orang Islam hanya disuruh memanggil, sekali lagi memanggil! Memanggil dengan cara yang bersih dari segala yang bersifat paksaan.

Kesimpulan

Manusia Muslim, menurut Bapak M. Natsir adalah hamba Allah. Hamba yang merdeka. Hamba yang memang karena berbuat dan mengajak kebaikan, menjauhi dan melarang kejahatan. Untuk menjadi hamba Allah mulai dari diri sendiri lalu keluarga dan masyarakat melalui da'wah, yakni memanggil, menyeru, mengajak mereka ke jalan Allah dengan kebijaksanaan dan pendidikan yang baik serta diskusi yang sopan.

Tanggapan Tentang Capita Selecta

Farid Sjafruddin Prawiranegara

Dari pembicara-pembicara terdahulu tidak atau sedikit bahkan tidak secara eksplisit menyinggung masalah perjuangan yang sebetulnya juga integral dengan apa yang Pak Natsir perjuangkan selama ini, begitu juga dengan orang tua saya (Sjafruddin Prawiranegara, Pen). Yaitu keterlibatan beliau di dalam PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia), seolah-olah kita semua yang ada, terutama dari kelompok Bulan Bintang merasa ini suatu aib, suatu dosa yang dilakukan oleh mereka berdua dengan Pak Bur (Burhanuddin Harahap, tokoh Masyumi, Pen).

Tetapi bagi saya, ini merupakan legalisasi yang harusnya dideklarasikan. Karena sesungguhnya perjuangan PRRI merupakan perjuangan yang konsisten dengan perjuangan-perjuangan sebelumnya. Baik Pak Natsir maupun ayah saya terlibat dalam suatu event yang sebetulnya mempersatukan bangsa ini.

Pak Natsir dengan Mosi integralnya, mempersatukan kembali Republik Indonesia ini. Ayah saya waktu PDRI, juga berjuang mati-matian untuk menolak konperensi Roem-Roijen. Simple, karena Roem-Roijen — siapa sih orang buangan yang bisa bertindak atas nama Republik Indonesia? Padahal Pemerintah Darurat Republik Indonesia adalah pemerintah yang sah pada saat itu. Beliau menentang.

Saya masih ingat, Jenderal Soedirman saat itu mempertanyakan bahkan menuntut agar bertanya dahulu kepada militer dalam langkah-langkah pengambilan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik. Jawaban ayah saya pada waktu itu adalah, "Dalam negara demokrasi, angkatan bersenjata di bawah sipil." Oleh sebab itu keputusan yang ayah saya ambil bukan keputusan karena keinginan Jenderal Soedirman, tetapi keputusan yang diambil oleh politisi dan keputusan itu kebetulan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh militer pada saat itu. Yakni menolak Roem-Roijen.

Pak Natsir kemudian datang sebelumnya Pak Hatta pergi ke Aceh mencari ayah tapi ternyata tidak ada di Aceh. Beliau pulang ke Yogya dan bertemu Pak Natsir, Natsir berbicara dua hari dua malam hanya untuk mengkonfirmasi ayah saya bahwa dia harus kembali, demi persatuan. Akhirnya dia kembali, menyerahkan mandat kepada Soe-

karno. Banyak orang menyalahkan PRRI dan menganggap ini suatu pengkhianatan. Orang beranggapan ini suatu aib yang harus kita pikul. Padahal, ada beberapa politisi yang datang ke Sungai Daroh pada waktu itu, termasuk Pak Soemitro. Tugas mereka pada prinsipnya ada tiga yang paling hakiki. *Pertama*, mencegah agar gerakan kedaerahan jangan berubah menjadi gerakan separatis. *Kedua*, menolak keterlibatan PKI dalam kabinet. Dan *ketiga*, melanjutkan dialog dengan Pusat (Pemerintah Pusat di Yogya, Pen).

Beliau minta supaya PRRI ditangguhkan paling sedikit tiga bulan, akan tetapi militer daerah — dalam hal ini Bapak Ahmad Husein — mengatakan Minangkabau jadi taruhan. Itu yang menyebabkan kemudian keputusannya adalah, mari kita kasih ultimatum.

Setelah lima hari tidak ada dialog, baru mereka memproklamasikan PRRI. Dan jangan lupa, itu adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, bukan serikat. Waktu itu tidak pernah terpikirkan bahwa itu merupakan negara serikat. Baru setelah kita mau kalah, dua tiga setengah tahun kemudian kita sudah terkepung, dan menyatakan diri menjadi negara Republik Persatuan Indonesia. Dengan harapan, secercah harapan ada negara yang mau mengakui negara Republik Persatuan Indonesia ini. Jadi sebetulnya, dalam hati kecil mereka tidak ada yang menginginkan hal itu.

Ada satu hal, saya ingin menjawab Pak Lukman Harun. Pada saat itu ada dua tawaran Amerika untuk memburni hanguskan kota Pekanbaru dan bantuan Armada Tujuh. Kedua bantuan ini ditolak. Jadi kalau dibilang Natsir dengan Masyumi dan Sjafruddin Prawiranegara memihak pada Amerika, saya perlu mempertanyakan.

Saya yakin betul pada saat itu bahwa Pak Lukman Hakim, Direktur Bank Indonesia mentransfer habis semua emas yang ada di Bank Indonesia ke Padang, hanya untuk membeli senjata karena tidak mau disupport CIA. Bahwa CIA terlibat di dalamnya, seperti yang diumumkan dokumen CIA akhir-akhir ini. Itu bukan atas kemauan kita. Karena emas itu dipikul oleh ayah saya sepanjang perjuangan empat setengah tahun. Dialah — yang ranselnya berat sekali dan kamipun tidak tahu ransel itu emas isinya. Pada saat beliau kembali, emas itu diserahkan kepada Ahmad Husein. Sebagian sudah dibagi-bagikan kepada komandan-komandan tentara. Apakah mereka bayarkan atau tidak, tetapi itulah yang terjadi.

Dr. A.M. Lutfi:

Sekadar informasi perihal gagasan Pak Natsir tentang Masjid Kampus. Beberapa kampus didirikan atas prakarsa Mohammad Natsir. Antara lain, Masjid Kampus Sultan Trenggono di Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus didirikan yayasannya di Ampel. Diguakannya nama Trenggono karena Sultan Trenggono adalah Da'i pertama di Semarang.

Di Ujung Pandang, dibuat Yayasan dan Masjid Alauddin, demikian pula di Masjid Salman ITB Bandung. Sedang di Universitas Gajah Mada, IKIP, Universitas Islam Indonesia dilengkapi Padepokan. Di Padang dibuat Islamic Center. Di setiap kota kampus dibangun center-center melanjutkan visi pemikiran dan perjuangan Pak Natsir.

Dalam konteks inilah kita bermaksud membuat Universitas Internasional Mohammad Natsir. Idenya baik, tetapi jangan sampai jadi humerang. Jadi saya ingin menjelaskan bukan di Padang saja, di beberapa kota kampus telah berdiri embrio, bagian dari pusat Islam untuk pemikiran Natsir. Generasi muda ini yang barangkali bisa dikaitkan center-nya di Jakarta.

Pak Natsir pada waktu masih sehat, mencari dana ke Kuwait, dan berhasil mendapat tanah dua hektar. Di atas tanah ini lalu didirikan kampus dan Masjid Fatahillah. Kita buat semacam mini kampus sebagai embrio, ada masjid, ruang kyai. Insya Allah seorang mantan Menteri Besar negara tetangga bersedia membangun gedung serba gunanya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana, kita gunakan sebagai modal untuk membentuk Universitas Internasional Mohammad Natsir.

Waktu saya, Pak Baiquni dan Pak Dr. Muhammadi dikirim Pak Natsir ke Riyadh, 1970, menghadiri *The First International Conference of Science and Technology Islamic*. Pada saat itulah Raja Faisal terbunuh sehingga konferensi tidak jadi di sana. Kita disugesti untuk usulkan ada Universitas Islam Internasional di tiga tempat di Asia Tenggara, di Afrika dan di negara Eropa.

Kesan-kesan

Pembicara: **Dr. Yusril Ihza, Dr. A.M. Saefuddin, dan
Dr. Ir. Imaduddin Abdul Rahim Msc.**
Moderator: **Drs. Tamsil Lindrung**

Dr. Ir. Imaduddin Abdurrahim Msc:

Rasanya saya lebih senang berbicara yang tidak terikat pada satu paper, hanya pengalaman-pengalaman yang ada hubungannya dengan Mohammad Natsir. Saya sebagai pribadi bukan sebagai ilmuwan dalam hal ini.

Pertama kali saya merasa mulai kagum kepada Pak Natsir tahun 1966 ketika bekerja di Cornell University. Ketika saya harus pulang selama musim panas, saya bekerja di Cornell sebagai asisten dosen bahasa Indonesia. Mereka menganggap bahasa Indonesia kuatnya adalah bahasa Melayu. Bagi mereka, yang sudah belajar bahasa Indonesia, juga harus mengerti bahasa Melayu.

Sedangkan guru-guru datang dari Indonesia yang jadi guru bahasa Indonesia tidak ada yang bisa menulis bahasa Melayu. Saya dipakai selama sembilan minggu. Selama *summer* saya berkenalan dengan orang-orang Amerika, di antaranya ada pengagum Mohammad Natsir, antara lain Kahin. Ketika 17 Agustus diadakan upacara perayaan piknik, dan Kahin menyinggung nama Pak Natsir dan sebagainya.

Ketika saya mau pulang ke tanah air, ini yang berkesan sekali, sebab selama ini saya menganggap Pak Natsir itu sebagai seorang bekas Menteri dan lain sebagainya, tidak ada kesan-kesan yang agak mendalam, ini kejadian tahun 1966. Echols mengundang saya untuk *dinner*. Ketika dia tahu saya akan pulang malam harinya, saya datang dan ngobrol-ngobrol tapi inti dari ngobrolnya itu begini. Kenapa

kalian, tanyanya, orang Indonesia terutama orang Islam, kurang menghargai sejarah, kurang menghargai pahlawan kalian, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting kalian yang hilang.

Saya catat lalu saya berusaha mengundang H. Agus Salim datang kembali sebagai *visiting professor* setahun di sini. Selama 5 tahun ini saya mengorek pertanyaan-pertanyaan apa peranan beliau pada waktu pecahnya Sarekat Dagang Islam (SDI) Merah dan SDI Putih 1925-1926. Tapi Agus Salim selalu menjawab, "We are as moslems not intrested in the past. We are interested in the future." Sehingga karena modestynya, hilang peristiwa sejarah ini. Lantas dia mengatakan, sekarang kalian punya tokoh antara lain yang saya kagumi Mohammad Natsir. Coba mulai sekarang tulis tentang dia itu.

Saya bilang, "I'm engineer, saya tidak tahu soal begitu."

"Cari mahasiswa yang mau menulis Mohammad Natsir dan saya akan berikan beasiswa," kata Echols.

Oleh karena itu, waktu saya pulang ke tanah air, 1966, persis Abah (Mohammad Natsir, Pen) baru dibebaskan dari Karantina. Saya cari-cari beliau di jalan Blora. Saya sampaikan apa yang dikatakan Acles ini. Sejak itulah saya mulai dekat dengan Pak Natsir.

Kemudian tahun 1971, saya pertama kali diorbitkan oleh Pak Natsir di dalam kegiatan International. Saya ditelepon dari Jakarta, waktu itu saya masih di Bandung. Ketika saya datang, sudah disediakan tiket dan uang dan sebagainya, berangkat ke Akhed, menghadiri *IIFSO Conference*, mewakili PERSAMI.

"Karena saya diundang untuk memberikan pidato, kamu saja yang pidato," kata Pak Natsir.

"Mana papernya, Pak?" tanya saya.

"Saya bacakan, kamu yang ngomong," kata Pak Natsir.

Saya kaget juga. Tapi beliau bukan hanya menyuruh itu. "Kalau pulang," katanya, "kamu jangan langsung ke Indonesia. Saya sudah sediakan tiket segala, kamu singgah di Beirut, temui Mufti Palestina, yang waktu itu Presiden Mu'tamar 'Alam Islami. Ini surat saya pribadi kamu sampaikan langsung ke tangannya, jangan di pokan," tambahnya.

Pulang dari Achen, Jerman, saya lakukan apa yang beliau minta, yaitu mampir di Beirut, jumpa Amin Al-Husaini saya dijamu dan

sebagainya. Tahu bahwa saya mewakili Mohammad Natsir, bukan main hormatnya mereka.. Satu jam saya beraudiensi dengan beliau dengan baik sekali. Ini salah satu yang menyebabkan saya berfikir. Kalau wakilnya saja sudah begini hebatnya, apalagi Natsirnya. Perasaan saya begitu, diundang *dinner* segala macam oleh menantunya.

Ketika mau pulang.

"Mau pulang ke mana?" tanya Pak Natsir.

"Saya mau pulang tapi ingin mampir di Mekkah, Umroh," jawab saya.

"Bisa tidak mampir di Pakistan?" tanyanya.

"Boleh kalau diperlukan," kata saya.

"Ini," kata Pak Natsir, "saya kirim surat untuk Maududi. Tapi tolong sampaikan sendiri, jangan pakai pos."

Tambah lagi ini saya mulai diorbitkan oleh Pak Natsir.

Selesai dari Mekkah langsung ke Karachi, jumpa Imam Imanullah Khan. Saya ceritakan pesan Mufti Palestina, dibelikannya saya tiket dan dikirim ke Lahore, menjumpai Maududi. Tidak bisa jumpa langsung dengan beliau, karena waktu itu sudah sore, tidak bisa terima tamu. Beliau hanya bisa terima tamu pagi-pagi jam sepuluh. Terpaksa menginap di situ. Paginya sesuai janji, masuklah utusan dari Mohammad Natsir. Wah, bukan main sambutannya, luar biasa.

Saya pun heran sekali, saya sudah termasuk orang yang banyak baca buku Maududi, jadi diterima. Dengan demikian bukan main perasaannya. Satu jam ngobrol dengan beliau termasuk dikasih nasihat-nasihat dan sebagainya, lalu diberinya saya buku tulisannya berjudul *Tafhimul Qur'an*, waktu itu baru terbit pertama dan ditulis dalam bahasa Inggris, saya minta tanda tangan. Itulah pertama kali kenal sama Maududi.

Tapi sebelum itu, di Beirut, saya dengan Mufti Palestina. Ketika mendengar utusan Mohammad Natsir datang, rupanya orang-orang situ sibuk juga, sehingga akhirnya saya dibawa, dilarikan. Janjinya satu malam, jadi tiga malam. Jumpa tokoh Ikhwan Libanon Fatah Ya Khan. Tempatnya di puncak gunung Tripoli. Saya datang ke sana, mula-mula saya sebutkan dari Indonesia, matanya curiga. Tapi ketika saya katakan utusan Pak Natsir, langsung dipeluknya dan diciumnya. Ya Allah.

Jadi utusan Pak Natsir ini banyak senangnya tapi juga banyak kesalnya. Kesalnya begini, waktu saya di Riyadh, 1967, ketika Binbas mengetahui saya ada di sana, saya diundang dan dikenalkan oleh Ahmad Totonji. Toton agak berlebih-lebihan, saya jadi *exceiting*, orang yang dekat dengan Natsir saja sudah diperlakukan istimewa. Wah Bin Bas yang besar itu saking gembiranya ingin memeluk saya, untung tidak jadi.

Tapi apa katanya, "Saya merasa berdosa kalau Anda tidak makan dengan saya," ujar Bin Bas.

"Saya bilang, saya mau pulang nanti malam."

"Tidak, undurkan itu, undurkan," desaknya. "Bagaimana malunya saya dengan Natsir kalau tidak makan dengan Anda," kata Bin Bas.

Terpaksa tambah semalam lagi di situ, makan sama Bin Bas.

Jadi utusan Pak Natsir ini banyak enakunya tapi banyak mangkelnya juga. Tapi saya ceritakan ini untuk menunjukkan, inilah penghargaan orang terhadap beliau ini. Sedangkan di tanah air kadang-kadang, sebagaimana orang mengatakan, marginal dan sebagainya itu. Apa tindakan kita sekarang, terserahlah.

Ini kesan-kesan dari orang-orang asing. Pernah saya ditanya, Pak Natsir sekolah di universitas mana?

Saya jawab, beliau tidak pernah mahasiswa. Cuma tamat High School.

"Kenapa dia pakai doktor?"

"Siapa yang kasih doktor?" saya bilang. "Kalian yang panggil Doktor Natsir. Saya ngomong sama Doktor Hisyam Thalib yang pernah tanya, 'kalau you panggilnya apa?' 'Kalau saya panggil Abah,' saya bilang. 'Bapak what's means?' 'It's father. Abah is father,' saya bilang. Hanya orang Arab yang panggil doktor, saya bilang begitu.

Jadi inilah gambaran dan kesan yang saya alami ketika diorbitkan. Kalau saya katakan diorbitkan oleh doktor Natsir atau Pak Natsir ke dunia Internasional dalam gerakan. Akhirnya saya dipaksa jadi Sekretaris Jenderal IIFSO, terpaksa dulu di WAMI (World Assimbly of Muslem Youth), dan sebagainya.

Dan lucunya, sekali waktu saya menjadi tamu Bin Bas. Pertama yang datang korma satu mangkok dan semangkok air. Saya makan korma, tangan berlekat-lekat. Melihat air di mangkok, saya pikir air

cuci tangan, lalu saya cuci tangan saya di situ.

Selesai saya cuci tangan — Bin Bas juga makan korma itu. Selesai makan, dia minta minum. Air bekas cuci tangan saya diminumnya.

Itu yang saya alami selama jadi utusan Mohammad Natsir selama di luar negeri. Sangat dihormati orang, tapi di sini tampaknya hanya keluarga Bulan Bintang saja yang membesarkan dia, yang lain kurang, kurang menghargai. Saya sangat setuju dengan idenya Pak Dr. A.M. Syaefuddin supaya didirikan Universitas Islam International Mohammad Natsir.

Dr. Ir. A.M. Syaefuddin

Saya berkenalan dengan Allah Yarham Bapak Muhammad Natsir ketika saya baru saja mulai aktif di PII, 1953. Ketika itu umur saya 13 tahun. PII itulah yang menggiring saya membaca *Capita Selecta*, lalu mengikuti berita-berita tentang Mohammad Natsir sampai pindah ke Bogor. Bersama Taufiq Ismail, Allah Yarham Mohammad Saleh Widodo, Hardi Arifin. Di bawah bimbingan orang tua Kyai Tubagus KH. Hasan Basri, almarhum Sholeh Iskandar. Lalu sering diajak jalan-jalan ke Jakarta.

Tapi intensif bertemu dengan Pak Natsir ketika saya kembali dari Jerman. Atas usul Pak Anwar Harjono saya diberi tugas (1975) menghadiri konperensi Internasional Ekonomi dan Bank Islam. Saya kaget, karena pada waktu itulah saya baru tahu bahwa Islam sungguh sangat dalam mewarnai ekonomi. Dan terkejut karena baru pertama kali saya hadir dalam konperensi Internasional yang begitu megah.

Saya kurang tahu latar belakang Pak Natsir atau Pak Anwar Harjono ketika menetapkan saya salah satu dari enam orang yang diberi tugas, yang lainnya adalah Pak Dr. Deliar Noer, Arsyad Anwar, dekan Fakultas Ekonomi UI, dulu juga direktur Akademi Bank Muhammadiyah.

Saya mengajak Pak Deliar Noer, untuk konsekuen mengembangkan Bank Islam dan ekonomi Islam di Indonesia, walaupun baru tahap pemikiran gagasan bersama Arsyad Anwar, Baqir Hasan, Ismail Sunni. Lalu almarhum doktor Azhari Azhar, doktor pertama di Indonesia tentang Ekonomi Planning. Dan saya bersyukur kepada Allah berkenalan dengan orang-orang mulia ini, itu tidak pernah lupa sampai sekarang. Padahal kejadiannya sudah 20 tahun yang lalu karena mereka pernah membuka mata hati saya. Akhirnya teman-teman yang

lain tidak mungkin karena kesibukan. Tapi yang pernah saya ingat sampai sekarang adalah Baqir Hasan dan Rasyad Anwar mengatakan, "ekonomi Islam itu nonsense". Saya bilang, "Anda belum mempelajari, coba pelajari dulu sama-sama."

Dari 1975 kembali 1976 sampai sekarang, saya meneruskan tugas dari Mohammad Natsir. Karena menurut saya, tugas Mohammad Natsir bukan sekadar menghadiri konperensi tapi *what's next?* Itu yang penting. Sampai pada puncaknya 1986, pada 1983 saya jadi rektor universitas Ibnu Khaldun di Bogor dan makin intensif bertemu beliau. Apa lagi ketika beliau menanggapi Islamisasi ilmu pengetahuan kampus. Beliau bahkan mengatakan: "tolong, teruskan, kembangkan."

"Saya ini seperti kehilangan. Dulu saya pendiri Universitas Islam Indonesia (Yogya, Pen), tapi justru yang tidak saya dirikan yang sering menghubungi saya," kata beliau. "Itu yang saya dirikan tidak menghubungi lagi. Jadi seperti anak hilang. UII universitas pertama di Indonesia setelah proklamasi. Waktu itu, belum berdiri UI apalagi Unpad." Saya katakan mudah-mudahan Pak Natsir, universitas Ibnu Khaldun Bogor bisa berkembang, bahkan menjadi universitas International. Jadi nyambung dengan usul Bang Imad.

Beberapa cuplikan yang saya betul-betul bangga kepada beliau adalah ketika beliau menulis pikirannya sebagai berikut: *seringkali orang menyangka Islam bertentangan dengan adanya bangsa-bangsa. Islam memungkiri adanya bangsa, seolah-olah orang yang memeluk Islam itu tidak ada bangsanya, tidak betul. Kita dapat menjadi orang muslim yang dengan taat dengan riang gembira, menyanyikan Indonesia tanah airku, bagaimana kita bisa menghilangkan keindonesiaan kita?*

Allah lah yang menjadikan kita berbangsa-bangsa seperti yang tampak di muka bumi sekarang ini. Jadi ketika ada orang mengatakan Islam anti kebangsaan, Alhamdulillah Pak Anwar juga bangkit menulis lagi di *Media Da'wah* mengenai Al-Hujurat, ayat 13, ini. Jauh dari hendak menghapuskan bangsa dan kebangsaan, Islam justru meletakkan dasar-dasar menyubur hidupkan bangsa dan suku-suku bangsa atas dasar harga-menghargai, kenal-mengenal dan saling memberi.

Kalau kita bangsa Indonesia, silahkan bangga jadi bangsa Indonesia tapi awas jangan sampai merosot ke *couvinisme* yang sempit pasifisme dan totaliter. Jadi ini orang-orang yang belum mengerti Islam karena belum membaca buku *Capita Selecta*, oleh karena itu *Capita Selecta* perlu diperbanyak lagi. Entah itu oleh *Media Da'wah*

atau Dewan Da'wah atau oleh Youth Islamic Study Club (YISC) Al-Azhar.

Ada kesan yang saya baca juga penting, Pak Natsir menekankan supaya kita dalam situasi dan kondisi apapun harus berbuat baik. Karena jasa baik tak akan pernah hapus. Selama dua hari kita di sini meyakinkan bahwa Pak Natsir telah berbuat jasa baik yang banyak. Walaupun Pak Natsir sudah wafat, ia tidak mati, tapi hidup. Oleh karena itu seminar semacam ini harus berulang-ulang, setahun sekali, untuk senantiasa mengingatkan, apa lagi kalau ada rencana mendirikan Universitas Islam International. Untuk memelihara langkah di jalan kebenaran kita harus menjauhi perasaan memihak kepada yang satu dan menentang kepada yang lain.

Dengan ikhlas kita harus memelihara dan mempertahankan secara damai dan berpedoman keadilan belaka, tidak tergoda oleh perasaan benci ataupun cinta. Jadi kalau kita cinta kepada Natsir tidak boleh sampai kepada kultus individu. Kalau kita benci Bung Karno jangan juga berdoa ya Allah mudah-mudahan Bung Karno masuk Neraka. Mulia sekali ini Pak Natsir mengajarkan kepada saya dan kita.

Pak Natsir disebut *Moslem Left*, saya tidak setuju. Dalam Islam tidak ada left tidak ada kanan, tidak ada mana yang disebut kanan dan kiri, Barat dan Timur. Pak Natsir menyebut, anti eksploitasi anti kemiskinan. Beliau menulis dalam bahasa Inggris yang dipakai sekarang di dunia *emanation of poverty*. Ini Pak Natsir tahun 1950.

Pak Natsir tidak anti Barat, justru anak-anak muda selalu anti Barat. Anak-anak muda selalu baca '*laisal biro antualu wujhukum kibalal masyriki wal maghribi ...*' 'Ada ilmu yang hilang yang sekarang diambil Barat, merebut kembali!! Pak Natsir bilang begitu, ambil kembali. Semua yang hak kita terima, biar pun itu datangnya dari Barat. Semua yang bathil akan kita singkirkan walaupun itu datangnya dari Timur.

Hari ini telah sampai pada *Capita Selecta*, kita ingin banyak menyumbang juga sebagaimana yang sudah disumbangkan oleh almarhum Pak Natsir, pribadi yang tidak tergoda oleh rasa benci maupun cinta, objektif dan rasional. Tidak pendendam, justru yang penting, walaupun mudah diucapkan, kadang-kadang pada diri saya sendiri juga sulit dilaksanakan.

Jadi ketika saya harus berbicara dengan orang yang sangat benci, sering sulit. Tapi beliau berhadapan dengan orang Komunis sekalipun, dalam hatinya, anti komunis masih mampu berbicara, berdialog.

Ini pelajaran bagi generasi muda agar tidak kuper, kurang pergaulan. Luaskan pergaulan dengan siapa pun, boleh berdialog berbicara, dan ini sangat penting kalau kita ingin menerobos menjadi seorang pemimpin yang *acceptable*, dapat diterima oleh kawan dan oleh lawan sekalipun.

Begitulah, Pak Natsir diterima oleh kawan dan lawan. Kita biasanya jadi pemimpin di kandang sendiri atau jago kandang. Tapi ketika jadi pemimpin di luar, wibawa melorot. Kita menghendaki umat Islam agar jadi pemimpin-pemimpin Internasional yang memimpin seluruh bangsa dengan beragam atau pluralistik segala jenis.

Dr. Yusril Ihza Mahendra

Saya ikut Pak Natsir sejak 1976, dan sampai beliau wafat. Untuk mengenal beliau, lebih banyak saya studi agak serius mengenai beliau dan partainya. Saya kumpulkan tulisan-tulisan lama, majalah dan koran-koran lama. Kadang Pak Natsir sendiri sering terkaget-kaget ketika saya beri tulisannya sendiri tahun 1932. "Kamu dapat dari mana?" tanya beliau. Dengan cara itu saya mungkin dapat memahami beliau dengan lebih baik lagi.

Ada satu hal yang sayang sekali kita tidak bahas dalam seminar ini, yaitu mengenai politik luar negeri, yang pembicaranya berhalangan hadir kali ini. Dan juga mengenai strategi pembangunan ekonomi Kabinet Pak Natsir waktu itu. Salah seorang arsiteknya juga selain Pak Sjafruddin adalah Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Sayang sekali kita tidak bahas.

Sehubungan dengan masalah politik luar negeri, tadi Pak Lukman Harun dan Pak Lukman Hakim menyinggung sedikit masalah ini dan Pak Anwar sudah menambahkan. Tapi saya perlu sedikit menambah lag.

Ada dokumen penting yang barangkali sudah dilupakan orang, yaitu pidato Pak Natsir ketika menjadi Perdana Menteri untuk mendapatkan kepercayaan di depan Parlemen. Saya ada bukunya, sudah lapuk, judulnya *Membangun Di antara Puing dan Reruntuhan*.

Dalam buku itu, ada satu bab yang membahas politik luar negeri, hasil diskusi antara Pak Room dengan Pak Natsir. Pada waktu itu Pak Natsir mengatakan: politik luar negeri yang bebas. Memang ada ke-

lanjutan dari politik Kabinet Hatta, tapi ada juga perbedaannya yang cukup penting.

Ketika di Parlemen ditanya, "Politik bebas yang bagaimana?" Perdana Menteri Natsir menjawab bukan politik bebas yang pasif, tapi politik yang bebas aktif. Dan sejak itu politik luar negeri bebas aktif kita kenal sampai sekarang.

Banyak orang lupa, politik luar negeri bebas aktif adalah politik luar negeri Kabinet Natsir yang masih dipakai terus oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang. Politik luar negeri bebas Pak Hatta, itu lebih dekat kepada politik netral. Sama sekali tidak memihak, dan cenderung pasif dalam menghadapi peristiwa-peristiwa International.

Pak Natsir waktu itu mengatakan, politik bebas dan aktif Indonesia, tidak berdiri pada salah satu blok, Barat maupun Timur. Tapi politik bebas dan aktif, yang sewaktu-waktu dapat mengambil pendirian sejalan dengan blok Soviet, dan pada kasus yang lain kita dapat sejalan dengan blok Amerika Serikat. Satu dan lain hal, kata Pak Natsir, adalah sesuai dengan kepentingan nasional kita. Itu rumusan politik bebas aktif Pak Natsir, yang saya kira sudah banyak sekali dilupakan orang.

Orang Barat sering mengatakan dalam Masyumi ada dua blok, blok Sukiman dan blok Natsir. Satu blok Jawa dan satunya blok Minangkabau. Saya katakan tidak betul itu. Pak Natsir pendukungnya dalam partai ya orang Jawa juga, Mohammad Roem, Anwar Harjono dan Prawoto. Bukan orang Padang, orang Jawa.

Tapi sebaliknya saya bilang, Pak Sukiman pendukungnya Isa Anshari, Abu Hanifah yang orang Padang. Jadi tidak betul anggapan-anggapan seperti ini. Masalah Pak Sukiman, kalau Pak Lukman Harun mengatakan Masyumi pro Amerika, Pak Natsir sambil ketawa waktu saya tanya mengatakan, "... ya kami-kami semua condong ke sanalah. Tapi Sukiman itu lebih Amerika dari kami-kami ini."

Tapi ada satu hal yang barangkali kita tidak tahu soal ini, memang waktu itu sedang menghadapi Komunis. Ancaman Komunis sudah mulai kuat di dalam maupun di luar negeri. Kita tahu Tan Malaka sampai ke mana-mana waktu perjanjian Renville. Pada waktu itu ada pikiran-pikiran untuk menghadapi Komunis, kita harus memihak kepada Amerika Serikat, Pak Sukiman pikir begitu.

Ketika Pak Natsir jadi Perdana Menteri, Kohand waktu itu wakil UNSI, pengawas BPP di sini. Setelah penyerahan kedaulatan, Kohand menjadi Dubes Amerika Pertama untuk RIS. Kata Pak Natsir, "Kohand diam-diam menjumpai saya dan Sjafruddin berdua." "Begini saja, Pak Natsir," katanya, "kami akan sokong pemerintah Indonesia dan Amerika akan kasih duit kepada Masyumi. Kami yakin Masyumi akan jadi sekutu Amerika untuk membendung Komunis di Asia Tenggara. 100 batalyon akan dilatih oleh tentara Amerika." "Tapi kami tolak mentah-mentah," begitu akhir penjelasannya.

Walaupun kita tahu, pada masa Kabinet Natsir, beliau mengusahakan pinjaman 100 juta dollar dari Exim Bank untuk mempersenjatai Brimob, tapi menolak melatih Angkatan Bersenjata kita oleh Amerika Serikat. Pak Natsir tetap berkeyakinan, kita beraliansi dengan Amerika dalam menghadapi Komunis, tapi tidak setuju Indonesia masuk ke dalam blok Barat.

Memang tahun-tahun terakhir itu, kita tahu Ayub Khan memerintah di Pakistan, mereka membentuk PANSEANTO pada waktu itu. Tetapi Pak Natsir tetap tidak setuju dengan blok Barat, dan dengan Pak Sukiman berdebat sengit. Debat itu dimuat dalam majalah *Suara Masyumi*, bisa kita telaah. Di situ debat antara dua belah pihak di depan sidang partai.

Betapa demokratis mereka itu. Pak Sukiman di satu pihak membela MSA bersama Subarjo dan Pak Yusuf Wibisono, bertiga bikin makalah. Sedang Pak Natsir, Pak Roem dan Pak Sjafruddin menentang MSA. Dan debat di hadapan dewan partai dan voting pilih siapa. Di sini grop Natsir kalah, menurut voting partai sokong Sukiman. Nah, ini suatu kejadian.

Jadi tidak selalu pikiran Pak Natsir mendominasi Masyumi. Kadang-kadang kalah. Waktu itu Pak Sukiman mengatakan, dalam politik luar negeri kita harus realistik, menghadapi komunis, kita tidak bisa idealis-idealisan saja, bikin non blok.

Pak Sukiman, melanjutkan dalam politik luar negeri, kita bertarung antara kekuatan. Untuk menghadapi Komunis kita tidak bisa non blok, itu idealis saja. Apa lagi mau bikin blok Islam katanya, Negara Islam itu sendiri macam-macam ideologinya. Indonesia Pancasila, ini baru koalisi Islam, untuk menghadapi harus dengan dua senjata,

ekonomi dan militer. Karena itu (didukung oleh Yustid Wibisono) kita harus terima MSA. Dengan MSA, Eropa Barat berhasil bangkit, dan dengan cara itu mereka membendung komunis."

Memang tampaknya banyak versi juga dalam partai ketika itu. Kita melihat dalam politik luar negeri, Pak Natsir kalau mau dibilang condong ke Amerika, betul juga, ketika menghadapi komunis pernah menyokong Indonesia untuk masuk ke dalam blok Barat. Tapi Sukiman dengan MSA sebetulnya bisa membaca Indonesia harus masuk ke dalam blok Barat. Jadi ada perbedaan yang cukup penting di sini.

Pak Ghazali Ismail, penghulu Kamal Sentiong, pernah cerita dengan saya, datang ke kantor Perdana Menteri untuk mengadukan masalah tikar Masjid Kramat Sentiong dan bedug pecah. Tapi dicegah oleh Ibu Maria Ulfah. "Buat apa soal-soal begitu kamu bawa-bawa ke Perdana Menteri?" sergah Maria Ulfah.

Tapi Pak Natsir menerima, Pak Ghazali masuk dan bilang. "Saya selesaikan masalah bedug itu." "Perdana Menteri ngurusin bedug?" tanya saya, "itu kan soal kecil." Tapi Pak Natsir menjawab, "Bagi kita, tidak ada soal besar atau soal kecil. Bedug pecah, itu soal kecil bagi kita, tapi bagi orang kampung, itu soal besar."

Ini soal pribadi antara Natsir dengan Wahid Hasyim. Waktu itu terjadi bencana alam di Garut, Jawa Barat. Saya (Natsir) mengatakan, Kementerian Agama harus kirim bantuan, tetapi menurut informasi bantuan itu tidak sampai ke tangan yang berhak. Karena itu saya panggil Pak Wahid Hasyim dan saya bicara agak keras. Dia marah, "Kamu ini berani-berani marahin saya." Sejak itu hubungan keduanya menjadi tidak baik.

Dalam kajian yang akan datang perlu kita ungkap strategi pembangunan ekonomi Kabinet Pak Natsir, banyak sekali kesamaannya dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintahan Orde Baru. Sebetulnya Masyumi cukup realistik, menerima modal asing. Pak Sjaf arsiteknya dan Pak Hatta sebelumnya karena menolak nasionalisasi. PKI anti modal asing juga PNI karena ultra nasionalis menolak modal asing.

Pak Sjaf bilang, pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara kapitalis asing dan kapitalis bangsa sendiri. Seorang kapitalis di mana

pun dan kapan pun tetaplah kapitalis. Mengutip kata-kata Pak Yunan, Pak Sjafruddin bilang uang itu tidak ada baunya dan secara faktual kapitalis bangsa sendiri lebih kejam dari kapitalis bangsa lain.

Jadi Pak Sjafruddin itu realistis menghadapi orang PNI yang anti modal asing. Pokoknya bagi PNI, semua ditolak dan hanya mau menerima nasionalisasi. Tapi Masyumi mau nasionalisasi, tapi selektif dan saya kira cukup realistis juga.

Mereka ambil modal asing tapi memikirkan agar tidak menjadi beban. Sekarang kita seminar Natsir dan sesi yang akan datang, insya Allah barangkali kita seminar mengenai Pak Sjafruddin. Almarhum itu orang yang sangat mengesankan. Kita tingkatkan kajian yang lebih banyak.

Saya sendiri ingin membuat banyak tulisan untuk disertasi doktor mengenai Pak Natsir saya kira cukup bahan untuk itu. Tetapi pembimbing saya mengatakan lebih baik ditulis partainya daripada orangnya. Belakangan saudara Mohammad Nur menulis disertasi mengenai pemikiran Pak Natsir. Barangkali akan banyak nantinya orang menulis disertasi mengenai pemikiran Pak Sjafruddin mengenai ekonomi.

Dr. Anwar Haryono:

Sehubungan dengan MSA memang saya tahu persis sebagaimana yang diutarakan oleh Yusril. Adapun mengenai Pak Natsir cenderung kepada Amerika, barangkali pendapat subjektif. Tapi yang objektif, baik Pak Sukiman maupun Pak Natsir, sama-sama mengakui Indonesia digiring Belanda dalam pengaruh Amerika.

Biodata Penulis

Dr. Ir. Ahmad Muflih Saefuddin, Guru, Dosen, dan Politikus. Doktor Ekonomi Pertanian Jerman. Anggota DPR/MPR R.I. Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP). Mantan Aktivis PII, HMI, KAHMI, ICMI, dan organisasi LPSM/LSM.

Dr. Ichlasul Amal, Dosen Fisipol UGM Yogya, Mantan aktivis PII, HMI, KAHMI, ICMI.

Prof.Dr. Jusuf Amir Feisal. Direktur Yayasan Pendidikan PGII dan Ketua Yayasan Pendidikan Masyarakat Bandung (LPMB). Doktor Colombia University, AS. Mantan aktivis HMI, Parmusi, ISPI.

Dr. Taufik Abdullah, Direktur Leknas LIPI dan Ahli Peneliti Utama LIPI. Doktor Cornell University, AS. Mantan Ketua Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS).

Dr. Muhammad Imaduddin Abdurrahim. Ketua Yayasan Pembina Sari Insan (YAASIN). Management & Engineering Consultant, IIFSO, WAMY, ICMI.

Dr. Mohtar Naim, Dosen Universitas Andalas Padang, Doktor University of Singapore.

Dr. Nurcholis Madjid, Peneliti LIPI, Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI, Anggota Komisi Hak Azasi Manusia. Doktor University Chicago, AS. Mantan Ketua HMI.

Dr. Yusril Ihza, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Fak. Hukum UI. Doktor Fak. Ilmu Sosial University Sains Malaysia, Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UI (MPM-UI), dan YISC Al-Azhar.

Drs. Lukman Hakiem, Redaktur Majalah "*Media Dakwah*", Alumni Fak. Keguruan Ilmu Sosial IKIP Yogyakarta. Mantan Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta.

Geys M. Ammar SH, Aktivis Al-Irsyad.

Drs. Mohammad Anwar, Atase Agama di Kedutaan RI di Saudi Arabia. Mantan aktivis PII, HMI, BKPM, dan mantan Ketua Umum YISC Al-Azhar.

Drs. Tamsil Lindrung, Alumni IKIP Ujung Pandang, Aktivis ICMI DKI.

HE. Benyamine, Mahasiswa Teknik Univ. Kristen Indonesia, Ketua Umum YISC Al-Azhar.

Abi Djaini Martha, Penulis skenario Film, Sinetron, Dokumenter, Buku, dan artikel populer. Accounting Jayabaya Jakarta, Aktivis YISC Al-Azhar.



Lelaki itu, yang biasa dikenal sebagai 'pembawa hati nurani ummat', telah pergi selamanya. Dialah, Mohammad Natsir, seorang pemikir dan pejuang yang menyelamatkan negeri ini dari perpecahan.

Perjuangan yang panjang dan wawasan politiknya yang luas telah mengantarkan Pak Natsir tidak hanya menjadi milik bangsa Indonesia, tapi juga milik dunia, khususnya dunia Islam.

Bagi almarhum, "mengisi kemerdekaan itu sebuah rangkaian rasa bersyukur. Diakuinya, banyak kekurangan di negara kita, tapi dengan kondisi apa pun yang melekat kita harus menerima Republik ini dengan rasa syukur. Mensyukuri nikmat adalah kewajiban".

Dr. Anwar Harjono SH

Mohammad Natsir, salah satu unsur dari kontinuitas sejarah sebagai pelaku sejarah.

Dr. Ir. A.M. Saefuddin